

LAPORAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2023



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023 yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Program dan Kegiatan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang telah dilakukan selama periode tahun anggaran 2023 pada masing-masing unit Eselon II. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan upaya tindaklanjut untuk pencapaian sasaran target pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran kinerja Ditjen PSP dan dapat memberikan manfaat dan menjadi umpan balik bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Januari 2024
Direktur Jenderal,

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.



Executive Summary

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai unit eselon I Kementerian Pertanian berperan untuk memfasilitasi seluruh program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian di subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terus berinovasi dari masa ke masa, menyesuaikan dinamika dan perkembangan teknologi, sehingga kualitas penyaluran bantuan pemerintah untuk pertanian Indonesia tetap terjaga optimal.



Direktorat Irigasi Pertanian

Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian pada tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut.

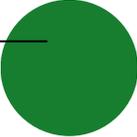
- Kegiatan **UPLAND terlaksana di 13 Kabupaten** yaitu Banjarnegara, Garut, Gorontalo, Lebak, Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep, dan Tasikmalaya. Realisasi penambahan luas areal tanam sampai akhir Desember tahun 2023 seluas **2,086 ha (92,6%)** menurut tabulasi data dari target **2,254 ha**.
- Kegiatan **Irigasi Perpipa**an mengalami **refocussing anggaran** sehingga hanya terlaksana kegiatan persiapan.
- Kegiatan **Embung Pertanian** sebanyak **503 unit (100%)** di 17 provinsi dan 84 kabupaten/kota.
- Terlaksananya kegiatan **Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim** dengan **target 459 unit** dan **realisasi 443 unit (96,51%)**. Kegiatan ini terdiri dari:
 - **Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim** dengan target 172 unit dan realisasi 151 unit (87,79%).
 - **Irigasi Perpompaaan/Perpipaan** dengan dengan target 160 unit dan realisasi 160 unit (100%).
 - **Gerakan Nasional (Gernas) El Nino** dengan target 127 unit dan realisasi 132 unit (103,94%). Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu:
 - **Irigasi Air Tanah Dalam** sebanyak 30 unit di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota.
 - **Irigasi Air Tanah Dangkal** sebanyak 14 unit di 7 provinsi dan 13 kabupaten/kota.
 - **Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas)** sebanyak 88 unit di 9 provinsi dan 39 kabupaten/kota.
- Kegiatan **Irigasi Perpompaaan** dengan target 110 unit, namun mengalami **refocussing anggaran** sehingga hanya terealisasi secara fisik sebanyak 7 unit. Kegiatan ini terdiri atas **Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Timur** 1 unit, **Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Timur** 1 unit, dan **Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Tengah** 5 unit.
- Kegiatan **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)** sebanyak 1.028 unit (100%) di 24 provinsi dan 178 kabupaten/kota.
- Kegiatan **Survei Investigasi dan Desain (SID) Irigasi Pertanian** terlaksana di 3 lokasi di 3 provinsi yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
- Terdapat **2 (dua) rekomendasi dampak perubahan iklim** yang diberikan di tahun 2023 yaitu:
 - Adaptasi menyikapi awal musim kemarau yang terjadi pada bulan April - Juni 2023.
 - Adaptasi menyikapi awal musim hujan yang terjadi pada bulan September - November 2023.





Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

- Kegiatan **Rekomendasi Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)** dengan **target 35 rekomendasi kebijakan** dengan **realisasi 36 rekomendasi kebijakan (102,86%)**. Kegiatan ini terdiri atas 31 rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan pada 31 kabupaten/kota atau 11 provinsi di Indonesia. Target 4 (empat) rekomendasi kebijakan dilaksanakan oleh satker pusat dengan realisasi 5 (lima) rekomendasi kebijakan yaitu:
 - Sinergi Kebijakan Perlindungan Lahan Nasional dan Adat (GIAHS Karangasem, Bali)
 - Sinergi Perlindungan Lahan Pertanian melalui Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
 - Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Model Sistem Identifikasi Indikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Pembangunan Pertanian dalam Rencana Tata Ruang
- Kegiatan **Lahan Konservasi dan Rehabilitasi** memiliki target 44 unit dengan realisasi sebanyak 46 unit (104,55%). Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - **Smart Farm dan Korporasi Pertanian** terlaksana sebanyak 22 unit di 8 provinsi dan 22 kabupaten/kota.
 - **Smart Greenhouse** terlaksana sebanyak 25 unit di 7 provinsi dan 12 kabupaten/kota.
- Kegiatan **Data Lahan Pertanian** memiliki target 12 unit dengan realisasi 13 unit (108,33%). Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - **Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS) dengan Citra Satelit** sebanyak 10 unit (dokumen peta) yang dilaksanakan di 10 provinsi yaitu Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
 - **Updating Peta Lahan Sawah** sebanyak 1 unit (dokumen peta) berupa perbandingan antara Luas Baku Sawah (LBS) 2019 dengan *Update* Luas Sawah 2023.
 - **Data Geospasial Petak Lahan Sawah** sebanyak 2 unit (dokumen peta) yang terdiri atas Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) dan Kabupaten Jember (Jawa Timur).
- Kegiatan **Jalan Usaha Tani** memiliki target sebanyak 928 unit dengan realisasi 928 unit (100%) di 25 provinsi dan 162 kabupaten/kota.
- Kegiatan **Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Produktif** memiliki **target seluas 775 ha** dengan **realisasi 754 ha (97,29%)** yang dilaksanakan di 5 provinsi. Kegiatan di Nusa Tenggara Barat hanya melakukan kegiatan persiapan. Kegiatan di Sulawesi Tengah (160 ha) dan Kep. Bangka Belitung (180 ha) terealisasi secara fisik 100%. Kegiatan di Sulawesi Selatan memiliki target seluas 285 ha dengan realisasi 268 ha (94,04%) dimana 17 ha tidak terlaksana di Kab. Bantaeng. Selain itu, kegiatan di Nusa Tenggara Timur memiliki target 150 ha dengan realisasi 146 ha (97,33%) dimana 4 ha tidak terlaksana di Kab. Flores Timur.

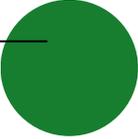
- 
- 
- Kegiatan **Optimasi Lahan** memiliki **target 1.711 ha** dengan **realisasi 1.711 ha (100%)**. Kegiatan ini dilaksanakan di 19 provinsi. Namun, terdapat 6 provinsi yang mengalami *refocussing* anggaran yaitu Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Barat sehingga hanya melakukan kegiatan persiapan saja. Kegiatan Optimasi Lahan terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - **Optimasi Lahan Rawa** memiliki target awal seluas 278 ha. Namun, kegiatan di provinsi Riau terjadi *refocussing* anggaran sehingga kegiatan ini hanya dilaksanakan di **provinsi Aceh seluas 200 ha (100%)**.
 - **Optimasi Lahan Kering** memiliki target awal seluas 27.700 ha. Namun, terjadi *refocussing* anggaran pada 5 provinsi (Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Barat) sehingga kegiatan ini memiliki **target seluas 1.511 ha** yang **dilaksanakan 100%** di 13 provinsi yaitu Aceh (75 ha), Sumatera Utara (225 ha), Sumatera Barat (150 ha), Jambi (75 ha), Lampung (100 ha), Jawa Barat (225 ha), Nusa Tenggara Barat (125 ha), Nusa Tenggara Timur (150 ha), Sulawesi Selatan (100 ha), Sulawesi Utara (50 ha), Gorontalo (100 ha), Papua Barat (50 ha), dan Papua (86 ha).
 - Kegiatan **Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate)** memiliki **target seluas 5.210 ha** di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara (100 ha), Kalimantan Tengah (4.210 ha), Nusa Tenggara Timur (600 ha), dan Papua (300 ha). Namun, kegiatan ini **hanya terlaksana di 2 provinsi seluas 1.944 ha (37,31%)** yaitu di provinsi **Papua seluas 300 ha (100%)** dan **Kalimantan Tengah seluas 1.644 ha (39,05%)**. Kegiatan di Kalimantan Tengah tidak dapat dilanjutkan karena berdasarkan reviu SID lokasi hanya mampu menyediakan area seluas 1.644 ha sehingga sesuai dengan SID kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan di Sumatera Utara tidak dapat dilanjutkan karena pembuatan *raiser* atau saluran pipa kurang efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan di lokasi tersebut telah tersedia saluran pipa di lahan petani. Kegiatan di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria teknis.

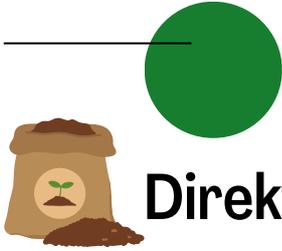


Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

- Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyediakan bantuan pemerintah alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan ini memiliki target 23.081 unit dan terealisasi sebanyak 23.081 unit (100%) di 32 provinsi dan 347 kabupaten/kota.
- Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah **alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan** pada tahun 2023 memiliki **target sebanyak 20.306 unit dan terealisasi sebanyak 20.306 unit (100%)**. Kegiatan ini menyalurkan 6 (enam) jenis bantuan alat dan mesin pertanian yaitu sebagai berikut.
 - **Traktor Roda 4** memiliki target sebanyak 1.076 unit dan terealisasi sebanyak 1.076 unit (100%) di 28 provinsi dan 206 kabupaten/kota.
 - **Traktor Roda 2** memiliki target sebanyak 5.504 unit dan terealisasi sebanyak 5.504 unit (100%) di 29 provinsi dan 301 kabupaten/kota.
 - **Pompa Air** memiliki target sebanyak 2.753 unit dan terealisasi sebanyak 2.753 unit (100%) di 27 provinsi dan 203 kabupaten/kota.
 - **Pompa Air mendukung kegiatan Gerakan Nasional (Gernas) Penanggulangan El Nino** memiliki target sebanyak 135 unit dan terealisasi sebanyak 135 unit (100%) di 10 provinsi.
 - **Handsprayer** memiliki target sebanyak 10.266 unit dan terealisasi sebanyak 10.266 unit (100%) di 29 provinsi dan 227 kabupaten/kota.
 - **Kendaraan Roda 3** memiliki target sebanyak 572 unit dan terealisasi sebanyak 572 unit (100%) di 21 provinsi dan 138 kabupaten/kota.
- Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah **alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura** pada tahun 2023 adalah menyalurkan alat dan mesin pertanian berupa **Cultivator**. Kegiatan ini memiliki **target sebanyak 2.775 unit dan terealisasi sebanyak 2.775 unit (100%)** di 30 provinsi dan 216 kabupaten/kota.
- **Pengawasan peredaran bantuan alat dan mesin pertanian** di tingkat penerima dilakukan melalui aplikasi BAST Online. Sampai dengan akhir Desember 2023, alat yang telah didistribusikan kepada kelompok penerima bantuan alat dan mesin pertanian dan terdaftar di BAST Online **sebanyak 17.028 unit atau 73,8 % dari 23.081 unit**.
- Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian dilaporkan melalui aplikasi BAST Online dan e-mail Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk kegiatan penyaluran alat dan mesin pertanian tahun 2022 (T-1). Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dapat diketahui bahwa hanya terdapat **3.868 unit (18,03%) yang dilaporkan pemanfaatannya**. Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran Dinas lingkup Pertanian dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan alat dan mesin pertanian. Selain itu, **nilai kemanfaatan alat dan mesin pertanian yang digunakan petani sebesar 3.446 unit atau 89,09% dari 3.868 unit terlapor**.

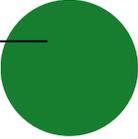
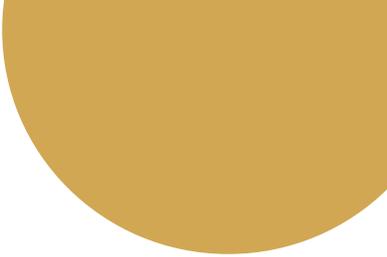


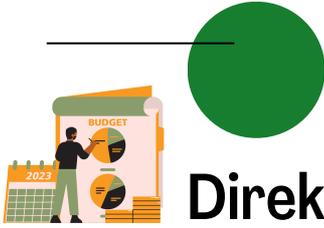
- 
- 
- Kegiatan **perbengkelan alat dan mesin pertanian** pada tahun 2023 memiliki target pengembangan sebanyak 65 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.200.000.000. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan kegiatan ini mengalami perubahan. Perubahan pertama adalah pengurangan jumlah perbengkelan, dari 65 unit menjadi 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.080.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan barang di penyedia tidak mencukupi. Penyedia bengkel alsintan berjalan hanya mampu memproduksi sebanyak 11 unit sampai dengan akhir tahun 2023. Perubahan kedua adalah adanya *refocussing* anggaran. Anggaran perbengkelan alsintan tahun anggaran 2023 menjadi salah satu kegiatan yang terdampak dilakukan pemotongan anggaran, sehingga **kegiatan perbengkelan untuk TA. 2023 tidak dapat dilaksanakan.**
 - Kegiatan **sertifikasi LS Pro Alat dan Mesin Pertanian** merupakan kegiatan agar produsen bisa mendapatkan sertifikat tanda SNI melalui suatu proses yang dilakukan oleh LS Pro terakreditasi KAN. Pada tahun 2023, permohonan sertifikasi alsintan yang diajukan oleh pemohon sertifikasi sebanyak **158 Merek Tipe Model dari 16 ruang lingkup**, sedangkan **20 ruang lingkup tidak dapat diproses karena permohonan produk impor** dan LS Pro Alsintan belum memiliki anggaran untuk memproses permohonan produk impor.
 - **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan LS Pro Alat dan Mesin Pertanian** mendapatkan **nilai IKM sebesar 75,25% atau masuk dalam kategori B (Baik)**. Unsur yang memiliki nilai paling rendah yaitu waktu pelayanan (2,57) dan penanganan pengaduan, saran dan keluhan (2,57).
 - **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LS Pro Alat dan Mesin Pertanian** berupa biaya sertifikasi yang ditagihkan kepada pemohon sertifikasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023. Penerimaan PNBP dari sertifikasi setiap tahunnya terjadi peningkatan. Tahun 2023, jumlah PNBP memiliki **target sebesar Rp. 550.000.000** dan **tercapai realisasi mencapai Rp. 1.187.380.270 (215,89%)**.



Direktorat Pupuk dan Pestisida

- Kegiatan penyediaan sarana produksi berupa **pupuk menuju pertanian organik** memiliki target sebanyak 1.534 unit dan terealisasi sebanyak 1.528 unit (99,61%). Kegiatan ini memiliki 2 (dua) jenis kegiatan yaitu:
 - **Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)** memiliki target sebanyak 1.111 unit dan terealisasi sebanyak 1.109 unit (99,82%).
 - **Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)** memiliki target sebanyak 423 unit dan terealisasi sebanyak 419 unit (99,05%).
- Kegiatan penyediaan **sarana produksi untuk peningkatan produksi tanaman pangan** memiliki target distribusi pupuk terhadap lahan seluas 2.712.408 ha dengan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 2.475.981 (91,28%). Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) jenis sarana produksi yaitu:
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 1.786.413 ha di 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Pupuk Silika** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 201.919 ha di 10 provinsi dan 18 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Dekomposer** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 67.376 ha di 6 provinsi dan 10 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Pupuk Magnesium (Mg)** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 67.022 ha di 6 provinsi dan 16 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Senyawa Humat** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 115.801 ha di 12 provinsi dan 21 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Herbisida** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 211.260 ha di 9 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Pestisida Alami** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 26.190 ha di 8 provinsi dan 18 kabupaten/kota.
- Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi memiliki target sebanyak **11.246.965 orang** dengan realisasi sebanyak **12.396.247 orang (110,22%)**. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) di 33 satuan kerja provinsi lingkup pertanian yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Papua, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kep. Riau, dan Kalimantan Utara.

- 
- 
- Kegiatan **Pupuk Bersubsidi** memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 26.234.294.058.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.689.631.739.038 (97,92%). Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki target awal sejumlah 7.856.951 ton. Namun dalam perkembangannya, harga produksi pupuk mengalami kenaikan sehingga terdapat target penyesuaian berdasarkan **alokasi anggaran yaitu sejumlah 6.050.056 ton**. Kegiatan ini pada tahun 2023 dapat **terealisasi sejumlah 6.120.169 ton (101,15%)** dengan rincian jenis pupuk sebagai berikut.
 - Kegiatan penyaluran **Pupuk Urea** memiliki target awal sejumlah 4.642.703 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah **3.701.928 ton**. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah **3.655.133 ton (98,73%)**.
 - Kegiatan penyaluran **Pupuk NPK** memiliki target awal sejumlah 3.100.215 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 2.304.388 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 2.429.128 ton (105,41%).
 - Kegiatan penyaluran **Pupuk NPK Formula Khusus** memiliki target awal sejumlah 114.033 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 43.740 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 35.907 ton (82,09%).
 - Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi yang berbasis data e-Alokasi menjadi perhatian para auditor seperti Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK. Dengan demikian, apabila tidak dilakukan upaya perbaikan tata kelolanya maka tujuan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran sulit dilakukan. Dalam upaya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, maka terus dilakukan pengembangan untuk beberapa sistem baik dalam perencanaan seperti eRDKK dan eAlokasi maupun penyaluran seperti **T-Pubers, iPubers, REKAN, eVerval**.
 - Proses pelayanan **pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah** selama tahun 2023 telah menerbitkan **484 nomor pendaftaran** dalam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - Proses pelayanan **pendaftaran pupuk anorganik** sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan telah diterbitkan **857 nomor pendaftaran** dalam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - Selain SK nomor pendaftaran, telah diterbitkan juga **surat izin pesanan formula khusus pupuk anorganik** sebanyak **703 surat izin** dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - Pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring serta evaluasi penyaluran pupuk dan pestisida dengan hasil pengambilan serta **analisa sampel pupuk** sebanyak **78 sampel (111,42%)** serta pengawasan pestisida dengan pengambilan dan **analisa sampel pestisida** sebanyak **76 sampel (108,51%)**.
 - Kegiatan **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** Tahun 2023 dilaksanakan melalui penyusunan kurikulum diklat PPNS Tahun 2023 dan melakukan pelatihan PPNS di Diklat Reskrimsus, Mega Mendung, Jawa Barat dengan peserta sebanyak **30 orang** PPNS yang berasal dari petugas pusat dan daerah.



Direktorat Pembiayaan Pertanian

- Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** pada TA 2023 memiliki **target penyaluran** sebesar **100 triliun Rupiah** dengan capaian sebesar **Rp. 80.574.777.342.343 (80,57%)**. Kegiatan ini memiliki target pelaku usaha sebanyak **2.900 pelaku usaha** dan terealisasi sebesar **3.000 pelaku usaha (103,45%)**. Jumlah debitur pada tahun 2023 mencapai **1.641.580 orang** dari berbagai sektor pertanian yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (*Mixed Farming*) serta Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.
- Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan **Non Program** pada TA 2023 memiliki **target pelaku usaha** sebanyak **350 pelaku usaha** dan terealisasi sebesar **350 pelaku usaha (100%)**. Sumber fasilitasi pembiayaannya didapatkan melalui program **Lambung Pangan BAZNAS, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan PT. BPR NTB (Penyertaan Modal)**.
- Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui permodalan dari *Private Sector* memiliki **target pelaku usaha** sebanyak **200 pelaku usaha** dan terealisasi sebanyak **200 pelaku usaha (100%)**. Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) BUMN yang menjadi sumber permodalan bagi 200 pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang pertanian yaitu **PT. Pertamina (Persero)**.
- Peningkatan jumlah **LKM-A dan Koperasi Pertanian** pada tahun 2023 kembali tumbuh dengan tingkat penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian sejumlah **110 unit LKM-A dan 33 unit Koperasi Pertanian**.
- Kegiatan **Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)** merupakan perlindungan kepada pelaku usaha tanaman padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen. Kegiatan AUTP pada TA 2023 memiliki **target mitigasi** seluas **305.555,56 ha** dan terealisasi seluas **305.558,12 ha (100%)**.
- Kegiatan **Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)** merupakan perlindungan kepada pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi kematian ternak. Kegiatan AUTS/K pada TA 2023 memiliki target mitigasi sebanyak **20.000 ekor** dan terealisasi sebanyak **20.000 ekor (100%)**.
- Kegiatan program **Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) berbasis Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (AUTP-IHPPBA)** bertujuan untuk terlindunginya petani dari kerugian jika panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas. Sasaran pelaksanaan uji coba yaitu di **Kabupaten Karawang (Jawa Barat) dan Kabupaten Kendal (Jawa Tengah)**.

Daftar

Isi

BAB

01

Kinerja Prasarana dan Sarana Pertanian

hal. 01

BAB

02

Dukungan Anggaran Prasarana dan Sarana Pertanian

hal. 12

BAB

03

Direktorat Irigasi Pertanian

hal. 16

BAB

04

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan

hal. 35

BAB

05

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

hal. 77

BAB

06

Direktorat Pupuk dan Pestisida

hal. 101

BAB

07

Direktorat Pembiayaan Pertanian

hal. 143

BAB

08

Lampiran

hal. 154



Bab 01

Kinerja Prasarana dan Sarana Pertanian



Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) menanam padi menggunakan mesin tanam (rice transplanter) di Jetis, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.



Peran Prasarana dan Sarana Pertanian dalam Pembangunan Nasional



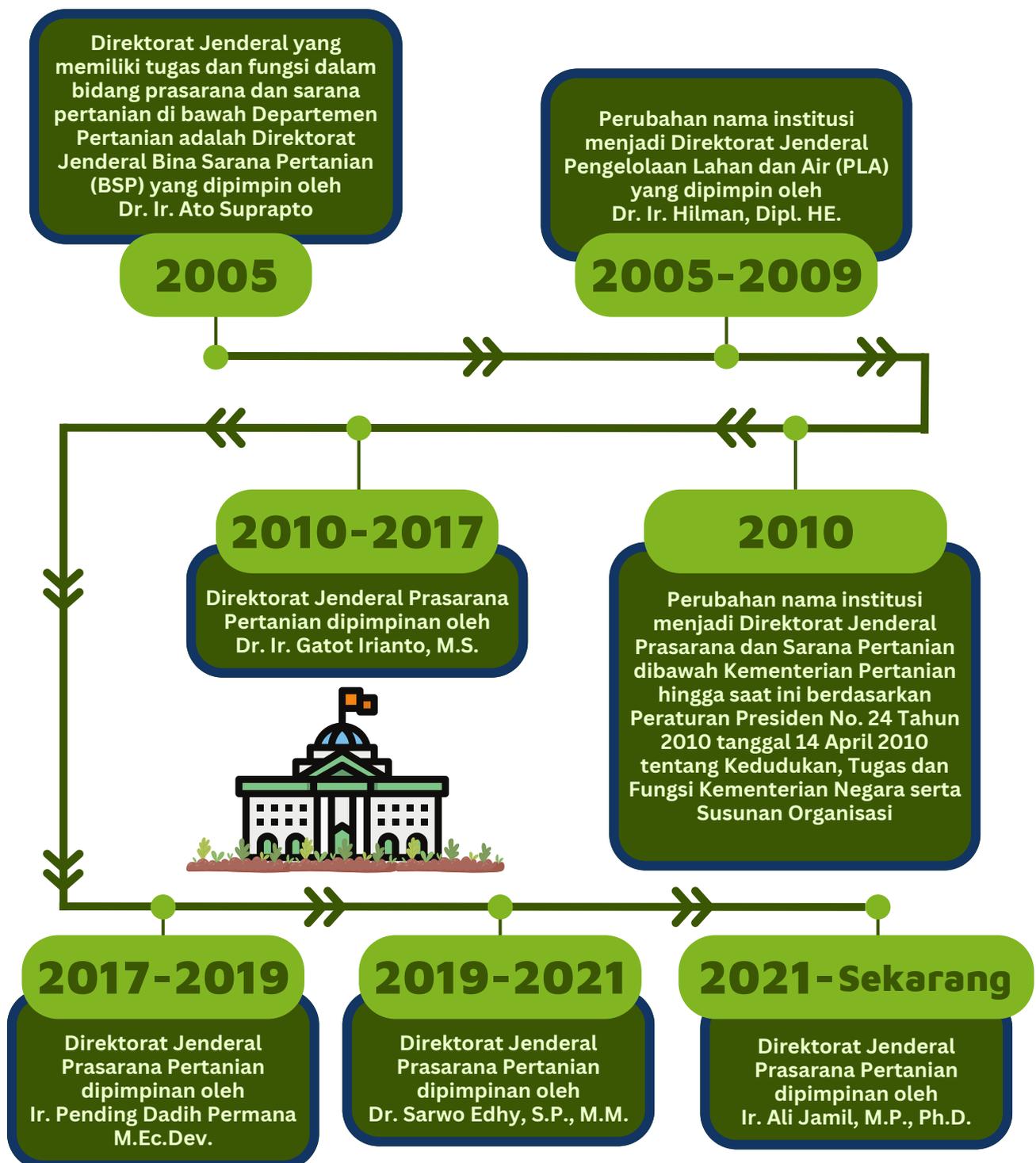
Direktur Jenderal PSP, Ali Jamil (kiri) sedang Perkembangan Food Estate Kalimantan Tengah saat kunjungan Komisi IV DPR RI yang sedang melakukan tugas pengawasannya pada kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau, Kalteng, Jumat (1/9/2023)

Menurut Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen.



Ditjen PSP dari Tahun ke Tahun

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai unit eselon I Kementerian Pertanian berperan untuk memfasilitasi seluruh program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian di subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terus berinovasi dari masa ke masa, menyesuaikan dinamika dan perkembangan teknologi, sehingga kualitas penyaluran bantuan pemerintah untuk pertanian Indonesia tetap terjaga optimal.



Ruang Lingkup

Prasarana dan Sarana Pertanian

Secara normatif, tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida serta alat mesin pertanian. Sedangkan fungsinya adalah:

- 01 Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
- 02 Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen
- 03 Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen
- 04 Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen
- 05 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen
- 06 Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- 07 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri



Visi

Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung pertanian berkelanjutan

Misi

- 01 Mendorong partisipasi *stakeholder* dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- 02 Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan
- 03 Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas
- 04 Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan.
- 05 Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana
- 06 Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai asas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
- 07 Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida.
- 08 Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- 09 Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida
- 10 Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian
- 11 Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.



Sasaran Program



Berdasarkan Peta Strategi Kementerian Pertanian yang disusun menggunakan *Balanced Scorecard* di atas, kontribusi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas”. *Output* Kementerian Pertanian berupa peningkatan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tidak dapat tercapai tanpa adanya peningkatan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian. Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tersedianya Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan							
1.	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	50,43	56,16	56,77	57,41	58,07	
2.	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	%	50,00	65,00	80,00	90,00	100,00	
2	Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan							
3.	Tingkat kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	%	81,62	81,33	82,18	82,18	82,18	
3	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
4.	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	34,81	34,83	34,88	34,93	34,98	
4	Terkelolanya Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas							
5.	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai	81,00	83,00	84,00	85,00	86,00	

Sumber: Rencana Strategis Ditjen PSP 2020-2024 (November 2022)

Setiap upaya dan aktivitas yang dilakukan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian wajib memiliki keterkaitan dalam mencapai visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam perumusannya, Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2020 – 2024 memperhatikan arah kebijakan Kementerian Pertanian, arahan Pimpinan (Pejabat setingkat Eselon I dan Eselon II).



Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon I Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi ke-2 Kementerian Pertanian, yaitu “Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian”. Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 – 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.

Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 - 2024



Sumber : Buku Rencana Strategis Ditjen PSP 2020 - 2024



Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian, membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana pertanian, meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi alat dan mesin pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 - 2024



Arah Kebijakan 1

Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Strategi 1 : Memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan



Arah Kebijakan 4

Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

Strategi 4 : Mendorong Pemanfaatan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian



Arah Kebijakan 2

Penyediaan Jaringan Irigasi Pertanian secara Efektif dan Efisien

Strategi 2 : Modernisasi dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian untuk memastikan seluruh Lahan Pertanian Beririgasi



Arah Kebijakan 5

Pemanfaatan Alsintan untuk Pembangunan Pertanian Berbasis Kewilayahan

Strategi 5 : Meningkatkan Pemanfaatan Alsintan Berkualitas secara Merata



Arah Kebijakan 3

Penyediaan Pupuk dan Pestisida untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Strategi 3 : Distribusi Pupuk dan Pestisida terstandart berdasarkan prioritas



Arah Kebijakan 6

Pelaksanaan RB Ditjen PSP sesuai Road Map RB Kementerian Pertanian

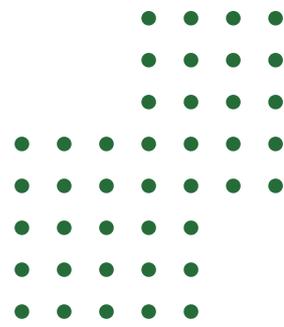
Strategi 6 : Melaksanakan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi sesuai wewenang Ditjen PSP

Sumber : Buku Rencana Strategis Ditjen PSP 2020 - 2024



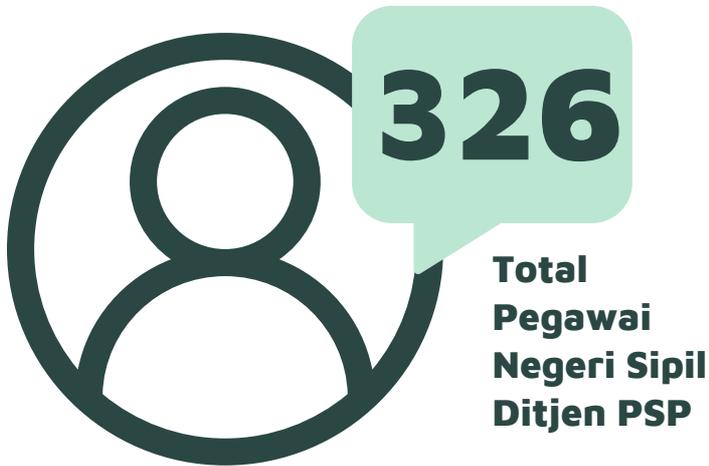
Struktur

Organisasi

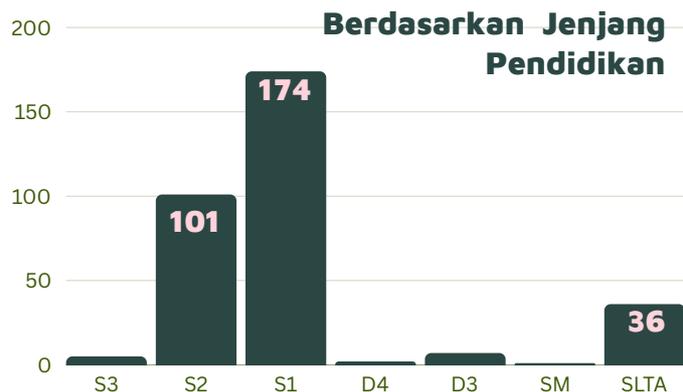
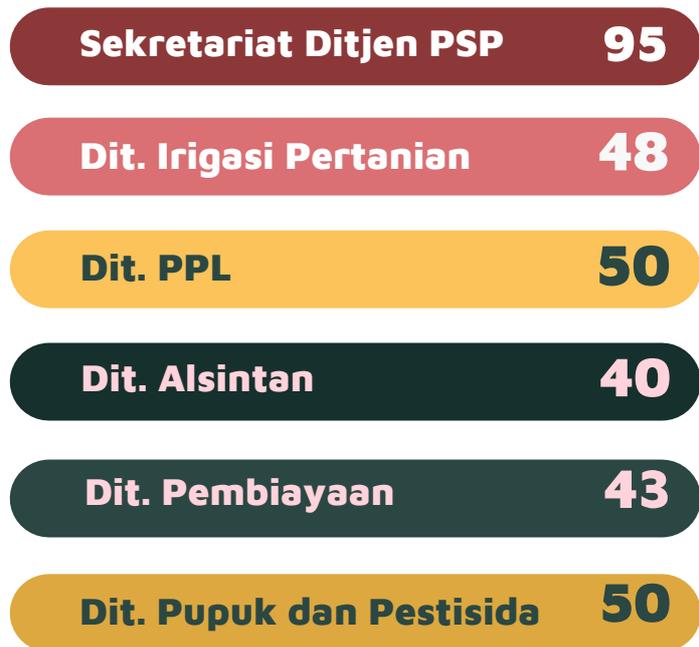


Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen PSP

Komposisi jumlah pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.



Jumlah Pegawai per Direktorat



Bab 02

Dukungan Anggaran Prasarana dan Sarana Pertanian



Program Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang membawahinya dan memiliki anggaran sesuai dengan kebutuhan program maupun kegiatan yang dilaksanakannya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan Direktorat Jenderal dengan pagu anggaran terbesar kedua di lingkup Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2023

No.	Kode Nama Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi SP2D	
			(Rp)	(%)
1	DI812 BADAN KARANTINA PERTANIAN	1.054.036.202.000	1.046.387.809.315	99,27
2	DI801 SEKRETARIAT JENDERAL	1.339.017.899.000	1.325.807.623.103	99,01
3	DI810 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	1.114.893.522.000	1.101.296.308.274	98,78
4	DI808 DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	2.691.414.298.000	2.640.366.330.962	98,10
5	DI802 INSPEKTORAT JENDERAL	131.030.528.000	127.785.411.183	97,51
6	DI806 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.258.350.509.000	2.199.212.385.312	97,38
7	DI804 DITJEN HORTIKULTURA	907.157.955.000	882.455.520.310	97,28
8	DI809 BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	872.857.804.000	837.083.492.381	95,90
9	DI803 DITJEN TANAMAN PANGAN	3.409.242.955.000	3.224.389.009.145	94,58
10	DI805 DITJEN PERKEBUNAN	1.030.872.050.000	930.139.571.676	90,23
TOTAL		14.808.873.722.000	14.314.903.441.671	96,66

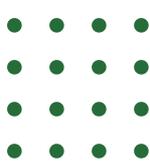
Sumber Data:

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Kementerian Negara/Lembaga untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 (SAKTI, Kementerian Keuangan)

Dukungan alokasi melalui dana APBN pada Tahun Anggaran 2023 kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar **Rp. 2.691.414.298.000** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.640.366.330.962 (98,10%)**. Pada tahun anggaran ini, DIPA Ditjen PSP telah mengalami 11 (sebelas) revisi DIPA menyesuaikan dengan tujuan organisasi Kementerian Pertanian.

Dukungan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan yaitu dana pusat, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan. Dana Pusat adalah dana yang digunakan oleh Satuan Kerja Pusat yang berisi program yang dilaksanakan langsung oleh pusat (baik kegiatan bantuan pemerintah maupun prioritas nasional) dan dukungan manajemen pusat. Dana Dekonsentrasi adalah dana APBN Kementerian Pertanian yang dilimpahkan wewenangnya kepada gubernur untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dan kegiatannya bersifat non-fisik. Selain itu, Dana Tugas Pembantuan adalah dana APBN Kementerian Pertanian yang dilimpahkan wewenangnya kepada daerah dan/atau desa untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur/Bupati/Walikota selaku wakil Pemerintah Pusat dan kegiatannya bersifat fisik.

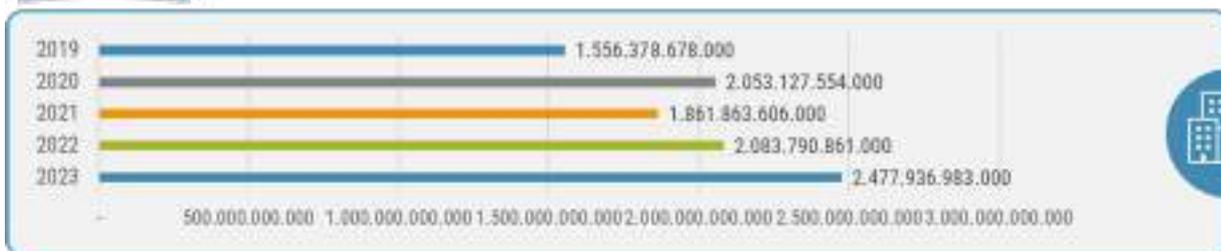




Dukungan alokasi melalui dana APBN pada Tahun Anggaran 2023 kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 2.691.414.298.000. Dari pagu tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kewenangannya, yakni Dana Pusat sebesar Rp. 2.477.936.983.000, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 23.154.641.000, dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 190.322.674.000. Rincian pagu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada gambar berikut.

Perkembangan Pagu Anggaran Ditjen PSP TA 2019 - 2023

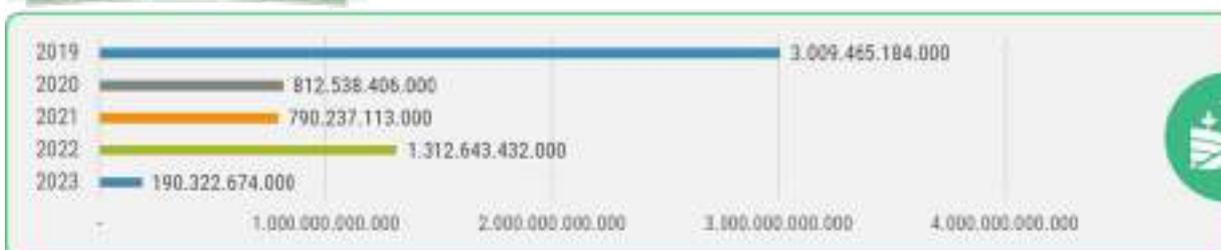
Dana Pusat



Dana Dekonsentrasi



Dana Tugas Pembantuan



Sumber Data : OM SPAN, Kementerian Keuangan, 2019 - 2023



Dukungan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 melalui dana APBN dioptimalkan oleh kinerja masing-masing direktorat yang berada di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Ditjen PSP TA 2023

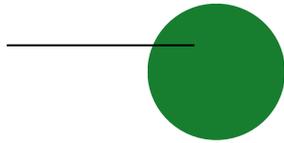
No	Nama Kegiatan/Output	Ragu		Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	388.992.411.000	380.800.994.628	98,18
2	1794AEA Koordinasi	18.447.870.000	18.113.430.888	98,19
3	1794BDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	150.000.000.000	144.334.454.973	96,22
4	1794PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.069.920.000	1.069.920.000	99,91
5	1794RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	110.374.623.000	109.892.198.964	99,56
6	1794RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	77.100.000.000	77.100.000.000	100,00
7	1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	291.888.901.000	272.231.428.861	93,34
8	1795AEA Koordinasi	18.590.775.000	18.276.461.701	98,36
9	1795PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	22.900.000.000	22.104.678.964	96,53
10	1795RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	201.933.126.000	200.055.569.462	99,07
11	1795RBD Prasarana Pengembangan Kawasan	48.255.000.000	31.794.796.714	65,89
12	1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	796.867.143.000	795.449.399.167	99,80
13	1796AEA Koordinasi	21.909.755.000	21.536.385.875	98,30
14	1796RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	684.957.388.000	683.913.012.292	99,85
15	1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	177.018.981.000	171.506.593.800	96,89
16	1797EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	70.217.737.000	66.980.216.995	95,59
17	1797EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.550.709.000	4.485.197.770	98,56
18	1797EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	102.250.535.000	100.111.179.043	97,91
19	3993 Fasilitas Pupuk dan Pestisida	1.058.841.007.000	1.041.146.196.615	98,33
20	3993AEA Koordinasi	22.731.449.000	20.393.103.649	89,71
21	3993BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	15.113.759.000	14.949.566.452	98,91
22	3993RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.020.995.879.000	1.005.803.526.214	98,51
23	3994 Fasilitas Pembiayaan Pertanian	100.035.773.000	98.523.720.886	98,50
24	3994AEA Koordinasi	19.817.464.000	19.706.067.166	99,44
25	3994BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	7.720.000.000	7.690.785.997	99,62
26	3994RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	72.488.309.000	72.126.867.723	99,50
TOTALDITJEN PSP		2.491.414.298.000	2.440.366.330.962	98,10



Bab 03

Direktorat Irigasi Pertanian





Kinerja Anggaran

Upaya menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan harus dilakukan melalui strategi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi pertanian (infrastruktur irigasi) ditingkat usaha tani secara terintegrasi dengan sumber air dari jaringan primer dan sekunder.

Program pengembangan irigasi pertanian melalui kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi berupa kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan Pemberdayaan P3A, Pengembangan Sumber Air berupa kegiatan irigasi perpipaan/perpompaan air tanah dangkal/dalam, dan Pengembangan Embung Pertanian berupa kegiatan embung/dam parit/longstorage merupakan kegiatankegiatan yang berupaya menyempurnaan pengelolaan air irigasi yang adaptif lingkungan fisik dan non fisik.

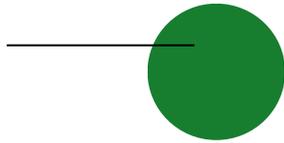
Kegiatan aspek Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian TA. 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 356.992.413.000 dengan dengan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 350.508.994.625 (98,18%), yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur Irigasi Pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan dana pusat serta dukungan manajemen aspek Irigasi Pertanian.

Realisasi Keuangan Kegiatan Irigasi Pertanian Tahun 2023



KEMERKATAN/KELOMPOK/OUTPUT/VAU OUTPUT		RPBB (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1704	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	356.992.413.000	350.508.994.625	98,18
1704.AEA	Koordinasi	16.447.870.000	16.102.430.688	98,18
1704.AEA.001	Bentuk Monitoring dan Evaluasi Irigasi Untuk Pertanian	16.447.870.000	16.102.430.688	98,18
1704.B00	Facilitasi dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	150.000.000.000	144.334.454.073	96,22
1704.B00.001	Facilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Tepat adu di Daerah Tertinggal	150.000.000.000	144.334.454.073	96,22
1704.B00.001	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	160.374.625.000	155.932.904.944	97,56
1704.B00.001.001	Irigasi Perpipaan	126.400.000	123.829.000	98,13
1704.B00.001.002	Embung Pertanian	50.866.000.000	50.571.894.319	99,43
1704.B00.001.003	Bangunan Konservasi Air dan Antipadi Anomali Iklim (Pompa Hidram)	56.300.000.000	56.342.517.625	99,73
1704.B00.002	Irigasi Perpipaan Besar Wilayah Timur	200.000.000	200.000.000	100,00
1704.B00.002.001	Irigasi Perpipaan Merentang Wilayah Timur	100.000.000	100.000.000	100,00
1704.B00.002.002	Irigasi Perpipaan Besar Wilayah Tengah	100.000.000	100.000.000	100,00
1704.B00.003	Irigasi Perpipaan Merentang Wilayah Tengah	100.000.000	100.000.000	100,00
1704.B00.003.001	Irigasi Perpipaan Merentang Wilayah Tengah	100.000.000	100.000.000	100,00
1704.B00.004	Irigasi Perpipaan Merentang Wilayah Barat	100.000.000	100.000.000	100,00
1704.B00.004.001	Irigasi Perpipaan Merentang Wilayah Barat	100.000.000	100.000.000	100,00
1704.B00.005	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.100.000.000	17.100.000.000	100,00
1704.B00.005.001	Jaringan Irigasi Tersier	17.100.000.000	17.100.000.000	100,00
1704.P00	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.068.500.000	1.068.500.000	99,91
1704.P00.001	Survei, Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	1.068.500.000	1.068.500.000	99,91

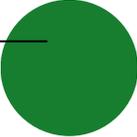




Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian pada tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut.

- Kegiatan UPLAND terlaksana di 13 Kabupaten yaitu Banjarnegara, Garut, Gorontalo, Lebak, Lombok Timur, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep, dan Tasikmalaya. Realisasi penambahan luas areal tanam sampai akhir Desember tahun 2023 seluas **2,086 ha (92,6%)** menurut tabulasi data dari target **2,254 ha**.
- Kegiatan Irigasi Perpipaian mengalami *refocussing* anggaran sehingga hanya terlaksana kegiatan persiapan.
- Kegiatan Embung Pertanian sebanyak 503 unit (100%) di 17 provinsi dan 84 kabupaten/kota.
- Terlaksananya kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim dengan target 459 unit dan realisasi 443 unit (96,51%). Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu:
 - Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim dengan target 172 unit dan realisasi 151 unit (87,79%).
 - Irigasi Perpompaaan/Perpipaan dengan dengan target 160 unit dan realisasi 160 unit (100%).
 - Gerakan Nasional (Gernas) El Nino dengan target 127 unit dan realisasi 132 unit (103,94%). Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu:
 - Irigasi Air Tanah Dalam sebanyak 30 unit di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota.
 - Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 14 unit di 7 provinsi dan 13 kabupaten/kota.
 - Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas) sebanyak 88 unit di 9 provinsi dan 39 kabupaten/kota.
- Kegiatan Irigasi Perpompaaan dengan target 110 unit, namun mengalami *refocussing* anggaran sehingga hanya terealisasi secara fisik sebanyak 7 unit. Kegiatan ini terdiri atas Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Timur 1 unit, Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Timur 1 unit, dan Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Tengah 5 unit.
- Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebanyak 1.028 unit di 24 provinsi dan 178 kabupaten/kota.
- Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Irigasi Pertanian terlaksana di 3 lokasi di 3 provinsi yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
- Terdapat 2 (dua) rekomendasi dampak perubahan iklim yang diberikan di tahun 2023 yaitu:
 - Adaptasi menyikapi awal musim kemarau yang terjadi pada bulan April - Juni 2023.
 - Adaptasi menyikapi awal musim hujan yang terjadi pada bulan September - November 2023.





Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Pada TA 2023, rencana kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan proyek UPLAND baik PMU (Pusat) maupun PIU (Kabupaten) sebesar **Rp. 350.000.000.000**. Total alokasi pagu tersebut bersumber dari dana pinjaman IFAD sebesar **Rp. 188.693.582.000** dan dari dana IsDB sebesar **Rp. 161.306.418.000**.

Alokasi dana sebesar **Rp. 350.000.000.000** tersebut dialokasikan melalui DIPA pada Kementerian Pertanian (TP) sebesar **Rp. 150.000.000.000** dan DIPA HPD pada Kementerian Keuangan mekanisme *On Granting* sebesar **Rp. 200.000.000.000**. Alokasi Dana UPLAND untuk TA 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Alokasi Dana UPLAND TA 2023

No	Kabupaten/Kota	Dana Hibah	Dana TP Pusat & Daerah	TOTAL
1	Banjarnegara	19.569.583.000	6.707.920.000	26.277.503.000
2	Garut	16.652.950.000	3.932.240.000	20.585.190.000
3	Gorontalo	3.335.750.000	3.943.650.000	7.279.400.000
4	Lebak	16.771.006.000	4.707.950.000	21.478.956.000
5	Lombok Timur	21.074.800.000	4.796.250.000	25.871.050.000
6	Magelang	18.497.000.000	7.077.530.000	25.574.530.000
7	Malang	12.208.500.000	4.192.880.000	16.401.380.000
8	Minahasa Selatan	20.797.176.000	4.729.800.000	25.526.976.000
9	Purbalingga	6.254.000.000	5.387.360.000	11.641.360.000
10	Subang	18.603.300.000	6.574.710.000	25.178.010.000
11	Sumbawa	26.180.100.000	6.323.300.000	32.503.400.000
12	Sumenep	13.213.835.000	5.257.040.000	18.470.875.000
13	Tasikmalaya	6.842.000.000	4.655.010.000	11.497.010.000
14	PMU		80.507.700.000	80.507.700.000
15	Provinsi		1.206.660.000	1.206.660.000
	Jumlah	200.000.000.000	150.000.000.000	350.000.000.000



Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan (TP)

Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Alokasi dana yang dialokasikan melalui DIPA pada Kementerian Pertanian (TP) sebesar Rp. 150.000.000.000 dengan realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2023 sebesar Rp. 144.543.312.087 atau 96,36%. Realisasi tersebut merupakan gabungan dari realisasi untuk IFAD senilai Rp. 97.664.682.722 dan realisasi IsDB Rp. 46.878.629.365. Adapun rincian realisasi dari masing-masing unit pelaksana yaitu sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan (TP) UPLAND TA 2023

Komponen	IFAD		IsDB		TOTAL	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
I Comp. I Productivity Enhancement & Resilience Building	17.892.740.000	12.715.132.900			17.892.740.000	12.715.132.900
I1 Land and Infrastructure Development						
I2 Production and Farm Management	17.892.740.000	12.715.132.900			17.892.740.000	12.715.132.900
II Comp. II Agricultural and Fisheries Rehabilitation	12.894.000.000	8.077.864.994			12.894.000.000	8.077.864.994
II1 Farmer Institutional Development	2.695.600.000	1.439.760.000			2.695.600.000	1.439.760.000
II2 Market Infrastructure & Equipment						
II3 Strengthening Market Linkage & Alliances	9.797.400.000	4.038.888.994			9.797.400.000	4.038.888.994
II4 Access to Financial Services						
III Comp. III Strengthening Institutional Delivery Systems	11.990.000.000	6.400.120.775	14.049.000.000	10.194.962.900	26.039.000.000	16.595.083.675
III1 Capacity building and institutional development of MOA	11.990.000.000	6.400.120.775			11.990.000.000	6.400.120.775
III2 Adaptive Research			14.049.000.000	10.204.962.900	14.049.000.000	10.204.962.900
IV Comp. IV Project Management Support	66.302.300.000	46.798.117.288	15.930.000.000	12.333.832.854	82.232.300.000	59.131.950.142
IV1 Technical Assistance	3.335.000.000	3.361.250.000	25.930.000.000	22.333.832.854	29.265.000.000	25.695.082.854
IV2 Project Management and Implementation Units	54.967.300.000	42.436.867.288			54.967.300.000	42.436.867.288
TOTAL	150.000.000.000	144.543.312.087	15.930.000.000	12.333.832.854	165.930.000.000	156.930.145.142

Realisasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) UPLAND TA 2023

No	Kabupaten/Kota	Demonstrasi Penerapan Teknologi Pertanian	Sertifikasi Padi Organik	Sekolah Lapang	Pelatihan Penguatan Korporasi Petani	Studi Banding ke Pusat Bisnis Komoditas	Peningkatan Kapasitas Staff Pemerintah
1	Banjarnegara				✓		✓
2	Garut	✓					
3	Garontalo			✓	✓		✓
4	Lebak				✓		
5	Lombok Timur	✓					
6	Magelang	✓	✓				✓
7	Malang	✓					
8	Minahasa Selatan	✓					
9	Purbalingga			✓	✓		✓
10	Subang				✓		
11	Sumbawa	✓				✓	
12	Sumenep	✓					✓
13	Tasikmalaya				✓		

Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Realisasi Anggaran *On Granting*

Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Alokasi Anggaran *On Granting* TA 2023 sebesar Rp. 200.000.000.000 untuk 13 kabupaten, mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 160.941.819.393 (80,47%) yang merupakan gabungan dari realisasi anggaran IFAD sebesar Rp. 75.338.771.228 (84,94%) dan realisasi anggaran IsDB sebesar Rp. 85.603.048.165 (88,13 %).

Realisasi Anggaran *On Granting* UPLAND TA 2023

No	Kabupaten	IFAD		ISDB		TOTAL		
		Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	Banjarnegara	7.278.149.000	6.423.388.082	12.281.434.000	10.634.759.000	19.559.583.000	17.058.147.082	87,17
2	Garut	4.520.000.000	4.514.226.500	12.132.950.000	10.544.986.500	16.652.950.000	15.059.213.000	90,43
3	Gorontalo	2.580.750.000	2.141.056.250	775.000.000	308.800.000	3.355.750.000	2.449.856.250	73,44
4	Lebak	7.119.249.000	5.331.567.800	9.651.757.000	8.181.089.420	16.771.006.000	13.492.657.220	80,45
5	Lombok Timur	15.750.000.000	9.302.854.000	5.324.800.000	4.228.475.000	21.074.800.000	13.591.329.000	64,48
6	Magelang	5.670.000.000	4.880.443.463	12.827.000.000	10.076.492.000	18.497.000.000	14.956.935.463	80,86
7	Malang	6.397.000.000	6.228.240.900	5.681.500.000	4.637.851.600	12.078.500.000	10.866.092.500	89,00
8	Minsel	11.040.000.000	11.957.654.000	9.757.176.000	7.300.652.022	20.797.176.000	19.258.306.022	92,60
9	Purbalingga	1.056.000.000	1.050.854.240	5.198.000.000	5.009.729.244	6.254.000.000	6.060.583.484	96,91
10	Subang	4.325.000.000	3.442.250.000	14.378.300.000	10.313.060.000	18.603.300.000	13.755.310.000	73,94
11	Sumbawa	10.489.100.000	8.637.570.300	15.721.000.000	8.184.936.029	26.180.100.000	18.822.506.329	71,90
12	Sumenep	10.444.529.000	8.260.466.674	2.789.306.000	1.746.287.000	13.233.835.000	11.006.753.674	83,30
13	Tasikmalaya	2.173.806.000	1.108.100.000	4.668.195.000	3.455.920.350	6.842.000.000	4.564.020.350	66,71
TOTAL		88.693.582.000	75.338.771.228	111.306.418.000	85.603.048.165	200.000.000.000	160.941.819.393	80,47

Proses pengajuan reimbursement telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, semua dokumen permintaan pengajuan *reimbursement* yang disampaikan oleh kabupaten, setelah diverifikasi oleh PMU dan telah dinyatakan lengkap dan benar, dokumen tersebut kemudian disampaikan ke DJPK (Kemenkeu) dengan disertai surat pertimbangan penyaluran dari PMU. Dari total realisasi prefinancing di daerah Rp. 160.941.819.393, realisasi *reimbursement* yang telah dibayarkan kembali sebanyak Rp Rp. 138.605.252.907.



Realisasi Areal dan Petani Pemanfaat Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Realisasi penambahan luas areal tanam sampai akhir Desember tahun 2023 seluas **2,086 ha (92,6%)** menurut tabulasi data dari **target 2,254 ha**. Realisasi sasaran, komoditas, petani sesuai dengan desain proyek masing-masing kabupaten. Keanggotaan kelompok tani berdasarkan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) tahun 2023. Petani yang dipilih berdasarkan domisili tanah tersebar di daerah sasaran. Untuk lokasi pengembangan ternak kambing/domba, pengembangan difokuskan pada wilayah pengembangan ternak dan sumber pakan yang tersedia.

Para petani dan peternak yang dipilih dalam kegiatan UPLAND sebagian besar adalah petani kecil dan sejumlah kecil petani adat/pribumi yang tergabung dalam kelompok tani, peternak dan kelompok tani gabungan dengan melibatkan petani perempuan, petani muda. Proses seleksi melibatkan penyuluh pertanian lapangan dan fasilitator desa dengan mengidentifikasi sesuai kriteria dan kemudian diusulkan.

Realisasi Areal dan Petani Pemanfaat TA 2023

No	Kabupaten	Komoditas	Lokasi				Jumlah Areal dan Keanggotaan				
			Jml. Kec.	Jml. Desa	Jml. Kel.	Jml. Petani	Penambahan Luas Areal (ha)	Laki-Laki	Perempuan	Usia ≤ 39th	Usia > 39th
1	Banjarnegara	kopi, domba, kambing	4	23	33	1,095	70	858	237	388	777
2	Garut	kentang	2	4	4	870	27	630	240	303	567
3	Gorontalo	pisang gape	2	2	2	104	20	75	29	26	78
4	Lebak	manggis	3	9	20	979	332	660	319	297	682
5	Lombok Timur	bawang putih	3	9	71	2,668	200	2,433	235	708	1,96
6	Magelang	padi organik	5	33	100	4,525	700	3,781	744	484	4,061
7	Malang	bawang merah	2	3	16	1,089	81	879	210	250	839
8	Minahasa Selatan	kentang	1	7	15	143	170	78	65	55	88
9	Purbalingga	kambing	2	22	60	2,609	160	2,021	588	486	2,123
10	Subang	manggis	8	18	25	867	0	675	192	155	712
11	Sumbawa	bawang merah	13	30	69	969	206	671	298	293	676
12	Sumenep	bawang merah	2	10	43	822	120	436	386	283	539
13	Tasikmalaya	padi organik	1	4	8	2,161	0	1,429	732	200	1,901
TOTAL			48	174	466	18,901	2,086	14,626	4,275	3,838	15,063



Realisasi Kegiatan Periode 2021-2023

Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND)

Pada kegiatan UPLAND yang memiliki kegiatan fisik dan pendampingan di pusat maupun daerah, dikelompokkan dalam subkomponen tersedia sebagai berikut.

Realisasi Subkomponen Kegiatan UPLAND Periode Tahun 2021-2023

Jenis Kegiatan	unit	Total Target	2021		2022		2023		Total	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.1 Pengembangan Lahan dan Infrastruktur Irigasi										
1. Jalan Usaha Tani	Km	371,79	86,9	101,72	118	123,11	87,77	88,79	292,67	313,62
2. Lahan Terasering	Ha	801	276	264,9	231,5	206,9	356,5	357	864	818,9
3. Bak Retensi	Ha	200	0	0	106	100	100	100	200	200
4. Penampungan Air	unit	138	41	47	63	60	21	17	125	124
5. Sistem Irigasi	Ha	2.560	691	650	1.345	115	810	604	2.650	2.604
6. Saluran Irigasi	unit	1.022	0	0	1.051	515	7	7	1.058	523
7. Pumping/pipe	unit	629	193	121	143	125	165	155	421	402
8. Pumping & pipe	Ha	351	124	54	171	131	117	117	412	302
9. Saluran Irigasi	Km	289,76	81,8	78,44	69,1	55,89	67,44	59,98	217,34	194,3
1.2 Produksi dan Pengelolaan Pertanian										
Bibit, Pupuk dan Pestisida	Ha	8.416	3.787	1.771	3.883	3.245	2.258	2.080	9.926	7.006
Benih Pengembangan Ternak	ekor	4.675	1.479	37	2.711	2.711	495	495	4.685	3.243
UPPD Biogas							37	36	37	36
2.1 Pengembangan Kelembagaan Petani										
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan/Korporasi	unit	36	13	36	36	0	1		37	37
Pelatihan Korporasi Petani	orang	180	390	0	180	161	180	120	390	381
2.2 Dukungan Infrastruktur Pasca Panen										
Alatiran Pasca Panen	unit	11.683	26.517	1.208	8.729	8.545	4.222	3.197	36.468	1555
Bangunan Gedung/Gudang	unit	247	25	5	86	80	50	42	161	127
Alatiran Pasca Panen *)	unit	427	117	85	149	134	145	109	411	329
Alat Transportasi Pertanian	unit	397	85	10	110	104	72	55	247	169
Sertifikasi	Ha	2,5	0	0	2,5	1.455	672,29	505,29	2,5	1.960,29
2.3. Penguatan Jaringan Pemasaran dan Kemitraan										
Kemitraan	paket	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Rencana Bisnis	unit	36	13	13	36	36	0	36	36	36
2.4. Akses terhadap Layanan Keu. Penguatan Jaringan Pemasaran dan Kemitraanangn Mikro										
Pembiayaan Keuangan Mikro	orang	19.523	5.550	0	4.223	0	4.288	0	14.042	29
3.1. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan di Pusat dan Kabupaten										
Pelatihan staf pemerintah	orang	200	50	50	61	61			111	111
3.2. Kolaborasi dengan Penelitian										
Riset Adaptif	pack	19	0	0	16	15	3	0	19	15
4.1. Pengadaan Jasa Konsultasi										
Dukungan Konsultan	orang	623	501	501	623	623	623	623	623	623
Manager Fases	orang	36	12	12	12	12	12	12	36	36
Fases	orang	204	192	192	192	192	192	192	192	192
ODD	orang	26	26	26	26	26	26	26	26	26
4.2. Biaya Operasional PMU & PIU										
Travel expenses stationary	pack	36	12	12	12	12	12	12	36	36
Rent Car	unit	17	17	17	17	17	17	17	51	51



Embung Pertanian Geomembran

Geomembran untuk embung adalah bangunan penampung air yang dibuat di atas tanah dengan cekungan seperti danau atau kolam. Pada cekungan, material geomembran melapisi bangunan untuk menjadi lapisan yang bersifat kedap. Pelapis kedap ini bertujuan untuk mengganti material beton pada bangunan permanen. Pembangunan embung geomembran memiliki keuntungan yaitu:

- Tidak memerlukan material seperti pasir, semen, konstruksi besi, dan batu.
- Pengerjaan cepat dan mudah.
- Material HDPE (*High Density Polyethylene*) bersifat kuat, tahan terhadap kelembaban ekstrem dan bahan-bahan kimia, serta fleksibel.
- Pembangunan embung dengan geomembran bersifat praktis dan lebih ekonomis.

Lokasi embung ditempatkan dekat dengan lahan usaha tani, diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani. Lokasi tempat pengembangan embung status kepemilikannya harus jelas (tidak dalam sengketa). Lokasi tempat pengembangan dilengkapi surat pernyataan tidak ada ganti rugi lahan oleh kelompok penerima manfaat dan sebaiknya dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang.

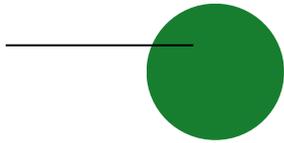
Target Embung Pertanian tahun 2023 sebanyak **503 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 47.860.000.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **17 Provinsi** dan **84 Kabupaten** dengan realisasi fisik sebanyak **503 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar **Rp. 47.629.350.400 (99,52%)**.

Realisasi Pengembangan Embung Pertanian Geomembran TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Embung Pertanian Geomembran



Adaptasi perubahan iklim melalui Pengembangan Embung Pertanian Geomembran

Kegiatan ini merupakan upaya konservasi air yang tepat guna, murah dan spesifik lokasi, serta dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air (water demand) pada tingkat usaha tani.

Jawa Timur



Desa Dradah Blumbang, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur

Lampung



Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu Provinsi Lampung

Jawa Barat



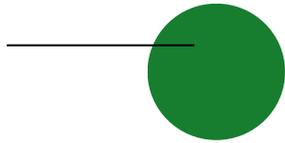
Kelompok Tani Wibawa Mukti IV, Kec. Kawali, Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat

DI Yogyakarta



Kelompok Tani Sri Rezeki, Kec. Nglipar, Kab. Gunungkidul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta





Bangunan

Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar **Rp.58.300.623.000** dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp. 57.704.994.625 (98,98%)**. Alokasi anggaran terdiri dari:

- Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi) sebesar Rp.17.200.000.000.
- Pendampingan operasional sebesar Rp.3.264.720.000.
- Koordinasi, sosialisasi dan pengawalan kegiatan lingkup irigasi pertanian sebesar Rp.6.800.000.000.
- Irigasi Perpipaian/Perpompaan sebesar Rp.16.000.000.000.
- Identifikasi pengembangan sumber air sebesar Rp.200.000.000.
- Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino yang terdiri Irigasi Tanah Dalam sebesar Rp.4.500.000.000, Irigasi Tanah Dangkal sebesar Rp.1.400.000.000, Bangunan Konservasi sebesar Rp.8.300.000.000, dan Pendampingan sebesar Rp.635.903.000.

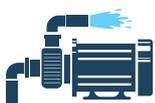
Kegiatan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim memiliki target 459 unit yang terdiri atas **172 unit kegiatan infrastruktur irigasi pertanian** dan **160 unit kegiatan irigasi perpompaaan/perpipaan**. Sampai dengan akhir Desember 2023, kegiatan ini tercapai **151 unit (87,79%) kegiatan infrastruktur irigasi pertanian** dan **160 unit (100%) kegiatan irigasi perpompaaan/perpipaan**. Kegiatan infrastruktur irigasi pertanian sejumlah 151 unit terdiri atas berbagai jenis kegiatan yaitu sebagai berikut.



Pembangunan Embung Pertanian
57 unit



Pengembangan Irigasi Perpipaian
3 unit



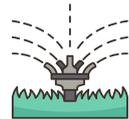
Pengembangan Irigasi Perpompaaan
36 unit



Pompa Apung
3 unit



Pengembangan Irigasi Air Tanah
26 unit



Pengembangan Irigasi Sprinkler
1 unit



Pembangunan Dam Parit
18 unit



Pembangunan Box Bagi
1 unit

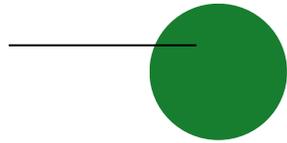


Normalisasi Saluran
5 unit



Rehabilitasi Embung Pertanian
1 unit





Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim



Potensi pemanfaatan lahan pertanian dengan memanfaatkan kegiatan bangunan konservasi dan antisipasi anomali iklim masih sangat besar

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian.

Sulawesi Tengah



Kelompok Tani Mandiri, Kab. Tojo Una Una, Prov. Sulawesi Tengah

Banten



Kelompok Tani Kedung, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Papua



Kelompok Tani Maju Jaya, Kab. Keerom, Prov. Papua

Sulawesi Barat



Kelompok Tani Mannannung, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat



Gerakan Nasional (Gernas)

Penanganan Dampak El Nino

Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino Tahun Anggaran 2023 mendapatkan pagu sebesar **Rp. 14.835.903.000** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp. 14.650.634.011 (98,75%)**. Gerakan Nasional (Gernas) El Nino dengan target **127 unit** dan realisasi **132 unit (103,94%)**. Kegiatan Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino berupa kegiatan infrastruktur irigasi pertanian yang meliputi:

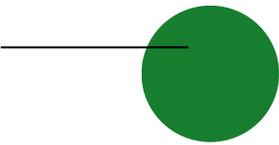
- o **Irigasi Air Tanah Dalam** sebanyak **30 unit** di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota. Irigasi Air Tanah Dalam (Konstruksi) yang dianggarkan sebesar Rp.4.500.000.000 dengan realisasi Rp. 4.365.000.000 (97.00%).
- o **Irigasi Air Tanah Dangkal** sebanyak **14 unit** di 7 provinsi dan 13 kabupaten/kota. Irigasi Air Tanah Dangkal (Konstruksi) yang dianggarkan sebesar Rp.1.400.000.000 dengan realisasi Rp. 1.400.000.000 (100%).
- o **Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas)** sebanyak **88 unit** di 9 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Gernas) ini terdiri dari irigasi perpompaan 41 unit, irigasi perpipaan 11 unit, Embung/Damparit/Longstorage 23 unit, dan irigasi air tanah 13 unit. Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim mendukung dampak El Nino dianggarkan sebesar Rp. 8.300.000.000 dengan realisasi sebesar 8.300.000.000 (100%).

Realisasi Kegiatan Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Irigasi Pertanian (Gernas El Nino)



Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi Gerakan Nasional (Gernas) El Nino untuk mengantisipasi kekeringan.

Gerakan ini memberikan berbagai bantuan kepada para petani berupa benih, pengairan dan pendampingan.

Jawa Timur



Kelompok Tani Maju III, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur

Banten



Kelompok Tani Randa Kaya, Kab. Lebak, Prov. Banten

Lampung



Kelompok Tani Jaya, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung

Sulawesi Selatan



Kelompok Tani Sipakainge, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan



Irigasi

Perpompaan

Pengembangan irigasi perpompaan merupakan kegiatan yang difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan sumber air sebagai suplesi air irigasi, penggunaan perpompaan sebagai satu sistem irigasi dengan jaringan distribusi tertutup maupun terbuka, serta mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (kebun HMT dan/atau untuk sanitasi dan minum ternak).

Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan melalui dana kewenangan Tugas Pembantuan (TP). Lokasi kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan dilakukan pada **3 provinsi**, yaitu **Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua Barat**. Alokasi kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan TA. 2023 sebanyak **7 unit** dengan total anggaran sebesar **Rp. 1.086.800.000** yang terdiri dari tahap konstruksi Rp. 689.300.000, tahap persiapan sebesar Rp. 369.500.000, kegiatan monitoring sebesar Rp. 28.000.000, dan kegiatan pendukung sebesar Rp. 397.500.000. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp. 1.038.756.800 (95,58%)** dan realisasi fisik mencapai **7 unit (100%)**.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan tidak mengalami kendala yang berarti namun permasalahan adanya *refocussing* anggaran menjadi alasan utama menurunnya alokasi kegiatan irigasi perpompaan pada tahun 2023.

Realisasi Pengembangan Irigasi Perpompaan TA 2023



Irigasi Perpompaan



Pengembangan irigasi perpompaan merupakan kegiatan yang difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan sumber air sebagai suplesi air irigasi.

Penggunaan perpompaan sebagai satu sistem irigasi dengan jaringan distribusi tertutup maupun terbuka, serta mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (kebun HMT dan/atau untuk sanitasi dan minum ternak).

Kalimantan Barat



Gapoktan Empening Mandiri, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat

Kalimantan Barat



Gapoktan Tumbuh Bersama, Kab. Singkawang Utara, Prov. Kalimantan Barat

Papua Barat



Kelompok Tani Patani Napirboy, Kab. Rajaampat, Prov. Papua Barat

Kalimantan Timur



Kelompok Tani Nrimo Ing Pandum, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur



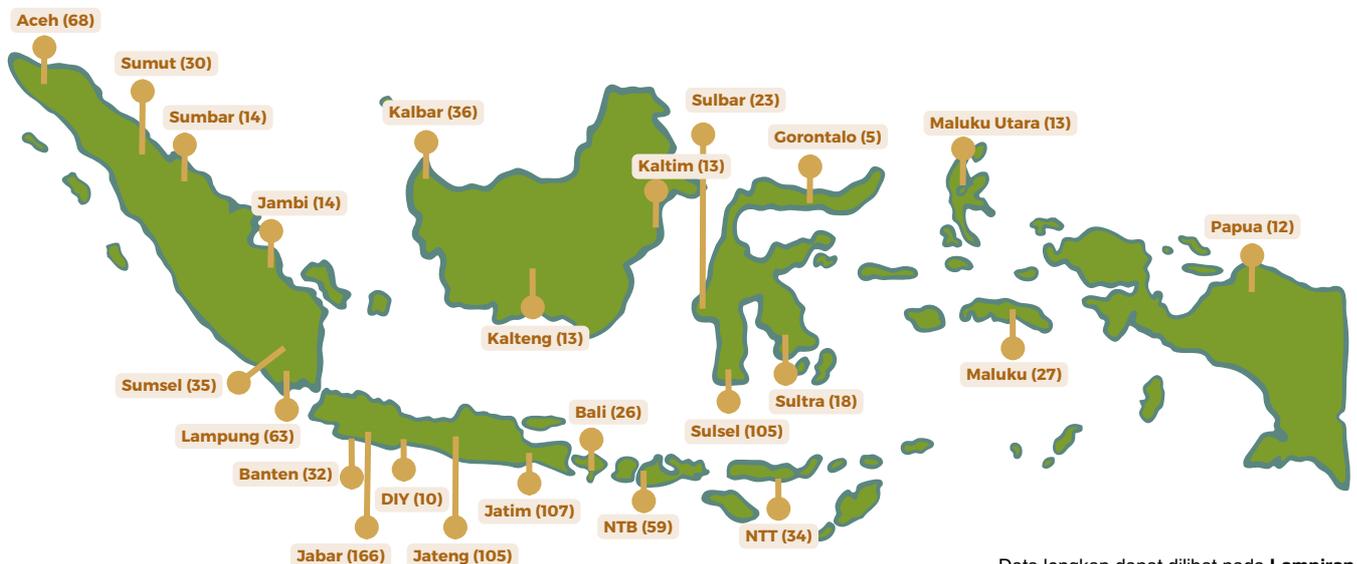
Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)

Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier dilaksanakan pada petak tersier (identik dengan tingkat usaha tani). Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Urusan Pengairan sesuai kewenangannya, serta jaringan irigasi desa. Disamping itu, selain lahan irigasi teknis dan irigasi desa lokasi kegiatan juga perlu diutamakan pada daerah yang sudah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebagai informasi, alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah lain yang sulit dihindari sehingga berakibat adanya penurunan luas sawah Indonesia.

Secara teknis di lapangan, kegiatan RJIT sangat bermanfaat untuk memperlancar distribusi aliran air irigasi dan mengurangi kehilangan air pada saluran irigasi tingkat usaha tani. Adanya kerusakan pada saluran irigasi, berdampak terhadap upaya pemenuhan air irigasi yang terhambat.

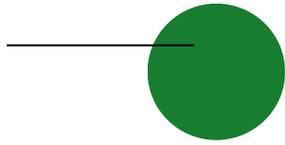
Kegiatan RJIT TA 2023 di realokasi kepada daerah - daerah yang siap untuk melaksanakan kegiatan serta dengan memprioritaskan usulan - daerah aspirasi. Lokasi kegiatan tersebar di **24 provinsi** dengan alokasi **1.028 unit** dan total anggaran tahun 2023 sebesar **Rp. 77.100.000.000**. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp. 77.100.000.000 (100%)**, sedangkan realisasi fisik mencapai **1.028 unit (100%)**.

Realisasi Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier



Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperbaiki/rehabilitasi maupun meningkatkan kondisi jaringan irigasi tersier baik pada lahan sawah irigasi teknis dan irigasi desa.

Selain itu, kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk perbaikan infrastruktur pendukung seperti bangunan pintu air dan boks pembagi baik pada lahan sawah irigasi teknis maupun irigasi desa.

Jawa Barat



Kelompok Tani Sumber Jaya V, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

Kalimantan Barat



Kelompok Tani Bina Tani 1, Desa Pentek, Kec. Sadaniang, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Barat



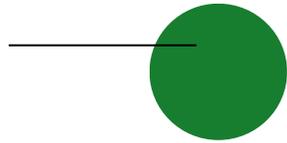
Kelompok Tani Satu Tujuan, Desa Bagik Polak, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Selatan



P3A Lassang Te'ne, Desa Bungungloe, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan





Survei Investigasi Desain (SID) Irigasi Pertanian

Pelaksanaan kegiatan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) Pengembangan Jaringan Irigasi dapat dilakukan melalui pola **swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL)**. Swakelola yang dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran dalam hal ini Dinas Pertanian (**swakelola mandiri**) maupun **jasa konsultan**.

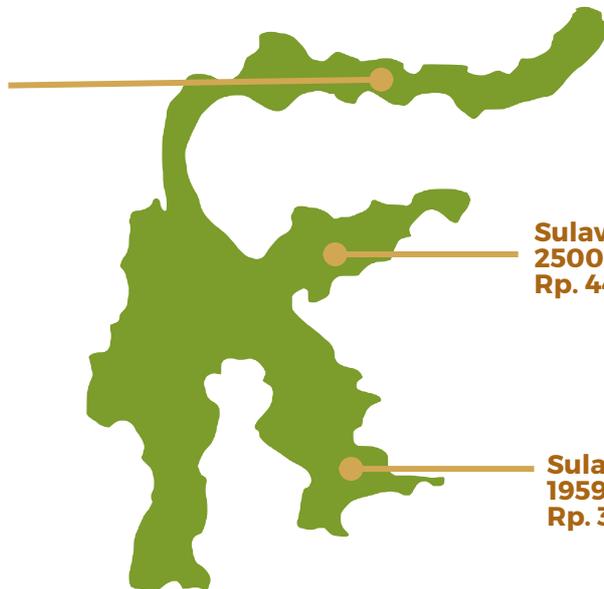
Sebagai tindak lanjut usulan calon lokasi yang berasal dari Kelompok Tani/Gapoktan/P3A dan/atau perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka Tim Teknis dari Dinas Pertanian Provinsi membuat daftar calon lokasi kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi untuk dilakukan survei dan investigasi. Daftar calon lokasi tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau yang ditunjuk oleh KPA Provinsi. Tahapan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Survei Investigasi Desain (SID) yaitu:

1. Inventarisasi Jaringan Irigasi;
2. Penelusuran Jaringan Irigasi; dan
3. Identifikasi dan Analisis Tingkat Kerusakan Jaringan Irigasi.

Lokasi kegiatan Survei Investigasi Desain Pengembangan Jaringan Irigasi tersebar di **3 Provinsi** (Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah) dengan target sebanyak **3 dokumen fisik** dari total anggaran sebesar **Rp. 1.069.920.000** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.068.920.000 (99,91%)**, sedangkan realisasi fisik mencapai **3 dokumen (100%)**.

Realisasi Kegiatan Survei Investigasi Desain (SID) Pengembangan Jaringan Irigasi Tahun 2023

Gorontalo
1510 Ha
Rp. 270.000.000

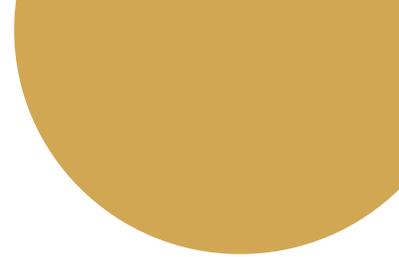
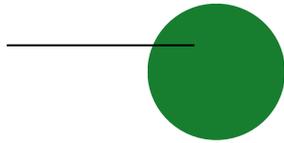


Sulawesi Tengah
2500 Ha
Rp. 449.000.000

Sulawesi Tenggara
1959 Ha
Rp. 349.920.000

Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





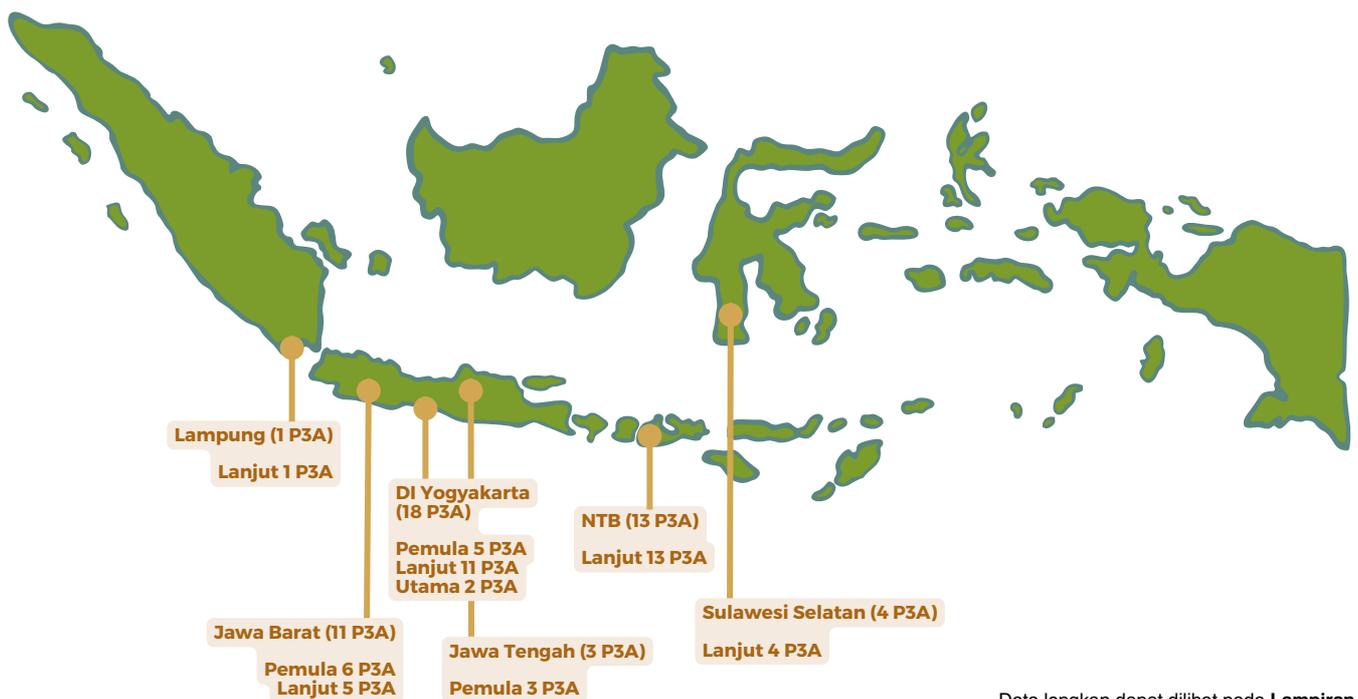
Kegiatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menajadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah/layanan petak tersier atau desa. Pembentukan P3A dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier. Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh Pemerintah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau pihak lain.

Kegiatan pembinaan kelembagaan P3A diawali dari identifikasi terkait profil kelembagaan dan penguatan kelembagaan melalui pembuatan legalitas. Kegiatan selanjutnya adalah pembinaan pelembagaan P3A yang mencakup Rencana Usulan Kegiatan Kelompok, Manajemen Organisasi, dan Teknis Irigasi.

Rekapitulasi Identifikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran



Rekomendasi

Dampak Perubahan Iklim

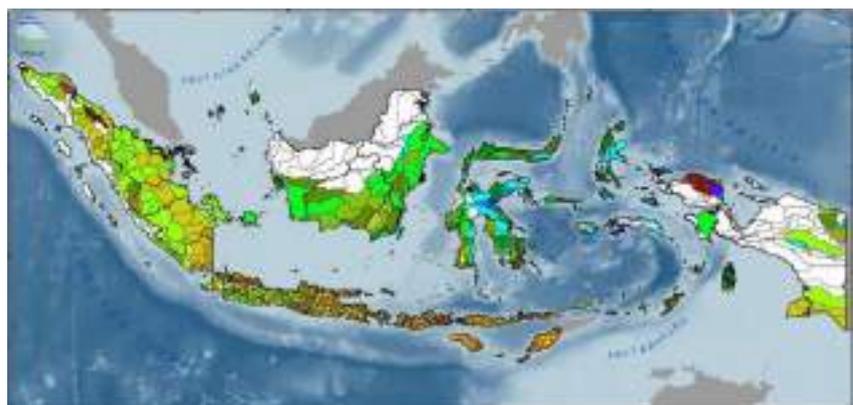
Rekomendasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian di Indonesia, diharapkan dapat mengamankan kestabilan produksi pangan terutama padi. Terdapat 2 (dua) rekomendasi dampak perubahan iklim yang diberikan di tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

Rekomendasi ke-1 **Adaptasi dalam menyikapi awal musim kemarau**

Awal musim kemarau (MK) terjadi pada bulan April – Juni 2023 sesuai dengan prakiraan Awal Musim Kemarau 2023 yang telah dirilis pada Maret 2023. Untuk mengantisipasi awal MK tersebut, perlu mempersiapkan sumber-sumber air alternatif dan pemilihan komoditas yang sesuai.

- Early warning system dan rutin pantau informasi BMKG. Melakukan penjadwalan musim tanam menyesuaikan karakteristik klimatologi wilayah.
- Pada wilayah yang mengalami awal musim kemarau pada Mei-Juli 2023 perlu ada persiapan pemanfaatan sumber-sumber air alternatif dan pemilihan komoditas yang sesuai.
- Pada wilayah yang diprediksi masih akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) perlu ada persiapan pemanfaatan sumber-sumber air alternatif. Pada wilayah yang tidak mengalami musim kemarau, berpeluang melakukan tanam lebih awal sekitar bulan September-Oktober 2023.
- Memanfaatkan teknologi pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi tersier/kuarter, gerakan panen air, teknologi hemat air, benih toleran kekeringan serta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Prakiraan Awal Musim Kemarau 2023 di Indonesia



Sumber Data: BMKG (April 2023)



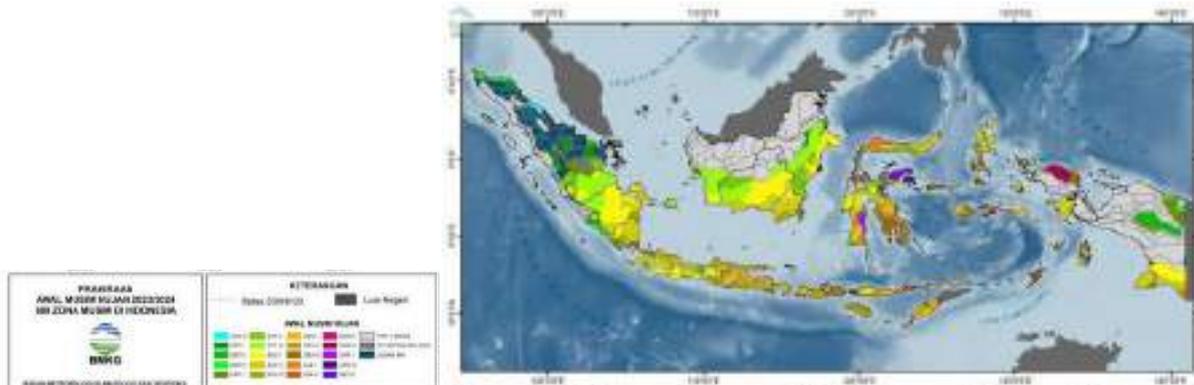
Rekomendasi ke-2

Adaptasi dalam menyikapi awal musim hujan

Awal Musim Hujan 2023 umumnya terjadi pada bulan September – November 2023. Kewaspadaan diperlukan terutama untuk daerah yang mengalami curah hujan lebih basah dari normalnya meliputi sebagian Pulau Sumatera, sebagian Pulau Jawa bagian timur, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Pulau Sulawesi bagian utara, sebagian Papua Barat, dan sebagian Papua bagian selatan. Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa awal musim hujan di Indonesia dimulai pada Bulan September 2023 dan diperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Bulan Desember sd Januari 2023. Dalam rangka menghadapi musim hujan danantisipasi terjadinya banjir/longsor, agar tidak mengganggu produksi pangan nasional, maka perlu segera dilakukan upaya-upaya antisipasi dan mitigasi sebagai berikut.

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir/longsor akibat perubahan iklim.
- Memetakan daerah rawan banjir melalui pemantauan kondisi iklim harian yang datanya bersumber dari BMKG).
- Melakukan percepatan tanam pada daerah yang rawan banjir di Bulan Januari – Februari 2023 dan sudah memasuki musim hujan, dengan mengerahkan brigade alsintan dan prasarana pendukung seperti traktor, pupuk, benih dan lainnya untuk mempercepat proses pengolahan tanah dan tanam.
- Melakukan normalisasi saluran dan pembangunan tanggul penahan air.
- Menggunakan benih varietas tahan genangan air,
- Mendorong petani untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi.

Prakiraan Awal Musim Hujan 2023/2024 di Indonesia



Sumber Data: BMKG (September 2023)



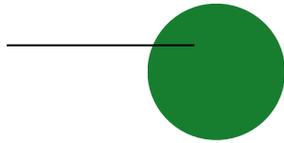
Bab 04

Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan



Direktur Jenderal PSP, Ali Jamil (kiri) sedang menyampaikan Model Optimalisasi Lahan Rawa untuk Meningkatkan Indeks Pertanian di Kab.Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri Pertanian, Amran Sulaiman (tengah) pada Selasa (14/11/23).





Kinerja

Anggaran

Kegiatan utama Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan pada TA. 2023 meliputi: (1) Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian; (2) Lahan Konservasi dan Rehabilitasi; (3) Data Lahan Pertanian; (4) Jalan Usaha Tani; (5) Lahan Pertanian Pangan Produktif; (6) Optimasi Lahan; dan (7) Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*).

Alokasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Tahun Anggaran (TA) 2023 pada awal DIPA TA 2023 sebesar Rp.705.677.350.000. Seiring adanya perubahan kebijakan pembangunan pertanian, alokasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan mengalami penyesuaian (refocussing) anggaran yaitu melalui revisi DIPA pertama dari anggaran semula Rp.705.677.350.000 menjadi Rp. 375.140.081.000. Pada revisi DIPA terakhir, alokasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan kembali mengalami penyesuaian menjadi Rp.291.668.901.000 dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan TA 2023



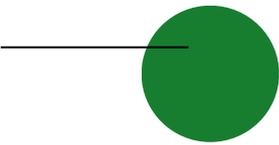
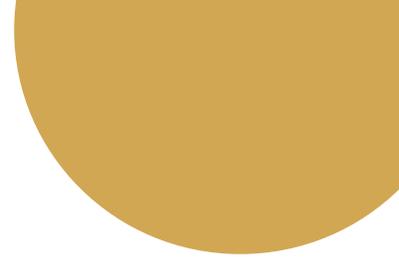
KEGIATAN/KELOMPOK/OUTPUT/SUB OUTPUT	PADU (Rp)	REALISASI	
		(Rp)	(%)
1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	291.668.901.000	272.231.426.861	93,34
1795.AEA Swadana	18.680.776.000	18.276.481.701	98,36
1795.AEA.001 Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	18.560.776.000	18.276.481.701	98,36
1795.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	22.900.000.000	22.104.670.984	96,52
1795.PBR.002 Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	22.900.000.000	22.104.670.984	96,52
1795.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	301.803.126.000	306.086.699.463	101,07
1795.RBK.001 Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	72.560.030.000	77.583.878.863	107,62
1795.RBK.003 Data Lahan Pertanian	34.173.194.000	33.830.002.448	99,00
1795.RBK.003 Jalan Usaha Tani	95.069.902.000	96.146.060.153	101,14
1795.RBC Prasarana Pengembangan Kawasan	48.355.000.000	41.796.716.794	86,46
1795.RBC.001 Lahan Pertanian Pangan Produktif	10.940.000.000	10.891.656.895	99,55
1795.RBC.003 Optimasi Lahan	10.230.000.000	11.882.201.695	116,24
1795.RBC.003 Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate)	27.185.000.000	29.022.858.204	106,77

Berdasarkan data OMSPAN, realisasi anggaran Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.272.231.426.861 (93,34%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 291.668.901.000. Sisa anggaran terutama dari kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*) di Provinsi NTT (Kabupaten Belu) dan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan) disebabkan kedua kabupaten ini tidak memenuhi kriteria teknis sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

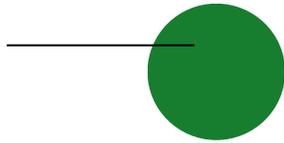


- Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dengan target 35 rekomendasi kebijakan dengan realisasi 36 rekomendasi kebijakan (102,86%). Kegiatan ini terdiri atas 31 rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan pada 31 kabupaten/kota atau 11 provinsi di Indonesia. Target 4 (empat) rekomendasi kebijakan dilaksanakan oleh satker pusat dengan realisasi 5 (lima) rekomendasi kebijakan yaitu:
 - Sinergi Kebijakan Perlindungan Lahan Nasional dan Adat (GIAHS Karangasem, Bali)
 - Sinergi Perlindungan Lahan Pertanian melalui Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
 - Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Model Sistem Identifikasi Indikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - Pembangunan Pertanian dalam Rencana Tata Ruang
- Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi memiliki target 44 unit dengan realisasi sebanyak 46 unit (104,55%). Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - *Smart Farm* dan Korporasi Pertanian terlaksana sebanyak 22 unit di 8 provinsi dan 22 kabupaten/kota.
 - *Smart Greenhouse* terlaksana sebanyak 25 unit di 7 provinsi dan 12 kabupaten/kota.
- Kegiatan Data Lahan Pertanian memiliki target 12 unit dengan realisasi 13 unit (108,33%). Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS) dengan Citra Satelit sebanyak 10 unit (dokumen peta) yang dilaksanakan di 10 provinsi yaitu Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
 - *Updating* Peta Lahan Sawah sebanyak 1 unit (dokumen peta) berupa perbandingan antara Luas Baku Sawah (LBS) 2019 dengan *Update* Luas Sawah 2023.
 - Data Geospasial Petak Lahan Sawah sebanyak 2 unit (dokumen peta) yang terdiri atas Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) dan Kabupaten Jember (Jawa Timur).
- Kegiatan Jalan Usaha Tani memiliki target sebanyak 928 unit dengan realisasi 928 unit (100%) di 25 provinsi dan 162 kabupaten/kota.
- Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Produktif memiliki target seluas 775 ha dengan realisasi 754 ha (97,29%) yang dilaksanakan di 5 provinsi. Kegiatan di Nusa Tenggara Barat hanya melakukan kegiatan persiapan. Kegiatan di Sulawesi Tengah (160 ha) dan Kep. Bangka Belitung (180 ha) terealisasi secara fisik 100%. Kegiatan di Sulawesi Selatan memiliki target seluas 285 ha dengan realisasi 268 ha (94,04%) dimana 17 ha tidak terlaksana di Kab. Bantaeng. Selain itu, kegiatan di Nusa Tenggara Timur memiliki target 150 ha dengan realisasi 146 ha (97,33%) dimana 4 ha tidak terlaksana di Kab. Flores Timur.



- 
- 
- Kegiatan Optimasi Lahan memiliki target 1.711 ha dengan realisasi 1.711 ha (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di 19 provinsi. Namun, terdapat 6 provinsi yang mengalami *refocussing* anggaran yaitu Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Barat sehingga hanya melakukan kegiatan persiapan saja. Kegiatan Optimasi Lahan terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - Optimasi Lahan Rawa memiliki target awal seluas 278 ha. Namun, kegiatan di provinsi Riau terjadi *refocussing* anggaran sehingga kegiatan ini hanya dilaksanakan di provinsi Aceh seluas 200 ha (100%).
 - Optimasi Lahan Kering memiliki target awal seluas 27.700 ha. Namun, terjadi *refocussing* anggaran pada 5 provinsi (Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung dan Sulawesi Barat) sehingga kegiatan ini memiliki target seluas 1.511 ha yang dilaksanakan 100% di 13 provinsi yaitu Aceh (75 ha), Sumatera Utara (225 ha), Sumatera Barat (150 ha), Jambi (75 ha), Lampung (100 ha), Jawa Barat (225 ha), Nusa Tenggara Barat (125 ha), Nusa Tenggara Timur (150 ha), Sulawesi Selatan (100 ha), Sulawesi Utara (50 ha), Gorontalo (100 ha), Papua Barat (50 ha), dan Papua (86 ha).
 - Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate) memiliki target seluas 5.210 ha di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Utara (100 ha), Kalimantan Tengah (4.210 ha), Nusa Tenggara Timur (600 ha), dan Papua (300 ha). Namun, kegiatan ini hanya terlaksana di 2 provinsi yaitu di provinsi Papua seluas 300 ha (100%) dan Kalimantan Tengah seluas 1.644 ha (39,05%). Kegiatan di Kalimantan Tengah tidak dapat dilanjutkan karena berdasarkan rewiu SID lokasi hanya mampu menyediakan area seluas 1.644 ha sehingga sesuai dengan SID kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan di Sumatera Utara tidak dapat dilanjutkan karena pembuatan *raiser* atau saluran pipa kurang efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan di lokasi tersebut telah tersedia saluran pipa di lahan petani. Kegiatan di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria teknis.





Rekomendasi Perlindungan LP2B

dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kegiatan utama Kelompok Perlindungan Lahan pada TA 2023 adalah Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B). Kegiatan tersebut dialokasikan di 31 Kabupaten pada 12 Provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.12.140.000.000. Sasaran kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B adalah terpetakannya luasan LP2B tingkat Kabupaten dan ditetapkan dalam SK/Perbup tentang penetapan LP2B dan/atau dalam perda RTRW.

Kegiatan RPLP2B TA 2023 telah dilaksanakan di 31 Kabupaten pada 12 Provinsi. Realisasi anggaran berdasarkan data Omspan per 31 Desember 2023 mencapai Rp.11.824.805.701 (97,40%). Capaian kegiatan RPLP2B TA 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

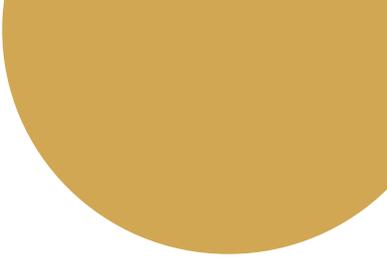
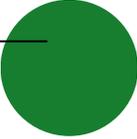
- Sebanyak 31 (tiga puluh satu) kabupaten telah menyelesaikan pendataan lapang dan menyusun peta.
- Sebanyak 28 (dua puluh delapan) kabupaten sudah penetapan LP2B sedangkan 3 (tiga) kabupaten telah mengusulkan penetapan LP2B kepada Bupati.

Realisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RPLP2B) TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Rekomendasi Tematik

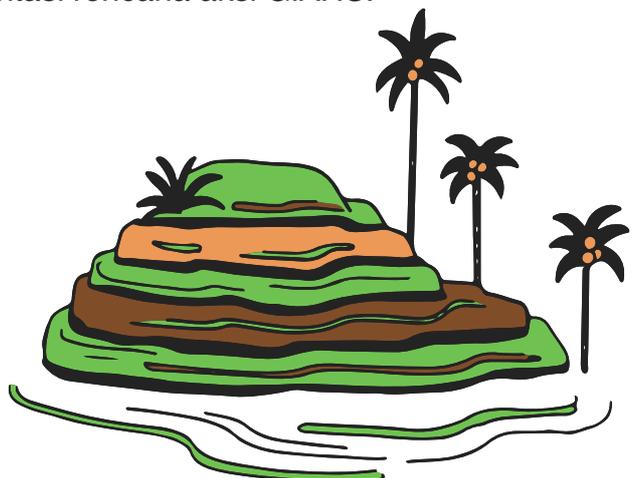
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Rekomendasi tematik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditujukan untuk memberikan bahan kebijakan bagi pimpinan pada tema-tema aktual yang terkait dengan perlindungan lahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dari kegiatan ini dihasilkan **5 (lima) rekomendasi tematik** yaitu sebagai berikut.



Sinergi Kebijakan Perlindungan Lahan Nasional dan Adat/GIAHS Karangasem

- Indonesia telah mengusulkan kepada FAO Proposal “*Salak Agroforestry System in Karangasem Bali*” untuk mendapatkan pengakuan *Globally Important Agriculture Heritage System*.
- Proses pengajuan, penyampaian koreksi, dan perbaikan proposal telah dilakukan oleh Indonesia. Pada tanggal 2-4 Februari 2024 akan ada kunjungan dari Tim SAG FAO untuk berdiskusi dan memberikan penilaian akhir pada situs GIAHS tersebut.
- Sistem adat dan budaya pertanian di Karangasem telah terbukti tangguh menghadapi dinamika dan perubahan alam, kebijakan, dan perkembangan jaman.
- Perlu didorong adanya penguatan regulasi di tingkat nasional dan daerah untuk melindungi dan memberikan jaminan keberlanjutan sistem yang ada.
- Masyarakat perlu untuk terus berkreasi dalam proses menjaga situs ini melalui penerapan aturan adat, dan menjalankan sistem-sistem yang berkelanjutan.
- Dukungan program dari K/L, Pemerintah Daerah dan para pihak lainnya diperlukan dalam rangka implementasi rencana aksi GIAHS.





Sinergi Perlindungan Lahan Pertanian melalui Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

- Diperlukan data dasar LBS yang telah “bersih” agar dalam proses verifikasi lahan sawah untuk diusulkan sebagai LSD dapat lebih akurat.
- Data dan analisis faktor pengurang perlu dibahas secara lebih detil di Tim Teknis yang didukung oleh evidence yang memadai.
- Konfirmasi dengan Pemerintah Daerah perlu dilakukan lebih intensif dan waktu yang cukup agar didapatkan hasil berupa kesepakatan atau berita acara yang dapat digunakan di tingkat pusat untuk integrasi data.
- Penggunaan penetapan LSD sebagai bahan untuk LP2B perlu dioperasionalkan di Pemerintah Daerah.
- Integrasi data LSD dan LP2B dalam tata ruang perlu dikawal secara baik agar seluruh muatan tersebut diakomodir dalam pengaturan ruang untuk pembangunan pertanian.



Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

- Perlunya penguatan untuk adanya komitmen pimpinan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam implementasi UU No.41/2009.
- Koordinasi dan kerja sama lebih intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri (sebagai kementerian pembina pemerintah daerah), khususnya pada aspek pembinaan dan monitoring kinerja perlindungan lahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
- Membangun *database* alih fungsi lahan pertanian yang diintegrasikan dalam sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- Perlu dilakukan pengumpulan data alih fungsi lahan secara periodik untuk memonitor aktifitas yang mengarah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, khususnya di wilayah sentra produksi pangan.
- Penguatan SDM dan kelembagaan di Pusat dan Daerah untuk penerapan UU No.41/2009.
- Melakukan *review* substansi dan pelaksanaan UU 41/2009 (telah masuk dalam Prolegtan 2024).





Model Sistem Identifikasi Indikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

- Pengembangan sistem pemantauan indikasi alih fungsi lahan pertanian yang dapat diakses secara *real time* atau *near real time* sangat strategis untuk dikembangkan pada situasi belum adanya data dan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang memadai.
- Teknologi penginderaan jauh untuk pemantauan penggunaan (pertanaman) di lahan sawah secara *multi-temporal* dapat di perluas pemanfaatannya dalam pengambilan kebijakan bidang pertanian, salah satunya untuk penggunaan pemantauan indikasi alih fungsi lahan.
- Berdasarkan Uji Model Analisis Citra (digabungkan dengan SISCrop) berbasis Machine learning di Kabupaten Karawang, dapat diketahui luas lahan sawah di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 adalah 100.380 hektar atau terjadi penurunan kurang lebih seluas 1.581 hektar dibandingkan dengan data LBS tahun 2019. Akurasi model mencapai 91,62%.
- Diperlukan pendataan indikasi alih fungsi lahan lanjutan pada wilayah yang khas pada aspek karakteristik lahan sawah, pola tanam, dan jenis alih fungsi/alih komoditas, sehingga sistem/model yang dibangun dapat akurat pada seluruh lahan yang diamati.



Pembangunan Pertanian dalam Rencana Tata Ruang

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memiliki data pertanian berbasis spasial sebagai bahan dalam pembahasan RTRW
- Perlu dikaji ulang terhadap penetapan rencana tata ruang nasional/provinsi yang menggunakan skala besar (general) menjadi acuan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. Skala kecil (detail). Hal ini bertentangan dengan kaidah kartografi yang seharusnya mempersiapkan data spasial dari detail sampai general.
- Adanya batasan minimal luas lahan pertanian KP2B/LP2B yang dapat tergambarkan dalam penyusunan pola ruang RTRW, memerlukan adanya penambahan klausul dalam RTRW Provinsi yaitu “Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan”.
- Perlu adanya penambahan agenda pembahasan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah secara khusus antara Kementan dengan Pemda sebelum dilakukan pembahasan lintas sektor agar dapat dilakukan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan pertanian Nasional dan Daerah.



Pengembangan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi

Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian sistem budidaya pertanian berkelanjutan, meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. Kegiatan utama di dalam kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan dan atau Rehabilitasi *Smart Green House* dan *Pilot Percontohan Pembangunan dan atau Rehabilitasi Agroeduwisata*.



Pembangunan dan atau Rehabilitasi *Smart Green House*

Smart Green House merupakan pertanian modern yang menjadi jawaban sektor pertanian yang harus dikembangkan untuk menghasilkan berbagai komoditas yang bernilai tinggi dan diterima pasar.

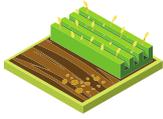
Nilai bantuan masing-masing penerima adalah 1.500.000.000 yang akan dipergunakan untuk pembangunan *Smart Green House* seluas kurang lebih 800 - 1000 meter persegi dengan teknologi otomatisasi pada seluruh aspek dalam bangunan dan pemberian media tanam sesuai dengan yang dibutuhkan. Diharapkan, estimasi penghasilan dapat menutupi biaya operasional serta mendapat keuntungan atas kegiatan tersebut.

Realisasi Kegiatan *Smart Green House* TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Pembangunan *Smart Farm* dan Korporasi Pertanian

Pembangunan pertanian ditujukan untuk mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Indikator kesejahteraan petani secara ekonomi adalah peningkatan pendapatan dan konsumsi (jumlah kualitas, dan keragaman). Salah satu upaya peningkatan pendapatan petani adalah peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian, baik lahan, air, modal, teknologi, manusia, dan sumberdaya lainnya. Optimalisasi sumberdaya pertanian dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efisiensi pemanfaatan dengan tetap menjamin keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya sehingga mampu mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan.

Pilot Percontohan Lahan Pertanian menjadikan kawasan agroeduwisata sebagai etalase untuk demonstrasi teknologi, inovasi manajemen usaha pertanian. Dengan demikian kawasan agroeduwisata dapat difungsikan sebagai bagian dari pendidikan non formal seperti tempat magang, pelatihan dan inkubasi bisnis serta destinasi wisata pertanian. Dukungan bantuan pemerintah diharapkan sebagai stimulan untuk pengembangan agroeduwisata sehingga dapat menjadikan salah satu pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menumbuhkan minat pada sektor pertanian, meningkatkan perekonomian. Dalam pengusulannya harus disertakan mekanisme kerjasama dengan pasar dan rencana hasil usaha yang dilaksanakan. Diharapkan bantuan stimulan ini dapat menumbuhkan kembangkan modal mandiri yang dikelola oleh kelompok-kelompok penerima.

Realisasi Kegiatan *Smart Farm* dan Korporasi Pertanian TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Pengembangan

Data Lahan Pertanian

Data Lahan Pertanian terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu Kegiatan Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS), Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah dan Kegiatan *Updating* Luas Baku Sawah.



Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS) dengan Citra Satelit

- Awalnya Kegiatan PGPS mendapatkan alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 5.531.304.000 dengan jumlah *output* 11 unit (dokumen peta). Bulan Mei dilakukan realokasi kegiatan PGPS di Provinsi Sumatera Barat mengingat provinsi tersebut telah selesai melakukan kegiatan PGPS di tahun 2022. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk memaksimalkan *output* kegiatan Data Lahan Pertanian berupa Data Geospasial Petak Lahan Sawah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sehingga alokasi anggaran menjadi Rp. 5.329.304.000 dengan jumlah *output* 10 unit (dokumen peta) yang dialokasikan sebagai Alokasi Dekonsentrasi.
- Realisasi anggaran kegiatan PGPS sebesar Rp. 5.267.821.107 atau 98,85% dari total alokasi pagu sebesar Rp. 5.329.304.000 dengan target seluas 46.002 hektar. Kekurangan realisasi ini terjadi karena Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa menyelesaikan 100% pekerjaan yang disebabkan pelaksana kegiatan tidak sanggup dikarenakan mengalami kendala teknis di lapangan seperti aksesibilitas lokasi di kepulauan, kondisi cuaca serta kondisi peralatan. Realisasi kegiatan PGPS di 10 provinsi yaitu sebagai berikut.

Realisasi Kegiatan Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah (PGPS) TA 2023

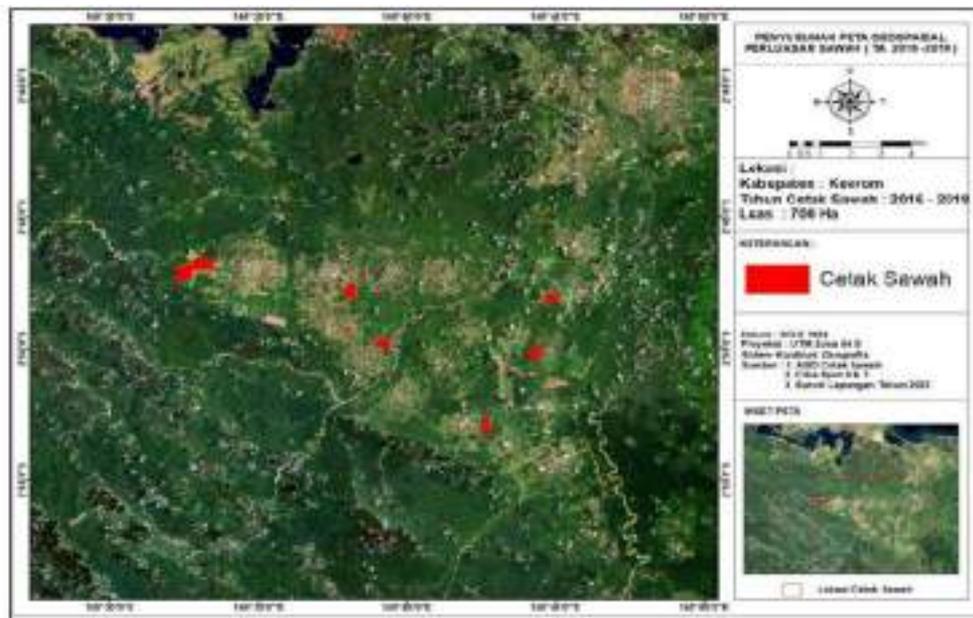


Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



- Progres pelaksanaan kegiatan Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah dengan Citra Satelit (PGPSCS) telah selesai sampai pembuatan peta digital lahan. Pembuatan peta digital lahan perluasan sawah dilakukan dengan metode interpretasi secara visual dengan melakukan digitisasi pada layar (*digitization on screen*) terhadap citra satelit warna asli (*true colour*). Interpreter mendelineasi lahan yang teridentifikasi sebagai lahan perluasan sawah yang dibiayai oleh APBN dalam kurun waktu TA. 2016-2019 dengan cara menarik garis/vektor sehingga menjadi poligon lahan perluasan sawah. Interpreter dapat menentukan lahan perluasan sawah berdasarkan kenampakan objek pada citra satelit, pengetahuan lokal, peta dasar, bentang alam wilayah yang diinterpretasi, atau informasi yang dikumpulkan seperti dokumen *as-built drawing*, dokumen survei investigasi dan desain atau data hasil koordinasi dengan dinas kabupaten maupun petani penerima manfaat.
- Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait data AOI (pelaksana kegiatan perluasan sawah). Data spasial *as-built drawing* belum tersedia untuk semua lokasi. Hal ini harus diatasi dengan survei ke lapangan sehingga didapatkan lokasi pemetaan yang tepat. Penentuan lokasi survei perlu memperhatikan aspek mewakili tiap kondisi lapang. Contoh sebaran lokasi kegiatan PGPSCS Provinsi Papua ditampilkan pada gambar berikut.

Sebaran Lokasi Perluasan Lahan Sawah di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua



- Penyusunan peta geospasial perluasan sawah ini juga penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, topografi, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan air, peta dapat membantu mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk perluasan sawah tanpa merusak ekosistem yang ada.





Bimbingan Teknis Kegiatan Geospasial Perluasan Sawah Provinsi Maluku Utara

Koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan geospasial perluasan sawah Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 13-15 Juni 2023 di BLU Fakultas Pertanian Universitas Khairun, Provinsi Maluku Utara secara luring. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah TA 2023 Provinsi Maluku Utara. Sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pertemuan ini dilakukan untuk mengetahui kesanggupan dan kesiapan pelaksana swakelola kegiatan PGPS (BLU Fakultas Pertanian Universitas Khairun). Alat-alat yang digunakan yaitu

- Drone 1 Unit
- GPS 1 Unit
- Komputer *Workstation*
- Kuisisioner 1 Berkas

Program pengolah data yang digunakan :

- Arcgis 13.2
- Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (Pleides)

Pengambilan data lapang dilakukan setelah selesai data AOI terkumpul dan dilakukan deliniasi ulang menggunakan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi serta untuk efisiensi waktu dan cost yang digunakan. Pengambilan data lapang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

Data AOI Pemetaan Geospasial Perluasan Sawah di Provinsi Maluku Utara



No	Kabupaten / Kota	Luas Lahan Sawah (Ha)
1	Halmahera Barat	179,10
2	Halmahera Selatan	179,50
3	Halmahera Tengah	178,10
4	Halmahera Timur	388,90
5	Halmahera Utara	817,60
6	Kepulauan Sula	25,30
7	Pulau Morotai	787,10
8	Tidore Kepulauan	68,20
TOTAL		2.623,80



Updating Peta Lahan Baku Sawah (LBS)

Pemutakhiran data LBS 2019 dilakukan untuk meningkatkan keakurasian data lahan sawah yang mungkin terjadi karena beberapa faktor teknis dan non teknis seperti alih fungsi lahan, kesalahan interpretasi citra satelit, dan lain sebagainya. Bahwa yang dimaksud dengan Sawah adalah areal tanah pertanian yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus, ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman tebu, tembakau, dan/atau tanaman semusim lainnya (Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1997).

Pemutakhiran data LBS Nasional Tahun 2023 dilakukan melalui validasi data dan verifikasi lapang, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi terkait. Dalam rangka persiapan dan memperkuat data update lahan sawah 2023, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan melakukan penyisiran kembali terhadap lahan-lahan sawah yang belum masuk ke dalam LBS 2019.

Dalam melaksanakan kegiatan pemetaan dilakukan dengan metode interpretasi citra satelit resolusi tinggi hingga resolusi sangat tinggi. Interpretasi citra satelit dan pendelineasian petakan sawah dilaksanakan mengikuti Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geografis (BIG) Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Interpretasi Citra Satelit Terhadap Lahan Sawah. Pekerjaan updating lahan baku sawah ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pengumpulan data dasar seperti peta lahan baku sawah tahun 2019, citra satelit resolusi tinggi hingga sangat tinggi
2. Melakukan interpretasi citra satelit
3. Melakukan markin terhadap penampakan lahan sawah diluar lahan baku sawah tahun 2019
4. Melakukan delineasi dan perhitungan luasan
5. Melakukan pengambilan *evidence*

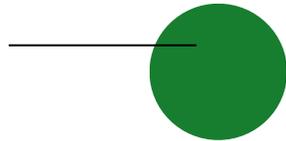
Alur Analisis Data Lahan Baku Sawah Update 2023



Perbandingan LBS 2019 dan Hasil Sawah Update 2023

NO.	PROVINSI	LBS 2019	LBS 2023	Selisih
1	Jawa Barat	928.218	915.941	-12.277
2	Jawa Tengah	1.049.661	984.762	-64.899
3	D.I. Yogyakarta	76.273	66.993	-9.280
4	Jawa Timur	1.214.909	1.204.755	-10.154
5	Banten	204.335	196.655	-7.680
6	Bali	70.996	63.776	-7.220
7	NTB	234.542	233.006	-1.536
8	Sumatera Barat	194.282	187.041	-7.241
9	Aceh	213.997	202.698	-11.299
10	Sumatera Utara	308.668	311.511	2.843
11	Sumatera Selatan	470.602	519.484	48.882
12	Lampung	361.699	336.777	-24.922
13	Sulawesi Selatan	654.818	659.587	4.769
14	Kalimantan Barat	242.972	199.829	-43.143
15	Kalimantan Selatan	291.145	338.309	47.164
16	Riau	62.689	58.953	-3.736
17	Kep Riau	1.394	883	-511
18	Jambi	68.349	69.932	1.583
19	Bengkulu	50.840	42.441	-8.399
20	Kep. Babel	22.402	22.561	159
21	DKI Jakarta	414	360	-54
22	Kalimantan Timur	41.406	45.560	4.154
23	Kalimantan Utara	11.922	12.029	107
24	Kalimantan Tengah	136.486	100.499	-35.987
25	Sulawesi Utara	47.043	39.768	-7.275
26	Gorontalo	33.056	32.021	-1.035
27	Sulawesi Tengah	116.828	126.307	9.479
28	Sulawesi Tenggara	82.117	88.936	6.819
29	Sulawesi Barat	39.483	42.873	3.390
30	NTT	155.520	175.809	20.289
31	Maluku	18.283	17.960	-323
32	Maluku Utara	13.542	7.187	-6.355
33	Papua Barat		2.604	-6.256
34	Papua Barat Daya	8.860	472	472
35	Papua		1.807	-34.388
36	Papua Pegunungan		949	949
37	Papua Tengah	36.195	2.370	2.370
38	Papua Selatan		43.037	43.037
JUMLAH		7.463.546	7.356.441	-107.105





Berdasarkan tabel di atas, luas lahan sawah total pada Tahun 2023 mengalami penurunan luas sebesar -107.505 Ha (-1,44%) dari luas LBS 2019. Persentase penurunan luas LBS yang signifikan terjadi di Kepulauan Maluku, yaitu sebesar -6.679 Ha (-20,99%), Pulau Jawa sebesar -104.344 Ha (-3,00%) dan Pulau Kalimantan -27.706 Ha (-3,83%). Penurunan luas LBS tahun 2023 secara umum terjadi karena perubahan lahan sawah menjadi perkebunan dan pertambangan terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta alih fungsi lahan sawah menjadi industri dan infrastruktur di Pulau Jawa.

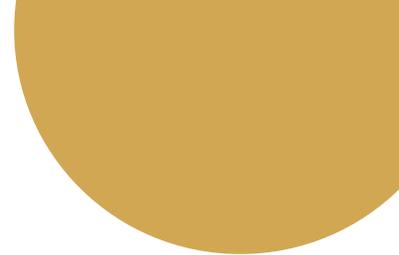
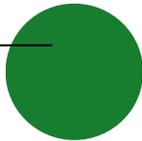
Peta Indikasi Lahan Baku Sawah Tahun 2023



Penetapan Lahan Baku Sawah Tahun 2023 ini masih dalam proses penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan data Sawah *Update* dalam Rangka Pemutakhiran Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023 Nomor 1/BA-500.PG.03.03/XII/2023 yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN sehingga sampai saat ini Pemutakhiran Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2023 belum ditetapkan.

Dalam proses verifikasi dan validasi data untuk menetapkan LBS 2023 terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu lokasi sawah yang menyebar dan lokasinya di daerah yang *remote* menyebabkan tidak adanya sinyal sehingga mempersulit updating lahan, jalan akses ke lokasi persawahan yang minim dan jauh serta waktu yang terbatas dengan sebaran target verifikasi yang banyak. Selain itu minimnya pengetahuan petugas dalam memahami data spasial sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam memahami data spasial. Peran serta aktif provinsi dan kabupaten sangat diperlukan dalam memberikan keterangan lahan sawah, sehingga tidak lagi banyak yang harus diverifikasi. Beberapa contoh analisis Lahan Baku Sawah di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut.





FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN LINDA LAMPAH DARAH

2. Perubahan Penggunaan Tanah

Keberangas, Kabupaten Cirebon

Keberangas
1. Area sawah pada LRA 2018 menjadi kawasan "Sawah"
2. Setelah dilakukan verifikasi (sumbu) area sawah menjadi "Sawah Non Irigasi"

FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN LINDA LAMPAH DARAH

3. Terasering Data di luar (DI) dan dalam (DI)

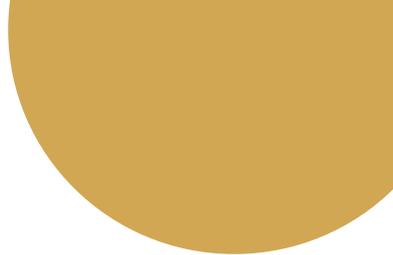
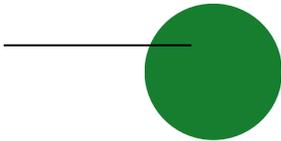
Keberangas, Kabupaten Cirebon

Keberangas
1. Area sawah pada LRA 2018 menjadi kawasan "Sawah"
2. Setelah dilakukan verifikasi (sumbu) area sawah menjadi "Sawah Non Irigasi"

DOKUMENTASI KEGIATAN VALIDASI DAN VERIFIKASI

LBDR - Tanah Kering **LBDR - Penggunaan Campuran**

Informasi:
 Di Kota Cirebon, terjadi perubahan penggunaan tanah oleh petani menjadi tanah kering
 Di Kabupaten Berau, terjadi perubahan penggunaan tanah dari sawah menjadi sawah campuran



DOKUMENTASI KEGIATAN VALIDASI DAN VERIFIKASI

LOKASI SURVEI > Kecamatan



Informasi:
Di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan
 terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian sawah menjadi permukiman.

DOKUMENTASI KEGIATAN VALIDASI DAN VERIFIKASI

LOKASI SURVEI > Desa dan Kecamatan



Informasi:
Di Kecamatan Long Hujung, Kabupaten Mahakam Ulu
 terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi hutan alam semak.

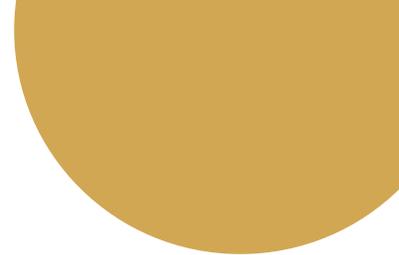
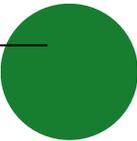
DOKUMENTASI KEGIATAN VALIDASI DAN VERIFIKASI

Kabupaten Muar, Provinsi Sumatera



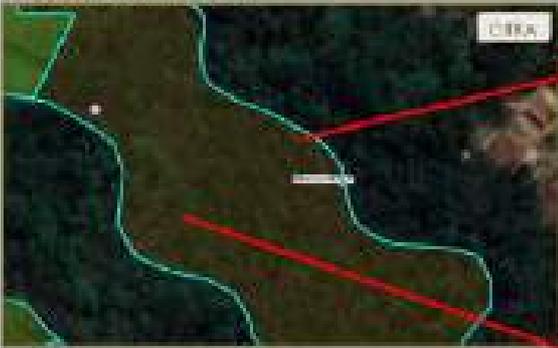
Informasi:
Di Desa Ulu Desa Sungai Bawang
 Poligon merupakan Sawah di kelas 100-2019. Hasil uji hasil validasi dan verifikasi menunjukkan bahwa poligon hasil foto perbandingan pengigian lahan menjadi perkebunan karet.





DOKUMENTASI KEGIATAN VALIDASI DAN VERIFIKASI

Kabupaten Ogan Komering Ilir



Informasi:
 Polygon merupakan sawah dalam LRS 2019. Namun hasil validasi dan verifikasi menunjukkan bahwa polygon merupakan betan kapal dan betan jukung.



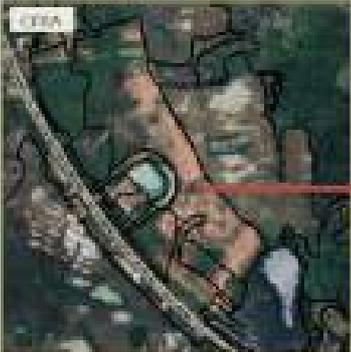
Konsep Betan Kapal



Konsep Betan Jukung

DOKUMENTASI KEGIATAN VALIDASI DAN VERIFIKASI

Kota Palembang



Informasi:
 Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Peta-peta tematik sawah di tahun LRS 2019. Namun hasil validasi dan verifikasi menunjukkan bahwa polygon merupakan kawasan hutan yang menjadi lahan sawah konversi secara sambar pemerintah baru.




PERUBAHAN DUNIAKSI SAWAH

Silber Palgot

 **Aranyapura, Kabupaten Indragiri**



Informasi:
 Persebaran di area sawah yang awalnya adalah sawah menjadi lahan sawah.



Informasi:

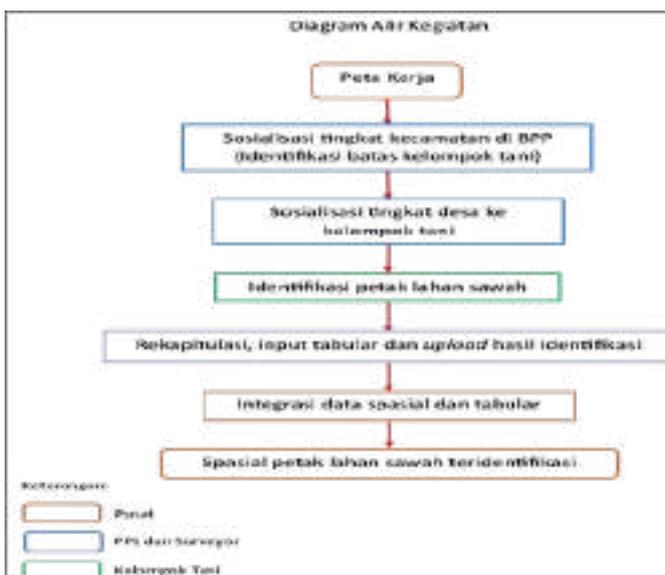


Data Geospasial Petak Sawah

Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah mendapatkan alokasi anggaran Rp.15.069.450.000 dan Kegiatan Updating Peta Lahan Sawah dengan alokasi anggaran Rp.19.919.246.000. Pada bulan Mei 2023 dilakukan realokasi dari alokasi Dekonsentrasi menjadi alokasi pusat sehingga alokasi anggaran Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah menjadi Rp.15.169.950.000 dan Kegiatan Updating Peta Lahan Sawah menjadi Rp.20.020.746.000. Berdasarkan surat nomor B-3826/RC.110/A/11/2023 tanggal 10 November 2023, dalam rangka mendukung upaya khusus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung sebagai antisipasi terjadinya penurunan produksi, kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah mengalami refocussing anggaran menjadi Rp.10.674.010.000 yang terdiri dari Kegiatan Persiapan Pemetaan Geospasial sebesar Rp. 1.268.050.000 dan Kegiatan Penyusunan Peta Geospasial sebesar Rp. 9.405.960.000. Kegiatan ini berada pada alokasi pusat dengan jumlah output 2 unit (dokumen peta).

Realisasi anggaran kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah sebesar Rp.10.596.075.101 atau 99,27% dari total alokasi pagu sebesar Rp.10.674.010.000 yang terdiri dari Kegiatan Persiapan Pemetaan Geospasial sebesar Rp.1.227.087.327 dan Kegiatan Penyusunan Peta Geospasial sebesar Rp.9.368.987.774.

Diagram Alir Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah



Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah secara umum dibagi menjadi dua pekerjaan besar yaitu deliniasi petak lahan sawah dan identifikasi atau pengisian atribut petak lahan sawah. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyusunan Peta Petak Lahan Sawah Petani adalah metode Pemetaan Partisipatif dengan melibatkan partisipasi kelompok tani untuk melakukan identifikasi petak lahan sawah. Petugas Penyuluh Lapang bersama dengan surveyor melakukan sosialisasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi kepada kelompok tani terkait identifikasi petak lahan sawah serta kelengkapan atribut informasi.





Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

a) Delineasi petak lahan sawah

Kegiatan pendelineasian petak lahan sawah dilakukan dengan data dasar lahan baku sawah (LBS) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019. Pendelineasian petak lahan sawah dilaksanakan mengikuti Keputusan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geografis (BIG) Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Interpretasi Citra Satelit Terhadap Lahan Sawah. Proses delineasi petak lahan sawah dilakukan dengan metode digitasi manual (*on screen digitation*) pada data LBS berdasarkan kenampakan sawah pada Citra Resolusi Sangat Tinggi (CSRT) atau basemap citra lainnya yang mampu menampilkan kenampakan lahan sawah secara detail dan terkini. Proses delineasi telah dilakukan di seluruh 17 kecamatan Kabupaten Sleman dengan total 317.708 petak di lahan baku sawah seluas 18.295 hektar.

b) Validasi, koreksi dan finalisasi

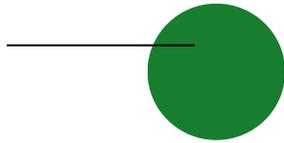
Data spasial petak lahan sawah hasil delineasi perlu dilakukan validasi untuk mengetahui kesesuaian antara hasil analisis dengan kondisi riil lapangan. Validasi juga dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi topologi dan format data. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya data yang tumpang-tindih (*overlap*) dan memastikan struktur database serta sistem georeferensi seragam dan konsisten. Berdasarkan hasil validasi tersebut, peta petak lahan sawah dikoreksi dan difinalkan.

Pengisian atribut petak lahan sawah dilakukan dengan metode pemetaan partisipatif dengan menggali informasi atribut setiap petak lahan sawah dari perwakilan kelompok tani. Proses pengisian atribut dilakukan oleh operator GIS/surveyor secara *online* melalui sistem aplikasi WebApp ESRI yang disusun tim Kelompok Basis Data Lahan. Sistem aplikasi WebApp ESRI dipilih karena pertimbangan menggunakan sistem data yang *online* dan terpusat serta desain aplikasi yang mudah digunakan semua kalangan. Kegiatan identifikasi dan pengisian atribut di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut.

Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Pengisian Atribut di Kabupaten Sleman

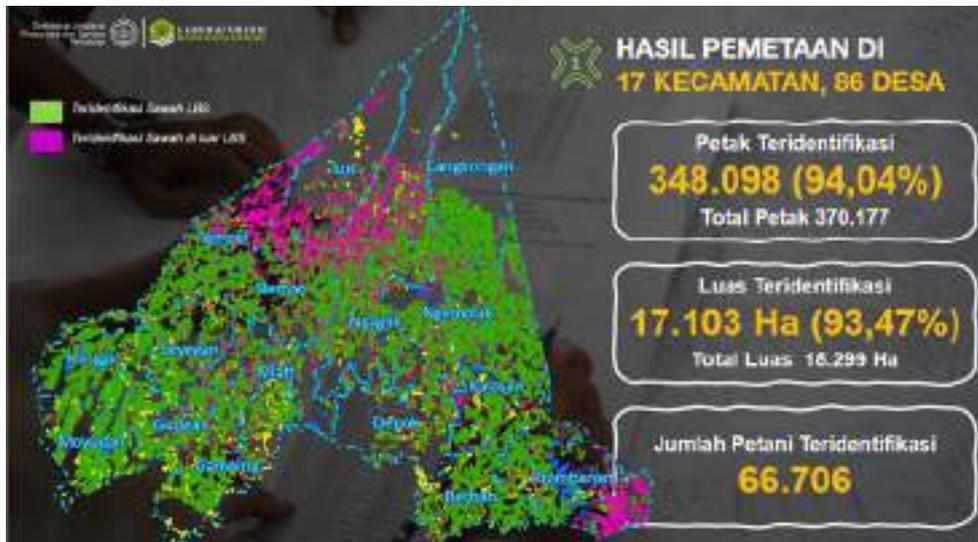
No	Tahap	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Poktan	Jumlah Surveyor	PPL
1	Sosialisasi	28 Maret - 18 April 2023	1043	50	71
2	Penyempurnaan Sistem WebGIS	30 April - 06 Mei 2023	1043	50	71
3	TOT Surveyor	07-13 Mei 2023	1043	50	71
4	Seminar Hasil	15 Juni 2023	0	50	71



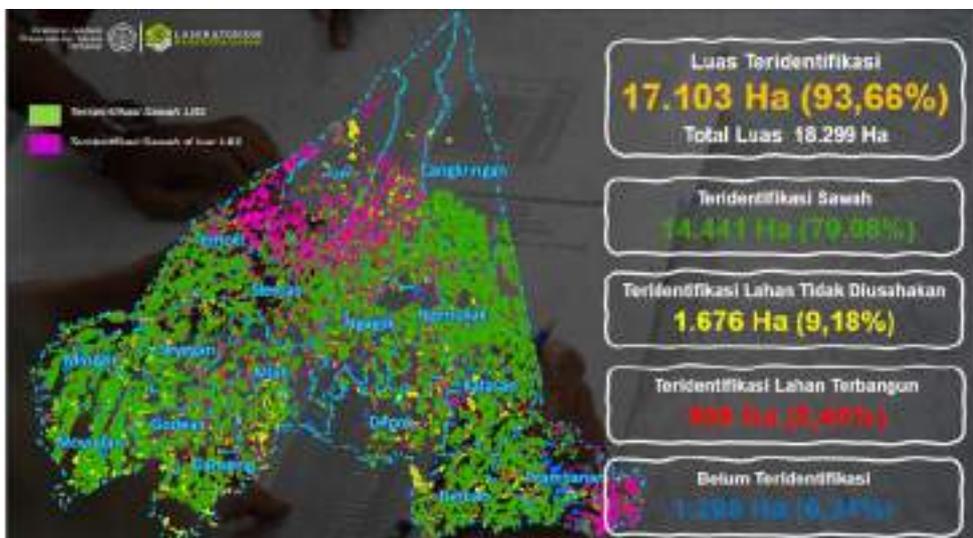


Kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Petak Lahan Sawah di 15 Kecamatan, Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi hasil pemetaan yang meliputi verifikasi data spasial dan atribut hasil identifikasi petak lahan sawah. Hasil Pemetaan secara umum di tampilkan pada *dashboard online* ESRI pada website bit.ly/GEOSPASIALPERTANIAN-SLEMAN-SUPERVISOR yang bisa diakses semua kalangan. Dashboard hasil pemetaan menampilkan informasi sebaran petak lahan sawah di setiap desa mengenai jumlah petak dan luasan LBS yang sudah diidentifikasi, sebaran penggunaan lahan, matriks kapasitas input per surveyor dan sebaran petak lahan sawah per kelompok tani. Tampilan *dashboard* hasil pemetaan petak lahan sawah Kabupaten Sleman sebagai berikut.

Cuplikan Hasil Petak sawah yang Teridentifikasi di Kabupaten Sleman



Cuplikan Hasil Petak sawah yang Teridentifikasi Berdasarkan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman



Realisasi Identifikasi Petak Lahan Sawah Kabupaten Sleman per Kecamatan

KECAMATAN	PETAK	PETAK		LUAS		PETANI	
		TERIDENTIFIKASI	% PETAK	TERIDENTIFIKASI	% PETAK	TERIDENTIFIKASI	% PETANI
Minggir	32,103	29,806	93,00	1,097	4,84		
Moyudan	34,032	32,108	94,00	1,156	4,474		
Sayegan	26,562	24,972	94,00	1,16	3,218		
Tempel	22,169	21,158	96,00	990	4,001		
Mlati	15,099	13,55	90,00	732	3,526		
Pakem	21,238	21,087	99,29	949	3,518		
Turi	8,844	8,755	98,70	278	1,328		
Berbah	18,17	17,93	98,88	1,113	4,567		
Depak	4,626	4,527	97,88	381	1,006		
Ocean	25,311	24,356	96,60	1,146	3,637		
Çamping	10,31	10,279	99,70	637	2,189		
Prambanan	27,424	23,109	84,27	931	5,677		
Kalasan	23,539	22,253	94,54	1,413	5,885		
Sleman	26,654	24,922	93,50	1,232	4,647		
Ngaglik	21,866	20,303	92,90	1,274	4,48		
Ngemplak	31,628	30,964	97,90	1,65	6,548		
Cangkringan	22,764	20,02	88,14	764	3,366		
Total	370,177	348,098	94,04	17,103	66,706		

Berdasarkan tabel diatas, kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah di 15 Kecamatan telah selesai dilaksanakan dengan metode pemetaan partisipatif yang melibatkan 1.043 kelompok tani, dengan hasil 94,04% teridentifikasi dari total petak 370,177 petak sawah dengan luasan yang teridentifikasi 93,47% dari total luas sawah di Kabupaten Sleman 18,299 hektar. Sebanyak 66,706 petani yang teridentifikasi pemilik dan atau penggarapnya, berdasarkan hasil Data Geospasial Petak Lahan Sawah dengan metode partisipatif masih terdapat data petani pemilik dan atau penggarap yang belum masuk ke dalam data SIMLUHTAN dan masih terdapat petak sawah (poligon sawah) yang belum masuk sebagai Luas Baku Sawah TA 2019. Sehingga kegiatan ini selain dapat memperbaharui data SIMLUHTAN juga dapat melakukan *update* LBS untuk TA 2023.

Cuplikan atribut Data Geospasial Petak Lahan Sawah

DI Yogyakarta	
DESA	Purwokasnan
KELUMPOK TANI	Tani Malmur KLB, Kalibawa
PENGUNTAH LINTAS	Sawah
PERKIRAAN LUAS (M2)	4000,00000
STATUS PETANI	Penggarap
NAMA PENGARAP	Scytha
NIK PENGARAP	3408111401150001
NAMA POKLE	Setyowati
NIK PEMLIK	
SURVEYOR	Eva Dita
CATATAN	





Kabupaten Jember, Jawa Timur

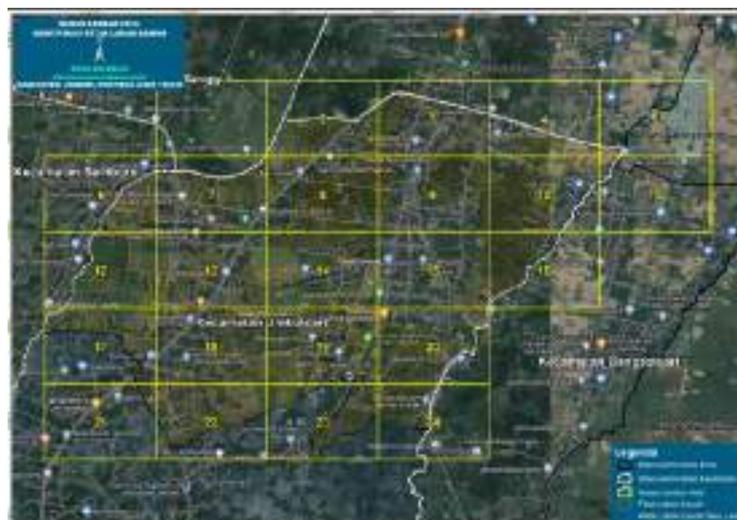
Kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan di 31 Kecamatan 247 Desa dengan 874.713 petak lahan sawah atau seluas 84.114 hektar, serta melibatkan 1.713 kelompok tani dengan sekitar 233.329 data petani yang akan diidentifikasi, 41 surveyor, 161 Penyuluh Lapang dan perangkat dinas lainnya yang tersebar di 10 Wilayah BPP dengan waktu pelaksanaan bulan September hingga bulan Desember 2023. Tahapan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pengisian atribut di Kabupaten Jember disajikan pada tabel berikut.

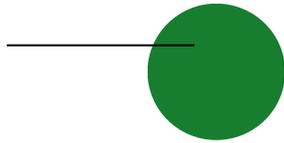
Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Pengisian Atribut Kabupaten Jember

No	Tahap	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Petak	Jumlah Surveyor	PKL	Tim Teknis Kabupaten
1	Kick Off Meeting	05 Oktober 2023	1713	41	161	23
2	Sosialisasi tingkat Kecamatan di BPP	09 - 13 Oktober 2023	1713	41	161	23
3	Sosialisasi tingkat Desa ke Kelompok Tani	18 - 27 Oktober 2023	1713	41	161	23
4	Identifikasi Petak Lahan Sawah oleh Kelompok Tani	30 Oktober - 25 November 2023	1713	41	161	23
5	Integrasi data spasial dan tabular	26 November - 08 Desember 2023	1713	41	161	23

Pada kegiatan Data Geospasial Petak Lahan Sawah di Kabupaten Jember, memberikan peran lebih terhadap pengguna data geospasial petak lahan sawah ini yaitu Dinas Pertanian Kabupaten serta Penyuluh Pertaniannya. Peta hasil *layout* spasial petak lahan sawah beserta nomor id petak yang digunakan sebagai dasar identifikasi petak lahan sawah. Nomor id petak adalah kode unik setiap petak lahan sawah berupa angka yang diurutkan per hamparan per desa dari utara sampai selatan di setiap kecamatan. Peta kerja dapat didownload di link bit.ly/PETAKERJAJEMBER.

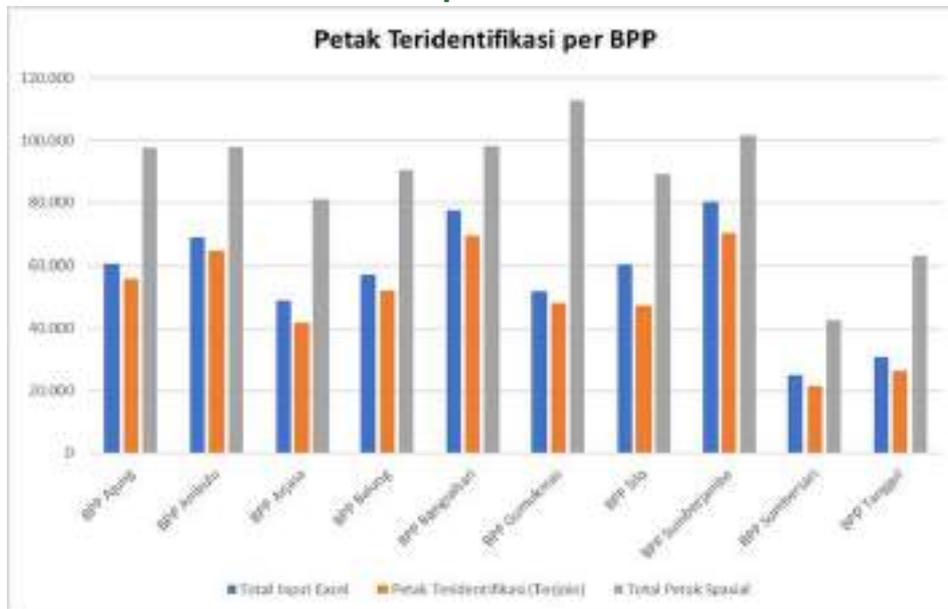
Cuplikan Peta Kerja A0 Data Geospasial Petak Lahan Sawah Kabupaten Jember





Data Geospasial petak lahan sawah petani Kabupaten Jember telah menghasilkan data identifikasi petak lahan sawah petani sebanyak 64,23% atau 561.849 petak. Data ini merupakan data tabular *excel* hasil *input* surveyor berdasarkan formulir hasil identifikasi yang diserahkan petani. Surveyor masih belum mampu menyelesaikan seluruh input hasil identifikasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga masih banyak formulir identifikasi petani yang belum terinput. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pengembalian formulir identifikasi dari petani sehingga menumpuk diakhir batas waktu input tabular. Dari 561.849 data hasil input surveyor berhasil diintegrasikan dengan data spasial sebanyak 497.695 atau 56,9% dari total jumlah petak sebanyak 874.713 petak. Berikut adalah grafik petak teridentifikasi per wilayah BPP.

Diagram Petak Lahan Sawah Teridentifikasi di Kabupaten Jember



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa BPP Gumukmas adalah BPP dengan total petak spasial terbanyak, hal ini dikarenakan wilayah BPP Gumukmas meliputi 4 kecamatan sedangkan BPP lainnya hanya meliputi 3 kecamatan. BPP Sumberjambe adalah BPP dengan jumlah input excel dan jumlah petak terjoin terbanyak. BPP Sumberwatu adalah wilayah BPP dengan input excel, petak teridentifikasi dan total petak spasial yang paling kecil, hal ini dikarenakan luasan lahan sawah BPP Sumberwatu yang paling kecil karena sebagian besar adalah wilayah perkotaan. Permasalahan yang terjadi kegiatan ini adalah waktu identifikasi di kelompok tani yang terbatas, kapasitas petani dalam memahami peta kerja yang beragam, tipologi sawah yang beragam, proses penyerahan hasil identifikasi dari petani ke surveyor yang kurang efektif, dan banyaknya petak sawah yang belum terpetakkan pada peta kerja.



Pengembangan Jalan Usaha Tani

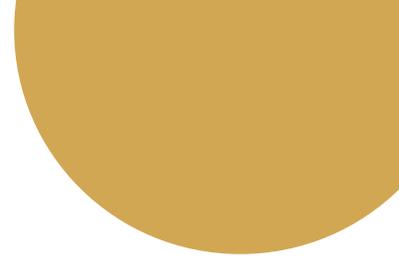
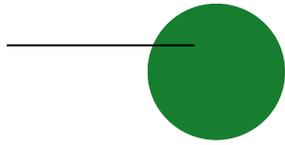
Pembangunan pertanian menuju pertanian modern serta berwawasan agribisnis memerlukan penambahan maupun penyempurnaan prasarana dan sarana pertanian yang menunjang digunakannya peralatan dan mesin untuk pra dan pasca panen serta pengangkutan saprodi dan hasil pertanian dari dan ke lokasi. Untuk memenuhi persyaratan penggunaan peralatan dan mesin pertanian serta pengangkutan sarana produksi dan hasil panen diperlukan fasilitas jalan, jembatan serta kelengkapannya yang memadai. Keberadaan jalan pertanian sangat penting bagi petani dan merupakan suatu peluang yang dapat ditingkatkan kualitas dan fungsinya.

Selain itu, jalan pertanian yang ada sebagian besar masih berupa galengan dan belum memenuhi syarat bagi penggunaan peralatan dan mesin maupun pengangkutan saprodi dan hasil panen. Agar peralatan mesin pertanian maupun alat transportasi dapat dimanfaatkan oleh petani secara optimal, maka perlu dibangun atau dikembangkan sarana jalan pertanian pada lahan usahanya.

Pengembangan Jalan Pertanian merupakan upaya pembangunan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan di kawasan lahan pertanian sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat mesin dan hasil produksi pertanian dengan besaran bantuan 1 (satu) unit Bantuan Pemerintah di kegiatan ini maksimal adalah Rp. 100.000.000 untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 92.800.000.000 di 25 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 sebanyak 928 unit (100%) dengan realisasi anggaran fisik sebesar Rp. 92.800.000.000 (100%).





Pengembangan

Lahan Pertanian Pangan Produktif

Di dalam Roadmap Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Menuju Pertanian Maju, Mandiri Dan Modern dinyatakan bahwa Kebutuhan lahan pertanian setiap tahun meningkat, dimana kebutuhan lahan pada tahun 2020 mencapai 31.116.165 hektar. Jumlah lahan yang tersedia tidak mengalami perubahan yang terdiri dari lahan sawah 7.463.948 hektar, lahan perkebunan 11.750.172 hektar, dan lahan hortikultura 1.800.079 hektar. Pada tahun 2021 dan 2022, kebutuhan lahan meningkat masing-masing menjadi 31.445.966 hektar dan 31.962.012 hektar. Kebutuhan pembukaan lahan baru pada tahun 2022 sebesar 52.000 hektar, dan prediksi kebutuhan pembukaan lahan baru pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing meningkat menjadi 54.000 hektar dan 55.000 hektar. Tingkat pemenuhan kebutuhan lahan pertanian hingga tahun 2021 hanya sebesar 66,9%.



**PREDIKSI KEBUTUHAN
PEMBUKAAN LAHAN
BARU TAHUN 2023**

54.000 ha

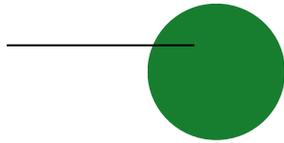


**PREDIKSI KEBUTUHAN
PEMBUKAAN LAHAN
BARU TAHUN 2024**

55.000 ha

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka permintaan terhadap bahan pangan juga mengalami peningkatan. Menurut hasil sementara Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 – 2025, maka penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 273,7 jiwa, berarti akan mengalami kenaikan 43,6 juta jiwa dari penduduk tahun 2005. Dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,3 persen, atau 2,7 juta jiwa per tahun diperlukan tambahan penyediaan bahan pangan yang tidak sedikit setiap tahunnya. Sehingga pada kenyataannya peningkatan produksi tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sehingga ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor cenderung meningkat. Adanya kecenderungan meluasnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini juga telah menyebabkan susutnya lahan pertanian secara progresif. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan keamanan nasional sehingga diperlukan upaya penambahan luas areal baru.





Pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, hortikultura dan perkebunan dalam bentuk pelaksanaan konstruksi kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, hortikultura dan perkebunan beserta pemanfaatannya. Untuk itu dalam pelaksanaan lapangan diperlukan Petunjuk Teknis pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, hortikultura dan perkebunan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Kepala Dinas Pertanian di Propinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan konstruksi kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, hortikultura dan perkebunan beserta pemanfaatannya dapat diperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Kegiatan penyediaan lahan pertanian produktif dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut.



Tanaman Pangan

Menambah baku lahan pada areal lahan kering,



Hortikultura

Penumbuhan sentra-sentra baru untuk produksi komoditas hortikultura melalui pengembangan lahan pertanian produktif pada areal hortikultura



Perkebunan

Pemanfaatan lahan berdasarkan kesesuaian tanah dan iklim (agropedoklimat) melalui pendekatan pengembangan perkebunan rakyat dengan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal perkebunan.

Kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal lahan kering, hortikultura dan perkebunan yang dibiayai dengan dana Tugas Pembantuan (TP) pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan dengan pola swakelola. Pelaksanaan pola ini diatur dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018 yang dirubah dengan Perpres nomor 12 Tahun 2021. Anggaran kegiatan ini dialokasikan pada Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.



Alokasi anggaran koordinasi, sosialisasi dan bimbingan serta monitoring dan evaluasi serta update data kegiatan lahan pertanian pangan produktif digunakan untuk mendukung kegiatan yaitu sebagai berikut.



Penyelesaian pekerjaan kegiatan ekstensifikasi lahan tahun 2021 dan ekstensifikasi lahan tahun 2022

Untuk kegiatan ekstensifikasi TA. 2021, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Desember 2023, total kekurangan pekerjaan yang belum terbangun sebesar Rp.13.946.818.119,65 dan akan dikembalikan ke kas negara (surat terlampir). Untuk kegiatan ekstensifikasi tahun 2022, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Desember 2023, pekerjaan kegiatan sudah dilakukan 100% seluas 1.175,6 hektar (surat terlampir).

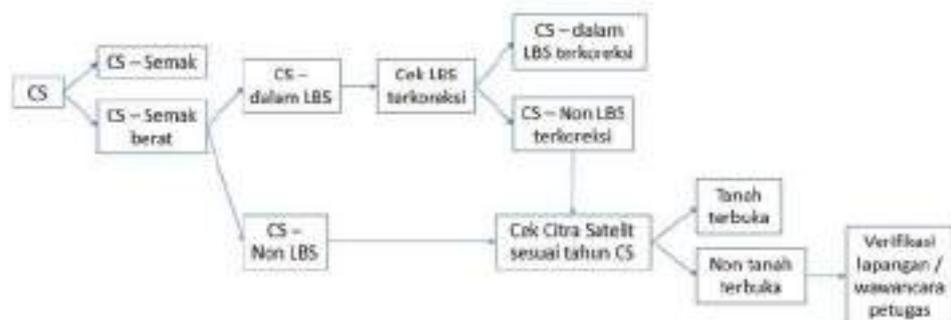


Pemanfaatan perluasan sawah tahun 2015-2019

Tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data perluasan sawah yang terkategori semak berat diuraikan sebagai berikut:

- Melakukan *overlay* data spasial penyelesaian pekerjaan kegiatan ekstensifikasi lahan tahun 2021 dan 2022 dengan data spasial Lahan Baku Sawah (LBS) terkoreksi dan Lahan Baku Sawah (LBS) 2019;
- Melakukan identifikasi tutupan lahan pada data spasial perluasan sawah penyelesaian pekerjaan kegiatan ekstensifikasi lahan tahun 2021 dan 2022 dengan citra tegak satelit resolusi tinggi (CTSRT) atau citra satelit resolusi tinggi (CSRT) dengan tahun perekaman yang bersesuaian dengan waktu pembukaan lahan.
- Melakukan *groundcheck* di area perluasan sawah yang teridentifikasi sebagai lahan yang bervegetasi semak berat.
- Alur proses verifikasi dan validasi data perluasan sawah yang terkategori semak berat ditampilkan sebagai berikut.

Alur proses verifikasi dan validasi data perluasan sawah yang terkategori semak berat



- Pada lokasi perluasan sawah 2015-2019 dengan total luas 224.256,47 hektar dilakukan klasifikasi sehingga tampak adanya semak berat berdasarkan citra yang telah diperoleh seluas 31.582 hektar.
- Pada lokasi yang teridentifikasi sebagai semak berat seluas 31.582 hektar, dilakukan verifikasi dan validasi pada data spasial perluasan sawah tahun 2015-2019 yang terkategori semak berat khususnya pada 6 provinsi dengan sebaran terbesar. Berdasarkan hasil identifikasi, luas hasil cetak sawah tahun 2015-2019 di 6 provinsi yang terkategori semak berat mencapai 12.840 hektar. Hasilnya tersaji sebagai berikut.

Hasil Identifikasi Perluasan Sawah Tahun 2015-2019 yang Terkategori Semak Berat



No	Provinsi	Kabupaten	Realisasi Fisik Cetak Sawah (Ha)	Semak Berat (Ha)	Persentase Berdasarkan Realisasi Fisik
1	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	17.293	4.657	27%
2	Kalimantan Tengah	Katingan	5.800	2.660	46%
3	Kalimantan Barat	Sanggau	7.050	1.612	23%
4	Lampung	Mesuji	10.185	1.473	14%
5	Kalimantan Tengah	Barito Timur	3.800	1.325	35%
6	Lampung	Tulang Bawang	6.571	1.114	17%
TOTAL			50.699	12.840	25%



Hasil identifikasi kegiatan perluasan sawah di beberapa provinsi diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi cetak sawah TA. 2016-2018 di Provinsi Sumatera Barat seluas 1.078 hektar. Berdasarkan identifikasi citra satelit diperoleh hasil: masih berupa sawah 197,76 hektar, semak 10 hektar, tegalan 22,40 hektar, perkebunan 15,68 hektar, pemukiman 0,39 hektar, semak berat 68,14 hektar. Terdapat 783,26 hektar belum ada data spasial.
- Realisasi perluasan sawah di Provinsi Jawa Barat seluas 1.086,80 hektar. Data spasial yang diperoleh seluas 727,01 hektar sehingga masih terdapat kekurangan secara spasial seluas 360 hektar. Lokasi yang masih menjadi sawah seluas 573,01 hektar, semak ringan 33,17 hektar, tegalan 14,56 hektar, perkebunan 105,52 hektar dan semak berat 0,74 hektar.
- Realisasi fisik kegiatan Cetak Sawah TA 2015-2018 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan seluas 17.293 Ha dan diperoleh data spasial dengan perhitungan luas berdasarkan sistem proyeksi *Cylindrical Equal Area* (CEA) seluas 17.302,62 hektar. Berdasarkan interpretasi citra satelit teridentifikasi seluas 4.656,52 hektar dengan kondisi semak berat, berupa sawah 4.675 hektar, sawah dengan kondisi semak ringan saat pengamatan di lokasi seluas 12.628 hektar.
- Realisasi fisik hasil kegiatan Cetak Sawah TA 2015-2018 di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat seluas 7.050 hektar. Terdapat data spasial yang jika dihitung luasannya dengan sistem proyeksi *Cylindrical Equal Area* (CEA) luasnya mencapai 6.897 hektar. Berdasarkan interpretasi citra satelit teridentifikasi semak berat seluas 1.612 hektar, sawah 2.816 hektar, semak ringan 1.790 hektar, tegalan 490 hektar dan perkebunan 190 hektar. Hasil pendataan di Kabupaten Landak, total spasialnya seluas 5.056,68 hektar berupa: sawah 3.052,10 hektar, semak ringan 759,69 hektar, tegalan 85,57 hektar, perkebunan 334, 99 hektar dan semak berat 824,34 hektar. Hasil pendataan di Kabupaten Sintang, total spasialnya 2.317,91 hektar berupa: sawah 625,51 hektar, semak ringan 486,02 hektar, tegalan 284,34 hektar, perkebunan 70,12 hektar dan semak berat 851,92 hektar.

Hasil klasifikasi penggunaan lahan di lokasi perluasan sawah tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Volume (Ha)					Total
		Perkebunan	Sawah	Semak Berat	Semak Ringan	Tegalan	
1	Belum Teridentifikasi	500,70	19.231,86	507,77	1.631,13	572,37	22.443,82
2	2015	2.006,52	7.961,58	2.225,58	1.823,37	528,52	14.546,58
3	2016	5.425,04	55.986,68	17.146,95	20.833,40	5.806,02	100.450,28
4	2017	7.193,17	28.862,29	9.727,11	11.642,72	3.123,24	60.546,49
5	2018	2.722,48	4.985,02	1.185,83	1.792,88	635,51	11.295,73
6	2019	186,82	3.581,09	854,10	1.120,77	278,90	6.011,57
TOTAL		22.044,53	120.963,68	31.582,34	38.644,36	11.025,55	224.265,47

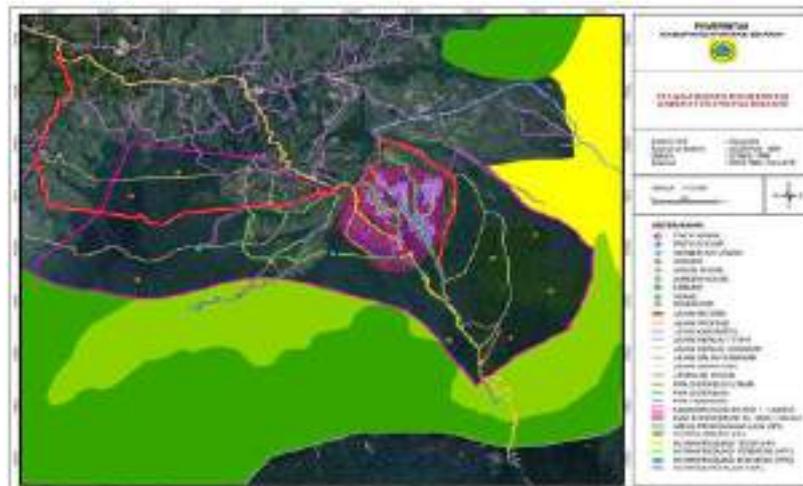




Kegiatan SID Pengembangan Lahan Pertanian Produktif di Pakpak Bharat, Sumatera Utara

- Lokasi *Area of Interest* (Aoi) memiliki bentuk lahan yang cukup bervariasi dari landai hingga dominan berombak bergelombang hingga terjal. Lokasi pengembangan lahan pertanian produktif diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat seluas 1.838 hektar yang merupakan daerah Areal Penggunaan Lain (APL).
- Aoi seluas 1.838 hektar mencakup wilayah 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu (Desa Ulumerah, Pardomoan dan Cikaok) dan Kecamatan Salak (Desa Kuta Tinggi).
- Lokasi ini masuk ke dalam Rencana Induk Pengembangan Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 19/M.PPN/HK/03/2023. Target Kementerian Pertanian untuk pembukaan lahan TA 2024 adalah seluas 200 hektar. Sehingga pada tahun 2023, disusunlah dokumen perencanaan Survei Investigasi dan Desain seluas 1.000 Ha yang sedang dilakukan pada saat ini.
- Secara umum lahan di lokasi tersebut memiliki penggunaan lahan berupa lahan hutan dan lahan pertanian yang diusahakan secara semi intensif. Masyarakat di lokasi dominan menanam lahannya dengan tanaman jagung dan tanaman hortikultura lainnya seperti cabe dan sayur-sayuran.
- Hasil dari SID menyampaikan bahwa lokasi pengembangan lahan pertanian produktif tersebar di Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu, Desa Ulumerah, Pardomuan, dan Cikaok Kabupaten Pakpak Bharat mencakup luas 1.006,33 hektar, dari hasil survey 1.838,07 ha. Petani/pengelola penerima manfaat sebanyak 35 orang di Desa Cikaok; 228 orang di Desa Ulumerah, dan 123 orang di Desa Pardomuan.

Peta Kawasan Food Estate Kabupaten Pakpak Bharat



- Sungai utama yang melintas di area pengembangan lahan pertanian produktif Kabupaten Pakpak Bharat adalah Sungai Ulu Merah dan beberapa anak sungai dengan kondisi aliran selalu mengalir sepanjang tahun dengan debit bervariasi antara 100-1000 liter/detik. Selain itu, terdapat beberapa mata air yang tidak kering walaupun pada musim kemarau dengan debit bervariasi antara 5-30 liter/detik. Potensi sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi tanaman pertanian, seperti jagung dan kopi.
- Potensi sumber air di lokasi pengembangan lahan pertanian produktif Kabupaten Pakpak Bharat dengan memanfaatkan potensi air Sungai Lai Nangguru yang mempunyai debit aliran dasar mencapai 600 lt/det dan sumber mata air di wilayah tengah bagian hulu. Potensi Sungai Lai Nangguru dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan jagung di Zona Barat seluas 240 hektar. Pemanfaatan air sungai dilakukan dengan cara menyedot dan mendorong air hingga beberapa puluh meter di atas elevasi sungai untuk mengisi tampungan sebelum mengalir secara gravitasi melalui pipa distribusi.
- Penggunaan lahan/vegetasi di area pengembangan lahan pertanian produktif Kabupaten Pakpak Bharat didominasi oleh vegetasi rapat seluas 1.079,57 hektar (58,73%), disusul oleh vegetasi jarang seluas 232,30 hektar (12,64%), semak seluas 166,38 hektar (9,05%), dan belukar seluas 148,21 hektar (8,06%) serta terdapat lahan sawah seluas 26,13 hektar (1,42%). Lahan yang mempunyai kemiringan lahan terjal (lereng >40%) diarahkan untuk lahan konservasi (34,07%), sedangkan untuk pengembangan tanaman jagung seluas 635,85 hektar dan pengembangan tanaman kopi seluas 370,48 hektar.
- Infrastruktur irigasi dan JUT menjadi poin kunci untuk menjamin ketersediaan air, distribusi hasil pertanian, dan efisiensi usaha pertanian. Peran strategis infrastruktur pertanian, terutama JUT, mencakup pembangunan jalan dan sistem distribusi yang mendukung pengembangan pertanian dengan lebih efisien. Komponen harga satuan konstruksi per hektar perluasan lahan kering untuk perkebunan melibatkan beberapa aspek penting. Ini mencakup persiapan lahan, konstruksi infrastruktur, penyediaan sarana produksi (saprodi) dan penyusunan "*as-built drawing*". Dalam menghitung biaya *land clearing*, berbagai faktor harus dipertimbangkan, seperti kondisi sumber daya lahan, kerapatan tutupan lahan, dan diameter tajuk pohon yang ada di lokasi. Semua faktor ini menjadi acuan utama dalam merumuskan strategi pembukaan lahan yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, dengan tujuan mengoptimalkan hasil pertanian dan menjaga keberlanjutan ekosistem.
- Pengembangan *Food Estate* di lahan pertanian produktif di Kabupaten Pakpak Bharat disarankan sebagai berikut: (a) perlu diintergrasikan dengan peternakan, (b) perlu dibuat laboratorium lapangan untuk "demplot pengkajian teknologi pertanian *Food Estate*", (c) perlu bimbingan teknis tentang budidaya dan pasca panen yang melibatkan PPL dan petani penerima manfaat, (d) segera dibentuk kelembagaan petani pengembangan *Food Estate* lahan pertanian produktif Kabupaten di Pakpak Bharat.





Pengembangan lahan pertanian produktif yang dilakukan di provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung

Alokasi kegiatan di daerah pada kelompok Penyediaan Lahan Tahun 2023 berupa kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif (PLP2) pada areal tanaman pangan lahan kering, hortikultura dan perkebunan seluas 4.200 hektar dengan rincian areal tanaman pangan lahan kering 1.400 hektar, hortikultura 1.400 hektar dan perkebunan 1.400 hektar. Pada revisi DIPA/POK terakhir di bulan Mei 2023, alokasi kegiatan PLP2 berubah dari 4.200 ha menjadi 775 hektar.

Kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif dilakukan di satuan kerja penerima kegiatan dengan satuan biaya pengembangan lahan pertanian produktif pada areal tanaman pangan lahan kering sebesar Rp.7.500.000/hektar; pada areal hortikultura sebesar Rp. 10.000.000/hektar; dan pada areal perkebunan senilai Rp. 13.000.000/hektar. Satuan biaya tersebut digunakan untuk konstruksi dan sarana produksi pertanian.

Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Produktif memiliki target seluas 775 ha dengan realisasi 754 ha (97,29%) yang dilaksanakan di 5 provinsi. Kegiatan di Nusa Tenggara Barat hanya melakukan kegiatan persiapan. Kegiatan di Sulawesi Tengah (160 ha) dan Kep. Bangka Belitung (180 ha) terealisasi secara fisik 100%. Kegiatan di Sulawesi Selatan memiliki target seluas 285 ha dengan realisasi 268 ha (94,04%) dimana 17 ha tidak terlaksana di Kab. Bantaeng. Selain itu, kegiatan di Nusa Tenggara Timur memiliki target 150 ha dengan realisasi 146 ha (97,33%) dimana 4 ha tidak terlaksana di Kab. Flores Timur.

Sebaran Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran





Nusa Tenggara Timur

Luasan pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Lahan Kering di provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki **target seluas 150 hektar** difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp.1.432.210.000 yang digunakan untuk konstruksi sebesar Rp.1.125.000.000 dan operasional sebesar Rp.307.210.000.

Pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Lahan Kering di Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan pada 3 kabupaten yaitu kabupaten Flores Timur, Sikka dan Ende. Alokasi pada masing-masing kabupaten seluas 50 hektar. Komoditas yang ditanam pada lahan kering adalah padi gogo dan jagung. Pada **Kabupaten Sikka dan Ende dilakukan pekerjaan 100%**. Tetapi untuk **Kabupaten Flores Timur pada kelompok tani Ri'i Anak, Desa Hewa, Kecamatan Wulang Gitang terdapat 4 hektar yang tidak dapat dilaksanakan**. Dari 4 hektar tersebut pada lahan milik 6 (enam) orang anggota kelompok tani dengan kepemilikan masing-masing lahan antara 0,5-1 ha dengan alasan yang berbeda-beda sehingga lahan tersebut tidak dapat dikerjakan dan anggaran yang sudah dicairkan telah disetor kembali ke kas negara.



Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat semula mendapat alokasi kegiatan lahan kering di Kabupaten Bima, namun berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Pertanian Kabupaten belum siap untuk melaksanakan kegiatan lahan kering pada TA 2023 sehingga alokasi anggarannya di realokasi untuk kebutuhan *refocussing* anggaran Ditjen PSP. Adapun biaya operasional sebesar Rp.13.650.000 telah direalisasikan untuk koordinasi di lapangan.



Sulawesi Tengah

Target luasan pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah **seluas 160 hektar** difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp.1.883.640.000 yang digunakan untuk konstruksi fisik sebesar Rp.1.600.000.000 dan operasional sebesar Rp.283.640.000.

Pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah seluas 160 hektar, dialokasikan di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara dengan alokasi masing-masing kabupaten seluas 80 hektar. Komoditas yang ditanam adalah durian. **Pekerjaan dilaksanakan 100%**.





Kep. Bangka Belitung

Target luasan pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Perkebunan di Kepulauan Bangka Belitung seluas 180 hektar difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp.2.781.100.000 (Rp.2.340.000.000 untuk konstruksi dan Rp.441.100.000 untuk operasional).

Provinsi Bangka Belitung dialokasikan **seluas 180 hektar** pada Kabupaten Bangka Barat dan Belitung masing-masing seluas 45 hektar dan Kabupaten Bangka Selatan 90 hektar. Komoditas yang ditanam adalah kopi robusta untuk Bangka Selatan dan Belitung, sedangkan Kabupaten Bangka Barat dengan komoditas kelapa dalam. **Pekerjaan dilaksanakan 100%.**



Sulawesi Selatan

Target luasan pengembangan Lahan Pertanian Produktif mendukung Areal Perkebunan dialokasikan di Provinsi Sulawesi Selatan **seluas 285 ha** dengan anggaran sebesar Rp.4.229.400.000 (Rp.3.705.000.000 untuk konstruksi dan Rp.524.400.000 untuk operasional).

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan seluas 285 hektar, alokasi di kabupaten Sidenreng Rappang seluas 50 hektar, Kabupaten Luwu 100 hektar, Toraja Utara 85 hektar dan Bantaeng 50 hektar. Komoditas yang ditanam adalah kopi robusta, lada dan kopi arabika. **Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, Luwu dan Toraja Utara dilaksanakan 100%**, sedangkan untuk **Kabupaten Bantaeng tidak dapat dilaksanakan 100% (seluas 17 hektar)**. Pada alokasi kegiatan di kelompok tani Sipakalabbiri Desa Lobbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng seluas 17 hektar belum melakukan pembersihan lahan karena lokasi masih dipenuhi dengan tegakan tanaman kopi yang menurut informasi ketua kelompok tani ditanam sejak tahun 1983 dan sudah sekitar 4 hingga 5 tahun tidak produktif, namun saat ini tanaman kopi tersebut berbuah kembali sehingga petani tidak berkenan untuk menebang pohon kopinya. Petani menyampaikan bahwa bibit kopi akan ditanam berdampingan dengan pohon kopi yang sudah ada sebelumnya. Anggaran yang sudah dicairkan untuk kelompok tani ini dilakukan pengembalian anggaran tersebut ke negara. Masih terdapat kekurangan lokasi yang belum ditanam Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 14 hektar, rencana akan ditanam sampai dengan akhir bulan Januari 2024, karena hujan belum merata untuk wilayah ini.



Pengembangan

Optimasi Lahan Rawa

Lahan rawa baik pasang surut maupun rawa lebak sangat berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian tanaman pangan khususnya lahan sawah. Total lahan rawa tersebut adalah sekitar 5,12 juta hektar, yang terdiri dari 1,19 juta hektar berada di kawasan APL, sekitar 1,18 juta hektar di kawasan HPK, dan 2,75 juta hektar berada di kawasan Hutan Produksi. Pemanfaatan lahan rawa, baik pasang surut maupun lebak telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian sawah. Namun, pemanfaatan lahan rawa tersebut tidak berjalan optimal. Sebagian besar sawah di lahan rawa memiliki Indeks Pertanaman yang rendah dan produktivitas yang juga rendah.

Optimalnya pemanfaatan lahan sawah pada rawa tersebut ditandai dengan tercapainya peningkatan indeks pertanaman dan/atau produktivitas tanam, sehingga lahan rawa yang biasanya hanya ditanam sekali dalam setahun, dengan hadirnya program optimasi lahan rawa diharapkan dapat ditanam menjadi dua kali atau bahkan lebih dalam setahun. Diharapkan pula, program ini mampu meningkatkan produktivitas lahan yang akan berdampak pada kenaikan produksi pada saat panen.

Alokasi awal kegiatan Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan pada 2 Provinsi (Provinsi Aceh dan Provinsi Riau) seluas 278 ha dengan total pagu Rp.1.293.622.000. Namun, kegiatan di provinsi Riau terjadi *refocussing* anggaran sehingga alokasi anggaran menjadi Rp.958.222.000 dengan **target seluas 200 ha** dan **realisasi seluas 200 ha (100%) di provinsi Aceh**. Realisasi keuangan kegiatan optimasi lahan rawa sebesar 97,98%. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan dan fisik secara rinci sebagai berikut.



Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA. 2023

No	Provinsi	Kabupaten	Target ha	Alokasi Anggaran Rp	Realisasi Keuangan Rp	%	Realisasi Fisik ha	%
1	Aceh		200	903.100.000	903.100.000	100,00	200	100,00
	Provinsi			8.400.000	8.400.000	100,00		
	Simeleu		200	892.700.000	892.700.000	100,00	200	100,00
2	Riau			65.122.000	16.775.000	64,90		
	Provinsi			47.622.000	35.775.000	75,12		
	Bokan Hilir (operasional)			7.500.000	-	-		
Total				958.222.000	938.875.000	97,98		



Pengembangan

Optimasi Lahan Kering

Berdasarkan perhitungan spasial menggunakan peta tanah tinjau dan kriteria lahan kering, luas lahan kering di Indonesia mencapai 144,47 juta ha. Dari luas lahan kering tersebut sekitar 68,98% merupakan lahan potensial untuk pertanian. Berdasarkan hasil analisis potensi lahan, sekitar 29,39 juta ha (29,50%) potensial untuk tanaman pangan kering, sekitar 1,12 juta ha (1,13%) potensial untuk tanaman sayuran dataran tinggi, sekitar 66,72 juta ha (66,95%) potensial untuk tanaman tahunan termasuk buah-buahan, dan sekitar 2,42 juta ha (2,43%) potensial untuk penggembalaan ternak.

Berdasarkan data potensi sumber daya lahan kering diatas, kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan kering untuk pertanian dipandang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air. Melalui program bantuan pemerintah untuk kegiatan optimasi lahan kering diharapkan terjadi peningkatan indeks pertanaman dan/atau produktivitas komoditas pertanian yang berdampak pada penambahan ketersediaan pangan nasional.

Alokasi awal kegiatan Optimasi Lahan Kering dilaksanakan pada 20 Provinsi seluas 27.700 ha dengan total pagu Rp.166.205.350.000. Dalam pelaksanaannya dilakukan *refocussing* anggaran, sehingga kegiatan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat tidak jadi dilaksanakan. Alokasi anggaran setelah *refocussing* menjadi Rp.9.069.248.500 dengan **target seluas 1.511 ha** dan **realisasi seluas 1.511 ha (100%)** di 13 provinsi yaitu sebagai berikut.

Realisasi Kegiatan Optimasi Lahan Kering TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



SID

Optimasi Lahan Rawa



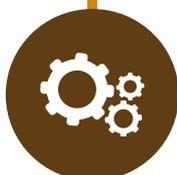
SID untuk Tahun Anggaran 2024

SID Optimasi Lahan Rawa

- Alokasi kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa 2024 dilaksanakan pada 2 Provinsi (Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Barat) seluas 1.150 ha dengan total pagu Rp.308.500.000 dengan rincian kegiatan SID sebesar Rp.287.500.000, dan operasional sebesar Rp.21.000.000. Realisasi keuangan kegiatan SID optimasi lahan rawa untuk TA. 2024 sebesar 89,01%. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut.

SID Optimasi Lahan Rawa untuk TA 2024

No	Provinsi / Kabupaten	Vol (ha)	Total Alokasi (Rp)	Total Realisasi	
				Rp	%
	SID OPLA RAWA	1.150	308.500.000	274.602.885	89,01
1	Sumatera Utara	1.050	280.500.000	274.602.885	97,90
2	Kalimantan Barat	100	28.000.000	0	0



SID untuk Tahun Anggaran 2025

SID Optimasi Lahan Rawa

- Alokasi kegiatan SID Optimasi Lahan Rawa 2025 dilaksanakan pada 5 Provinsi (Provinsi Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua Selatan dan Kalimantan Barat) seluas 1300 ha dengan total pagu Rp.375.000.000 dengan rincian kegiatan SID sebesar Rp.325.000.000, dan operasional sebesar Rp.50.000.000. Realisasi keuangan kegiatan SID optimasi lahan rawa untuk TA.2025 sebesar 90,62%. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut.

SID Optimasi Lahan Rawa untuk TA 2025

No	Provinsi / Kabupaten	Vol (ha)	Total (Rp)	Total Realisasi	
				Rp	%
	SID OPLA RAWA	1.300	375.000.000	339.807.600	90,62
I	Bangka Belitung	200	54.000.000	53.453.000	98,99
II	Sumatera Utara	600	182.000.000	156.878.750	98,84
III	Kalimantan Tengah	200	60.000.000	57.575.850	95,96
IV	Papua Selatan	200	64.000.000	37.000.000	57,81
V	Kalimantan Barat	100	27.000.000	34.900.000	99,71



SID

Optimasi Lahan Kering



SID untuk Tahun Anggaran 2024

SID Optimasi Lahan Kering

- Alokasi kegiatan SID Optimasi Lahan Kering 2024 dilaksanakan pada 7 Provinsi (Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan) seluas 4.630 ha dengan total pagu Rp.488.431.000,- dengan rincian kegiatan SID sebesar Rp.348.000.000, dan operasional sebesar Rp.140.431.000,-.

SID Optimasi Lahan Kering untuk TA 2024

No	Provinsi / Kabupaten	Vol (ha)	Total Alokasi (Rp)	Total Realisasi	
				Rp	%
SID OPLA KERING		3.488	488.431.000	463.708.800	94,94
I	Jawa Timur	600	90.000.000	87.878.500	97,64
II	Sulawesi Barat	300	46.000.000	32.368.000	70,37
III	Sulawesi Utara	100	32.000.000	31.680.000	99,00
IV	Nusa Tenggara Timur	400	52.000.000	51.890.000	98,78
VI	Jawa Barat	100	20.000.000	20.000.000	100,00
VI	Sulawesi Selatan	400	56.431.000	56.400.000	99,94
VII	Sumatera Utara	1.580	192.000.000	183.493.100	95,57



SID untuk Tahun Anggaran 2025

SID Optimasi Lahan Kering

- Alokasi kegiatan SID Optimasi Lahan Kering 2025 dilaksanakan pada 8 Provinsi (Provinsi Bangka Belitung, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, NTT, dan Jawa Barat) seluas 3.250 ha dengan total pagu Rp.453.998.000 dengan rincian kegiatan SID sebesar Rp.325.000.000, dan operasional sebesar Rp.128.998.000. Realisasi keuangan kegiatan SID optimasi lahan kering untuk TA.2025 sebesar 97,70%. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut.

SID Optimasi Lahan Kering untuk TA 2025

No	Provinsi / Kabupaten	Vol (ha)	Total (Rp)	Total Realisasi	
				Rp	%
SID OPLA KERING		3.250	453.998.000	443.576.850	97,70
I	Bangka Belitung	400	60.890.000	60.890.000	100,00
II	Papua Barat Daya	500	69.000.000	67.000.000	97,10
III	Papua Selatan	200	29.000.000	29.000.000	100,00
IV	Gorontalo	400	56.000.000	56.000.000	100,00
V	Sulawesi Utara	250	27.000.000	27.000.000	100,00
VI	Sumatera Utara	800	96.000.000	89.712.450	93,45
VI	NTT	600	104.108.000	101.974.400	97,95
VI	Jawa Barat	100	12.000.000	12.000.000	100,00



Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Produktif di Kawasan *Food Estate*

Pada rentang tahun 2020-2022, pada beberapa lokasi telah dilakukan kegiatan pengembangan *Food Estate* oleh Kementerian Pertanian. Kegiatan pengembangan tersebut dilakukan dalam model pembukaan baru/ekstensifikasi dan peningkatan kapasitas produksi lahan/intensifikasi. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan *Food Estate*, maka pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan optimasi lahan pada kawasan pengembangan *Food Estate*.

Alokasi kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*) dilaksanakan 4 Provinsi (Provinsi NTT, Papua, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah) seluas 5.210 ha dengan total **pagu Rp.24.023.950.000**. Kegiatan Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*) memiliki **target seluas 5.210 ha di 4 (empat) provinsi** yaitu Sumatera Utara (100 ha), Kalimantan Tengah (4.210 ha), Nusa Tenggara Timur (600 ha), dan Papua (300 ha). Namun, kegiatan ini hanya terlaksana di 2 provinsi yaitu di provinsi **Papua seluas 300 ha (100%)** dan **Kalimantan Tengah seluas 16,44 ha (39,05%)** dan **realisasi keuangan sebesar Rp. 9.013.855.844 (35,94%)**. Kegiatan di **Kalimantan Tengah** tidak dapat dilanjutkan karena berdasarkan rewiu SID lokasi hanya mampu menyediakan area seluas 1.644 ha sehingga sesuai dengan SID kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan di **Sumatera Utara** tidak dapat dilanjutkan karena pembuatan *raiser* atau saluran pipa kurang efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan di lokasi tersebut saluran pipa telah tersedia di lahan petani. Kegiatan di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi kriteria teknis yang diharapkan.



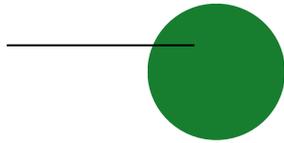
Bab 05

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian



Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan percepatan tanam padi di area persawahan Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.





Kinerja

Anggaran

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen dengan *output* Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Adapun bantuan alat dan mesin pertanian prapanen pada dasarnya bersifat stimulan bagi penerima manfaat, dimana diharapkan melalui bantuan ini penerima manfaat dapat mengelola bantuan alsintan yang diterimanya dengan baik dan optimal.

Pada tahun 2023, anggaran Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mengalami revisi DIPA sebanyak 9 kali. DIPA awal yaitu tanggal 30 November 2022, alokasi anggaran Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebesar Rp. 160.132.400.000 dengan alokasi fisik sebanyak 7.595 unit sementara hasil revisi DIPA ke – 9 tanggal 17 November 2023, alokasi anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 706.867.143.000 dengan alokasi fisik sebanyak 23.081 unit. Dukungan anggaran pada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian pada tahun 2023 terbagi atas dana pusat dan dana daerah sebesar Rp. 706.867.143.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 705.449.398.187 (99,80%).

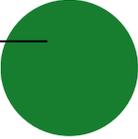
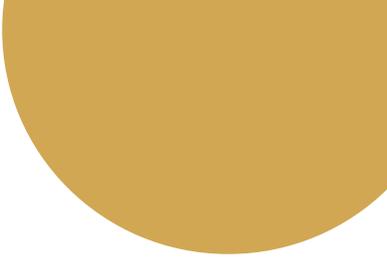
Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen TA. 2023 telah disalurkan dan diterima pada titik bagi di 32 provinsi dan 346 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dari bantuan alsintan sebanyak 23.081 unit tersebut terdapat 12 unit alsintan Traktor Roda 4 yang disalurkan ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) KOSTRAD sebagai tindaklanjut kunjungan kerja pimpinan. Terdapat kegiatan dalam rangka mendukung program Gerakan Nasional (Gernas) penanganan dampak El Nino dengan disalurkan bantuan pompa air sebanyak 135 unit di 10 Provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Adapun kegiatan Gernas dampak El Nino ini dikelola oleh Brigade Perlindungan Tanaman Pangan yang berada dibawah koordinasi BPTPH/UPT Perlindungan.

Realisasi Keuangan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TA. 2023

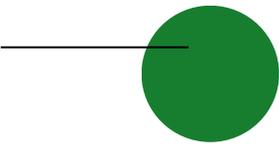


REKSTRANSKRIP/OUTPUT/SLIP OUTPUT	PIKIRI [Rp]	REKSTRAN [Rp]	[%]
IT95 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	706.867.143.000	705.449.398.187	99,80
IT95.AZA Koordinasi	21.909.198.000	21.916.389.071	99,80
IT95.AZA.001 Berek, Meniboring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	21.909.198.000	21.916.389.071	99,80
IT95.AAA Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	684.957.945.000	683.533.009.116	99,80
IT95.AAA.001 Alat dan Mesin Pertanian P/c/Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	692.400.000.000	692.391.894.260	99,80
692.001 Bantuan Traktor Roda 4 Tanaman Pangan	376.999.492.000	376.995.499.040	99,80
692.002 Bantuan Traktor Roda 2	655.005.744.000	655.079.38.108	99,01
692.003 Bantuan Pompa Air	57.384.468.000	57.389.000.000	99,99
692.004 Bantuan mesin sprayer	31.000.278.000	31.000.272.000	99,99
692.005 Bantuan Fermentasi Roda 2	30.388.888.000	30.397.789.628	99,88
692.006 Bantuan Pompa Air (Gerans Penanggulangan El Nino)	22.402.222.000	22.402.398.000	99,84
IT95.AAA.002 Alat dan Mesin Pertanian P/c/Panen Sub Sektor Hortikultura	43.942.979.000	43.982.070.000	99,79
692.008 Bantuan Cakupan	43.942.979.000	43.982.070.000	99,79



- 
- 
- Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyediakan bantuan pemerintah alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan ini memiliki target 23.081 unit dan terealisasi sebanyak 23.081 unit (100%) di 32 provinsi dan 347 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 20.306 unit dan terealisasi sebanyak 20.306 unit (100%). Kegiatan ini menyalurkan 6 (enam) jenis bantuan alat dan mesin pertanian yaitu sebagai berikut.
 - Traktor Roda 4 memiliki target sebanyak 1.076 unit dan terealisasi sebanyak 1.076 unit (100%) di 28 provinsi dan 206 kabupaten/kota.
 - Traktor Roda 2 memiliki target sebanyak 5.504 unit dan terealisasi sebanyak 5.504 unit (100%) di 29 provinsi dan 301 kabupaten/kota.
 - Pompa Air memiliki target sebanyak 2.753 unit dan terealisasi sebanyak 2.753 unit (100%) di 27 provinsi dan 203 kabupaten/kota.
 - Pompa Air mendukung kegiatan Gerakan Nasional (Gernas) Penanggulangan El Nino memiliki target sebanyak 135 unit dan terealisasi sebanyak 135 unit (100%) di 10 provinsi.
 - Handsprayer memiliki target sebanyak 10.266 unit dan terealisasi sebanyak 10.266 unit (100%) di 29 provinsi dan 227 kabupaten/kota.
 - Kendaraan Roda 3 memiliki target sebanyak 572 unit dan terealisasi sebanyak 572 unit (100%) di 21 provinsi dan 138 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura pada tahun 2023 adalah menyalurkan alat dan mesin pertanian berupa **Cultivator**. Kegiatan ini memiliki target sebanyak 2.775 unit dan terealisasi sebanyak 2.775 unit (100%) di 30 provinsi dan 216 kabupaten/kota.
 - Pengawasan peredaran bantuan alat dan mesin pertanian di tingkat penerima dilakukan melalui aplikasi BAST Online. Sampai dengan akhir Desember 2023, alat yang telah didistribusikan kepada kelompok penerima bantuan alat dan mesin pertanian dan terdaftar di BAST Online sebanyak 17.028 unit atau 73,8 % dari 23.081 unit.
 - Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian dilaporkan melalui aplikasi BAST Online dan e-mail Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk kegiatan penyaluran alat dan mesin pertanian tahun 2022 (T-1). Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dapat diketahui bahwa hanya terdapat 3.868 unit (18,03%) yang dilaporkan pemanfaatannya. Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran Dinas lingkup Pertanian dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan alat dan mesin pertanian. Selain itu, nilai kemanfaatan alat dan mesin pertanian yang digunakan petani sebesar 3.446 unit atau 89,09% dari 3.868 unit terlapor.



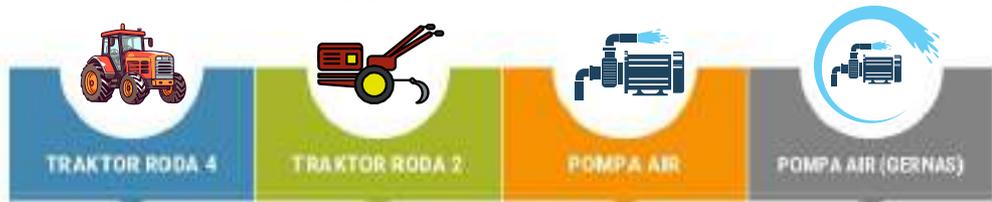
- 
- 
- Kegiatan perbengkelan alat dan mesin pertanian pada tahun 2023 memiliki target pengembangan sebanyak 65 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.200.000.000. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan kegiatan ini mengalami perubahan. Perubahan pertama adalah pengurangan jumlah perbengkelan, dari 65 unit menjadi 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.080.000.000,-. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan barang di penyedia tidak mencukupi. Penyedia bengkel alsintan berjalan hanya mampu memproduksi sebanyak 11 unit sampai dengan akhir tahun 2023. Perubahan kedua adalah adanya *refocussing* anggaran. Anggaran perbengkelan alsintan tahun anggaran 2023 menjadi salah satu kegiatan yang terdampak dilakukan pemotongan anggaran, sehingga kegiatan perbengkelan untuk TA. 2023 tidak dapat dilaksanakan.
 - Kegiatan sertifikasi LS Pro Alat dan Mesin Pertanian merupakan kegiatan agar produsen bisa mendapatkan sertifikat tanda SNI melalui suatu proses yang dilakukan oleh LS Pro terakreditasi KAN. Pada tahun 2023, permohonan sertifikasi alsintan yang diajukan oleh pemohon sertifikasi sebanyak 158 Merek Tipe Model dari 16 ruang lingkup, sedangkan 20 ruang lingkup tidak dapat diproses karena permohonan produk impor dan LS Pro Alsintan belum memiliki anggaran untuk memproses permohonan produk impor.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan LS Pro Alat dan Mesin Pertanian mendapatkan nilai IKM sebesar 75,25% atau masuk dalam kategori B (Baik). Unsur yang memiliki nilai paling rendah yaitu waktu pelayanan (2,57) dan penanganan pengaduan, saran dan keluhan (2,57).
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LS Pro Alat dan Mesin Pertanian berupa biaya sertifikasi yang ditagihkan kepada pemohon sertifikasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023. Penerimaan PNBP dari sertifikasi setiap tahunnya terjadi peningkatan. Tahun 2023, jumlah PNBP memiliki target sebesar Rp. 550.000.000 dan tercapai realisasi mencapai Rp. 1.187.380.270 (215,89%).



Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Capaian realisasi fisik kegiatan penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen untuk subsektor tanaman pangan maupun subsektor hortikultura sebesar **100 persen** atau sesuai dengan target fisik yang telah ditetapkan yaitu sebanyak **23.081 unit**.

Realisasi Fisik Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2023

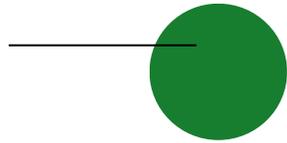


	TRAKTOR RODA 4	TRAKTOR RODA 2	POMPA AIR	POMPA AIR (GERNAS)
Target (unit)	1.076	5.504	2.753	135
Realisasi (unit)	1.076	5.504	2.753	135
Jumlah Kontrak	44	45	22	2
Jumlah Penyedia	8	2	5	2
Jumlah Merk/Tipe	9	9	7	2



	HAND SPRAYER	KENDARAAN RODA 3	CULTIVATOR
Target (unit)	10.226	572	2.775
Realisasi (unit)	10.226	572	2.775
Jumlah Kontrak	15	10	16
Jumlah Penyedia	4	2	3
Jumlah Merk/Tipe	6	5	3





Penyediaan dan Penyaluran Traktor Roda 4

Traktor merupakan tenaga penggerak utama dalam kegiatan usaha tani. Boleh dikatakan bahwa traktor merupakan mesin utama untuk menggerakkan sejumlah alat dan mesin pertanian, seperti alat pengolah tanah (bajak, garu, rotari), alat penanam, khususnya penanam biji-bijian (*seeder*), alat pengangkut hasil pertanian, pompa air irigasi, dan sebagainya. Traktor roda empat merupakan salah satu jenis traktor andalan untuk mekanisasi pertanian terutama pada lahan yang cukup luas.

Traktor roda 4 sangat cocok digunakan dilahan sawah dengan skala luas dan datar. Cocok juga digunakan untuk tanah yang kering atau tadah hujan sehingga untuk percepatan tanaman padi, jagung dan kedelai (pajale). Demikian juga sangat baik digunakan untuk daerah-daerah yang minim tenaga kerja.

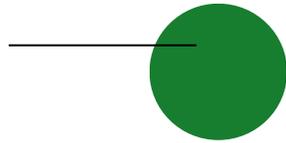
Target Traktor Roda 4 tahun 2023 sebanyak **1.076 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 379.989.400.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **28 Provinsi** dan **206 Kabupaten/Kota** dengan realisasi fisik sebanyak **1.076 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar **Rp. 379.955.483.112 (99,99%)**.

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Traktor Roda 4 TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Traktor Roda 4



Traktor roda 4 sangat cocok digunakan dilahan sawah dengan skala luas dan datar.

Tujuan penggunaan traktor dalam pengolahan tanah adalah untuk menciptakan keadaan fisik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan peralatan yang bekerja secara mekanis dan berskala besar.

NAD



Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Banten



Kelompok Tani Perintis, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten

NAD



Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam



Penyediaan dan Penyaluran Traktor Roda 2

Traktor merupakan tenaga penggerak utama dalam kegiatan usaha tani. Boleh dikatakan bahwa traktor merupakan mesin utama untuk menggerakkan sejumlah alat dan mesin pertanian, seperti alat pengolah tanah (bajak, garu, rotari), alat penanam, khususnya penanam biji-bijian (*seeder*), alat pengangkut hasil pertanian, pompa air irigasi, dan sebagainya.

Traktor roda dua merupakan tenaga penggerak untuk sejumlah alat dan mesin pertanian seperti bajak, garu, dan glebek. Traktor jenis ini banyak diminati oleh petani terutama untuk lahan-lahan yang relatif kecil ukurannya karena biaya operasinya yang murah. Traktor roda dua (*two-wheel drive tractor*) atau traktor tangan (*hand tractor*) adalah mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan pekerjaan pertanian lainnya yang mempunyai efisiensi yang tinggi, karena pembalikan dan pemotongan tanah dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan.

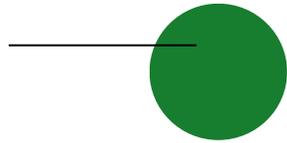
Target Traktor Roda 2 tahun 2023 sebanyak **5.504 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 168.895.744.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **29 Provinsi** dan **206 Kabupaten/Kota** dengan realisasi fisik sebanyak **5.504 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar **Rp. 168.676.132.613 (99,87%)**.

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Traktor Roda 2 TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Traktor Roda 2



Traktor jenis ini banyak diminati oleh petani terutama untuk lahan-lahan yang relatif kecil ukurannya karena biaya operasinya yang murah.

Seperti halnya traktor roda empat, traktor roda dua juga merupakan peralatan utama untuk mendukung kegiatan usaha tani.

Jawa Barat



Kelompok Tani Makmur Jaya, Desa Salaherang, Kec. Maleber, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

Sumatera Utara



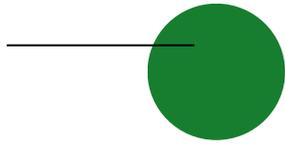
Kec. Panombean Panei, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara

Jawa Tengah



Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Tengah





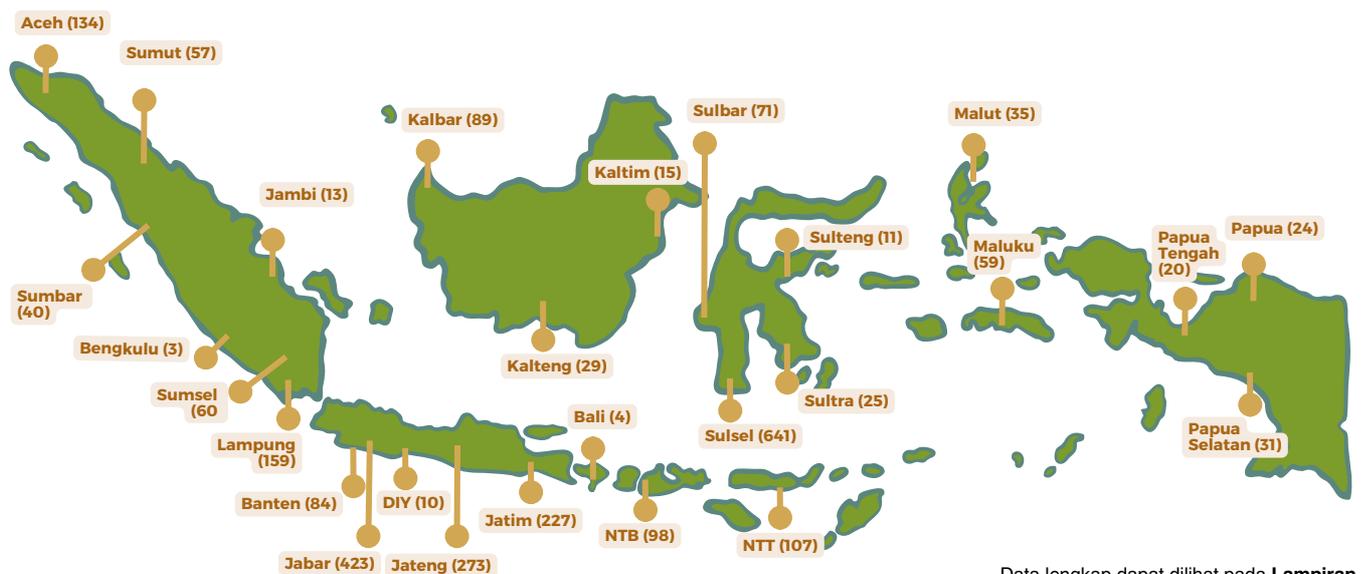
Penyediaan dan Penyaluran Pompa Air

Pompa air adalah alat yang digunakan di berbagai industri untuk meningkatkan tekanan air sehingga dapat memindahkannya dari lokasi ke lokasi lain. Pompa air modern sedang digunakan di seluruh dunia untuk menyediakan air yang aman untuk keperluan perumahan, komersial, dan industri.

Pompa air termasuk salah satu alat yang menjadi sahabat bagi para petani. Pompa air membantu petani untuk memindahkan air dengan lebih mudah dan cepat. Keberadaannya juga membantu meringankan beban kerja harian untuk proses pengairan air ke seluruh tanaman.

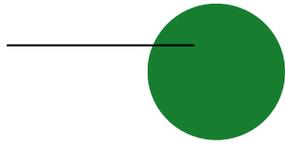
Target Pompa Air tahun 2023 sebanyak **2.753 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp.57.964.415.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **27 Provinsi** dan **203 Kabupaten/Kota** dengan realisasi fisik sebanyak **2.753 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar **Rp. 57.809.792.000 (99,73%)**.

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pompa Air TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran





Pompa Air



Pompa air termasuk salah satu alat yang menjadi sahabat bagi para petani.

Pompa air membantu petani untuk memindahkan air dengan lebih mudah dan cepat. Keberadaannya juga membantu meringankan beban kerja harian untuk proses pengairan air ke seluruh tanaman.

DI Yogyakarta



Kab. Gunungkidul, Prov. DI Yogyakarta

Sumatera Utara



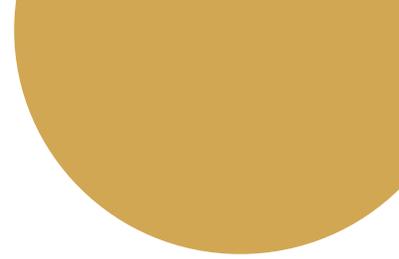
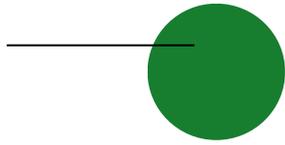
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

NTT



Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur





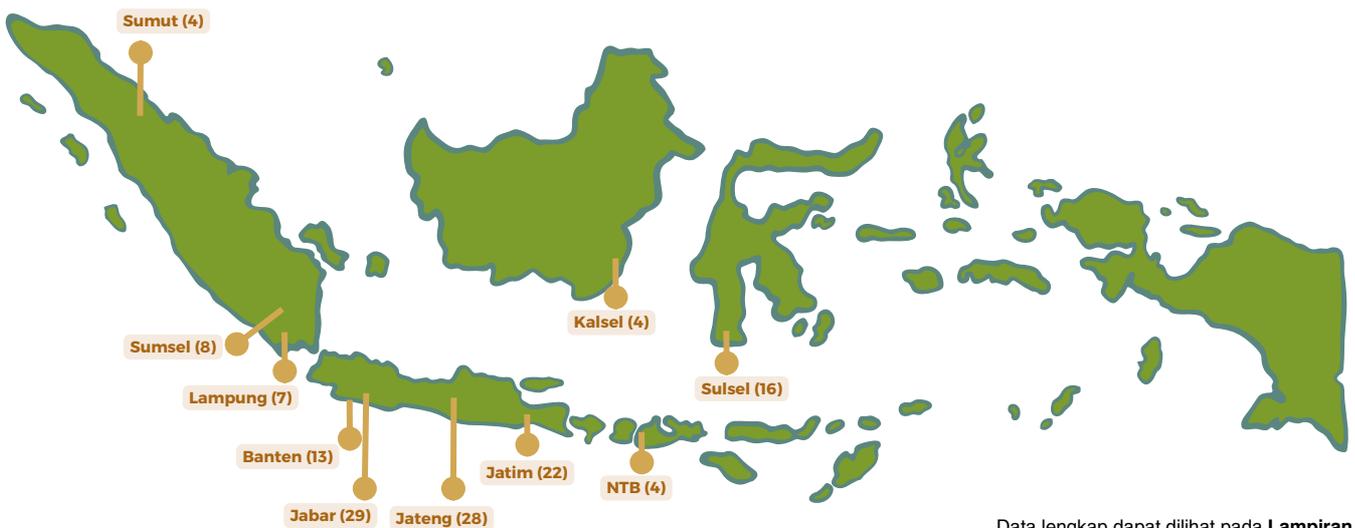
Penyediaan dan Penyaluran Pompa Air (Gernas El Nino)

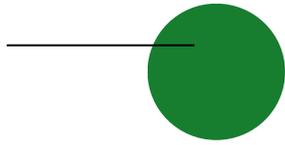
Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi Gerakan Nasional (Gernas) El Nino untuk mengantisipasi kekeringan. Gerakan ini memberikan berbagai bantuan kepada para petani berupa benih, pengairan dan pendampingan.

Pompa air termasuk salah satu alat yang menjadi sahabat bagi para petani. Pompa air membantu petani untuk memindahkan air dengan lebih mudah dan cepat. Keberadaannya juga membantu meringankan beban kerja harian untuk proses pengairan air ke seluruh tanaman.

Target Pompa Air untuk mendukung kegiatan Gerakan Nasional El Nino tahun 2023 sebanyak **135 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 3.240.000.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **10 Provinsi** dengan realisasi fisik sebanyak **135 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar **Rp. 2.742.345.100 (84,64%)**.

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pompa Air (Gernas El Nino) TA 2023





Pompa Air (Gernas El Nino)



Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi Gerakan Nasional (Gernas) El Nino untuk mengantisipasi kekeringan.

Gerakan ini memberikan berbagai bantuan kepada para petani berupa benih, pengairan dan pendampingan.

Sulawesi Selatan



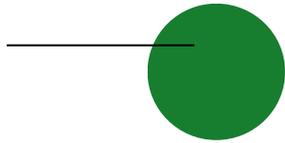
Provinsi Sulawesi Selatan

Sumatera Selatan



Provinsi Sumatera Selatan





Penyediaan dan Penyaluran Handsprayer

Handsprayer merupakan salah satu jenis alat dan mesin pertanian yang digunakan untuk kegiatan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Karenanya perannya yang utama dalam kegiatan usaha tani, *handsprayer* termasuk alat dan mesin yang banyak diminati oleh petani. Penggunaan *handsprayer* harus dilakukan dengan benar untuk menghindari kerugian tanaman dan mempertahankan kualitas lingkungan. Petani harus memahami cara menggunakan alat *handsprayer* dan memperhatikan dosis cairan yang tepat, jarak semprot, dan waktu penyemprotan untuk memastikan hasil yang maksimal dan menghindari kerugian. Meskipun *handsprayer* telah menjadi alat yang diperjualbelikan secara langsung ke petani, pemerintah masih banyak mengalokasikan anggaran pengadaan *handsprayer* untuk petani yang belum dapat membeli secara mandiri.

Target *Handsprayer* tahun 2023 sebanyak **10.266 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 10.091.478.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **29 Provinsi** dan **227 Kabupaten/Kota** dengan realisasi fisik sebanyak **10.266 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar **Rp. 10.089.412.850 (99,98%)**.

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Handsprayer TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran



Handsprayer

Handsprayer merupakan salah satu jenis alat dan mesin pertanian yang digunakan untuk kegiatan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

Handsprayer termasuk alat dan mesin yang banyak diminati oleh petani.



Sumatera Barat



Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat

Jawa Timur



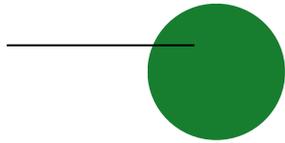
Kota Batu Malang, Prov. Jawa Timur

Jawa Barat



Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat



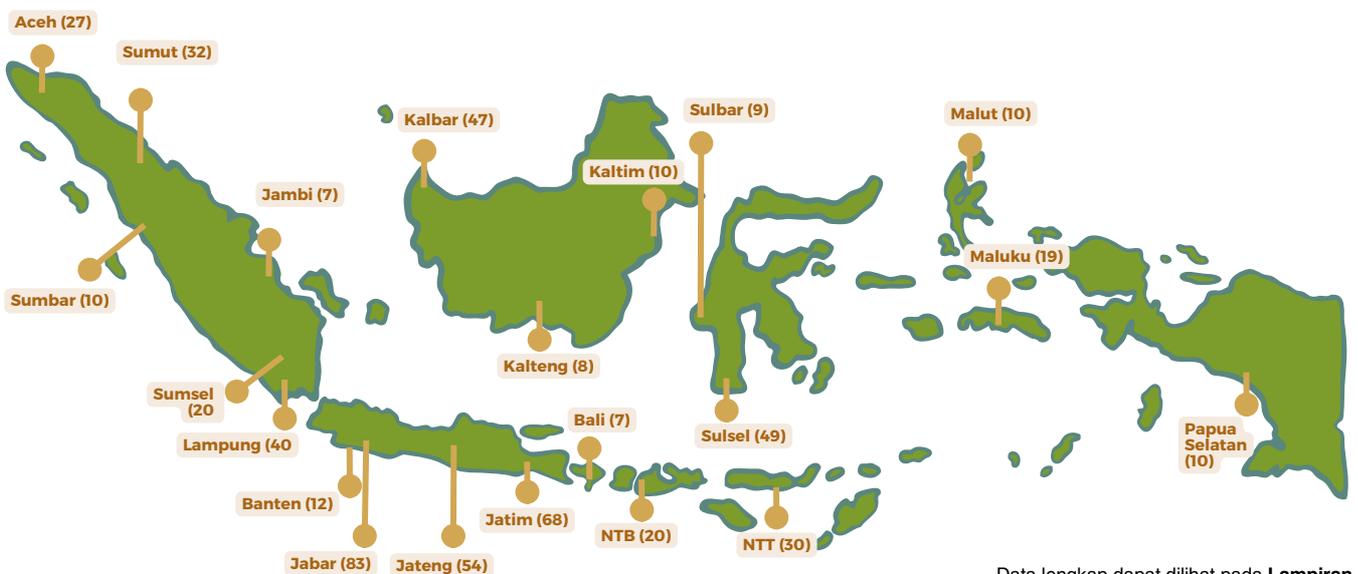


Penyediaan dan Penyaluran Kendaraan Roda 3

Bantuan kendaraan roda tiga ini bertujuan untuk mempercepat proses budidaya seperti pengangkutan pupuk maupun bibit ke lokasi tanam, termasuk mempermudah pengangkutan hasil panen untuk dijual. Sarana percepatan ini setidaknya dapat menekan biaya produksi sehingga meningkatkan nilai hasil usaha pertanian dan perkebunan. Jadi diharapkan nilai tukar petani bisa meningkat. Bantuan kendaraan roda tiga diberikan kepada kelompok yang menjalankan usaha pertanian khususnya petani yang terkendala minimnya akses jalan penghubung dari sawah atau kebun ke akses jalan besar.

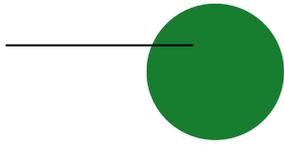
Target Kendaraan Roda 3 tahun 2023 sebanyak **572 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 20.861.698.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **21 Provinsi** dan **138 Kabupaten/Kota** dengan realisasi fisik sebanyak **572 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar **Rp. 20.857.769.500 (99,98%)**.

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Kendaraan Roda 3 TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Kendaraan Roda 3



Kendaraan roda tiga ini bertujuan untuk mempercepat proses budidaya seperti pengangkutan pupuk maupun bibit ke lokasi tanam

Sarana percepatan ini setidaknya dapat menekan biaya produksi sehingga meningkatkan nilai hasil usaha pertanian.

Banten



Kota Serang, Prov. Banten

Sumatera Barat



Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat

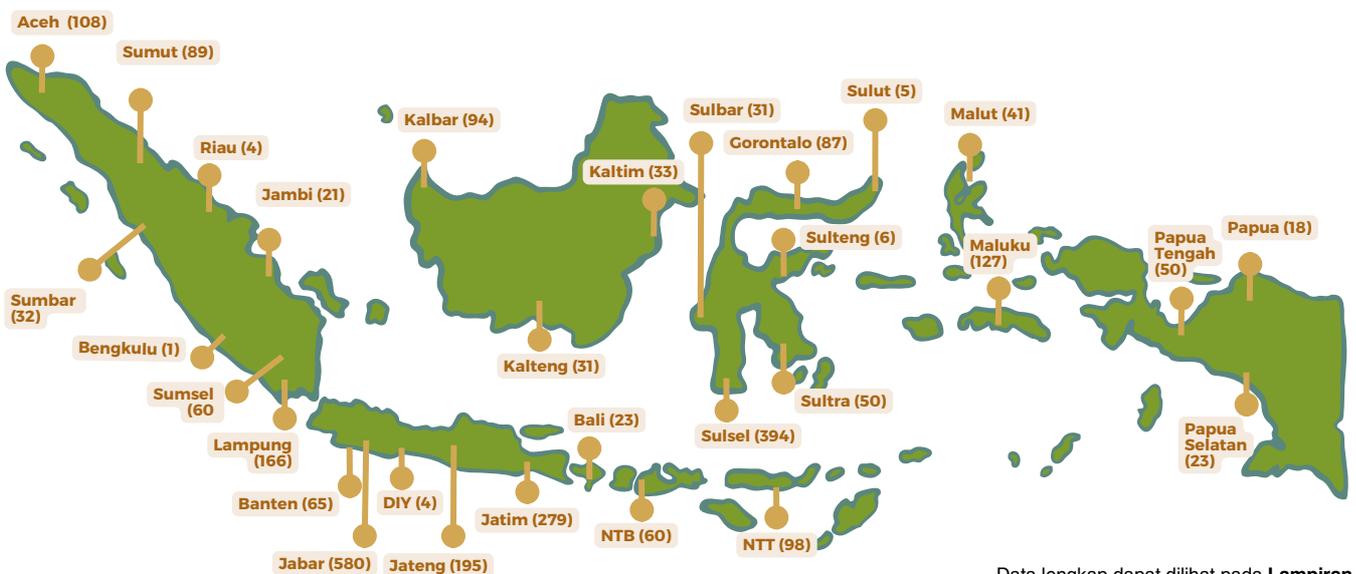


Penyediaan dan Penyaluran Cultivator

Berbeda dengan traktor roda 2 yang dapat digunakan di lahan sawah yang berair, Cultivator merupakan salah satu peralatan pertanian modern yang digunakan untuk mengolah lahan sekunder dan tanah yang tidak tergenang air, atau biasa digunakan oleh petani hortikultura (lahan kering) seperti budidaya tembakau, bawang merah, cabai, jagung, sayur-sayuran dan lain-lain. Cultivator merupakan traktor kecil atau traktor mini dengan gerak motor bensin rata-rata 5,5 HP – 6,5 HP tergantung tipe tanah tempat penanaman. Cultivator terdiri dari beberapa bagian penyangga mekanis yang di desain di sisi kanan dan kiri serta di bagian belakang.

Target Cultivator tahun 2023 sebanyak **2.775 unit** dengan pagu anggaran sebesar **Rp.43.914.375.000**. Kegiatan tersebut dialokasikan di **30 Provinsi** dan **216 Kabupaten/Kota** dengan realisasi fisik sebanyak **2.775 unit (100%)** dan realisasi anggaran sampai akhir Desember 2023 sebesar **Rp. 43.782.078.000 (99,70%)**.

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Cultivator TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Cultivator



Cultivator merupakan salah satu peralatan pertanian modern yang digunakan untuk mengolah lahan sekunder

Cultivator biasa digunakan oleh petani hortikultura (lahan kering) seperti budidaya tembakau, bawang merah, cabai, jagung, sayur-sayuran dan lain-lain.

Sulawesi Selatan



Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan

Jawa Tengah



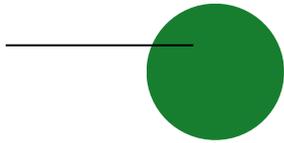
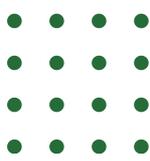
Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Sulawesi Barat



Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat





Pengawasan dan Peredaran

Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian terdiri dari Pengawasan Peredaran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian di Tingkat Penerima, dan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian.



Pengawasan Peredaran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian di Tingkat Penerima

Pada TA. 2023 telah disalurkan bantuan alat dan mesin pertanian prapanen sebanyak 23.081 unit ke titik bagi yaitu dinas lingkup pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Setelah tiba di titik bagi maka Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mendistribusikannya ke penerima manfaat yaitu Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA dan Brigade. Bukti pertanggungjawaban bahwa alat telah diterima oleh penerima bantuan adalah Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kelompok penerima bantuan sesuai dengan SK Penerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian TA. 2023 yang dilakukan *input* dan *upload* dalam aplikasi BAST Online Tahun 2023.

Dari hasil *input* dan *upload* dokumen dapat diketahui bahwa alat yang telah didistribusikan kepada kelompok penerima bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 17.028 unit atau 73,8 % dari 23.081 unit.

Rekapitulasi Penyelesaian BASTB Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian melalui Aplikasi BAST Online Tahun 2023

26,2% terdistribusi namun belum terinput BAST Online



73,8% terdistribusi dan terinput BAST Online

Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



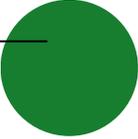
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah melakukan *monitoring* dan evaluasi (pengawasan) pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian. Kegiatan dilakukan dengan 2 cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan *monitoring* lapang ke lokasi penerima manfaat, sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan penyampaian surat permintaan laporan kepada Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan alsintan untuk menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan alsintan melalui Aplikasi BAST *Online* dan *email* Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi laporan pemanfaatan bahwa alat yang digunakan oleh petani sebesar 3.446 unit atau 89,09% dari 3.868 unit terlapor. Untuk *hand sprayer* disebabkan oleh pada saat pelaporan alat masih tersimpan di gudang dan belum didistribusikan ke penerima bantuan sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh petani sementara belum optimalnya pompa air disebabkan oleh debit air masih mencukupi. Selain itu, penyebab alat belum digunakan antara lain adalah 1) alat diterima pada saat musim tanam telah berakhir, 2) masih adanya alat yang sama dan kondisinya masih baik, 3) petani belum mengenal/belum bisa menggunakan alat yang diberikan, 4) bantuan alsintan tidak sesuai dengan lahan dan kebutuhan, 6) petani belum mampu untuk memodifikasi alat agar bisa digunakan, dan 7) belum adanya kesepakatan pengelolaan bantuan alsintan pada kelompok penerima.

Rekapitulasi Laporan Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2023





Kelembagaan

Alat dan Mesin Pertanian



Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian

Perbengkelan alsintan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pemeliharaan/perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang yang dilakukan oleh lembaga Poktan/Gapoktan/UPJA. Ruang lingkup kegiatan perbengkelan alsintan meliputi pengadaan bengkel alsintan berjalan (kendaraan pertanian roda 4) yang didalamnya terdapat peralatan dan perkakas perbengkelan (*generator*, kompresor, mesin las, bor tangan, gerinda tangan, boks penyimpanan alat, dongkrak, perlengkapan seperti kunci pas, dan lain-lain). Pada tahun 2023, target pengembangan perbengkelan alsintan sebanyak 65 unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.200.000.000.

Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan kegiatan ini mengalami perubahan. Perubahan pertama adalah pengurangan jumlah perbengkelan, dari 65 unit menjadi 11 unit dengan nilai sebesar Rp. 3.080.000.000. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan barang di penyedia tidak mencukupi. Penyedia bengkel alsintan berjalan hanya mampu memproduksi sebanyak 11 unit sampai dengan akhir tahun 2023. Perubahan kedua adalah adanya *refocussing* anggaran sehingga kegiatan perbengkelan untuk TA. 2023 tidak dapat dilaksanakan.



Taksi Alat dan Mesin Pertanian

Program Taksi Alsintan merupakan pola pengelolaan dan pemanfaatan alsintan yang perolehan dan kepemilikan alsintan baik secara individu maupun lembaga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari perbankan melalui Kredit Usaha Alsintan (KUA). Anggaran pemerintah baik pusat (APBN) maupun APBD daerah Provinsi dan Kabupaten belum sepenuhnya dapat memenuhi alsintan yang diperlukan oleh petani di wilayah Indonesia sehingga dalam upaya pemenuhan kebutuhan alsintan tersebut, pemerintah mengharapkan agar petani/Poktan/Gapoktan/UPJA yang belum mendapat bantuan Alsintan dari APBN dapat secara mandiri memenuhi atau melengkapi kebutuhan alsintannya melalui bantuan perbankan program Kredit Usaha Alsintan (KUA). Program Pengembangan dan Pengelolaan Taksi Alsintan yang dikelola meliputi jasa sewa alsintan (jasa olah tanah, jasa tanam dan jasa panen), jasa perawatan dan bengkel, serta penyediaan suku cadang.



LS PRO

Alat dan Mesin Pertanian



Sertifikasi LS Pro Alat dan Mesin Pertanian

Kegiatan sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yang telah diakui kompetensinya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yaitu LS Pro Alsintan. Produsen bisa mendapatkan sertifikat tanda SNI melalui suatu proses yang dilakukan oleh LS Pro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkupnya. Permohonan tersebut akan di proses oleh LS Pro dan akan diberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) apabila sudah memenuhi persyaratan SNI.

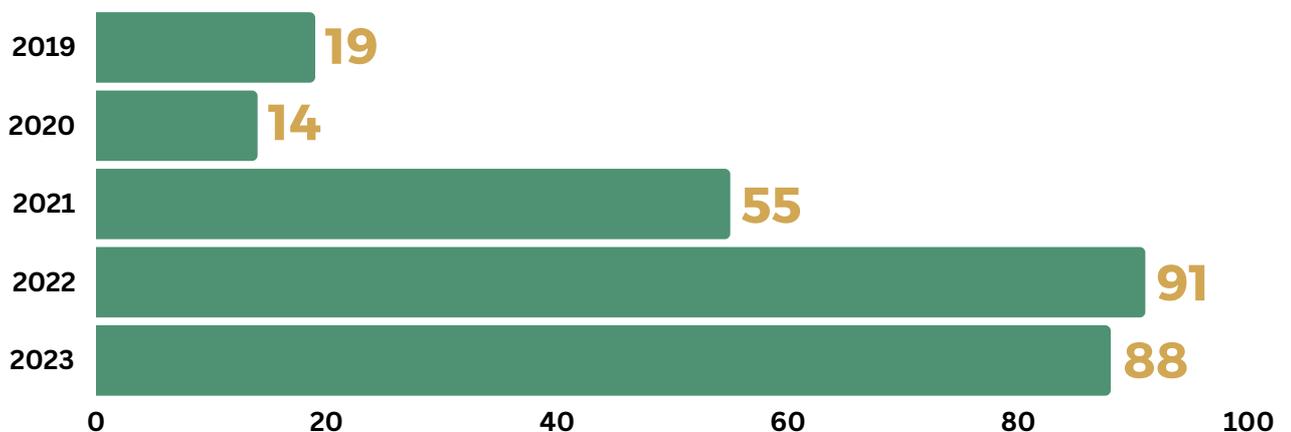
Pada tahun 2023, permohonan sertifikasi alsintan yang diajukan oleh pemohon sertifikasi sebanyak 158 Merek Tipe Model dari 16 ruang lingkup, sedangkan 20 ruang lingkup tidak dapat diproses karena permohonan produk impor dan LS Pro Alsintan belum memiliki anggaran untuk memproses permohonan produk impor.

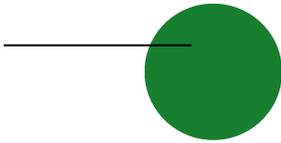


158
Permohonan

SPPT SNI yang telah diterbitkan tahun 2019 - 2023

■ Sertifikat Produk





Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan LS Pro Alat dan Mesin Pertanian

Umpan balik diperoleh melalui penyebaran kuisisioner Januari s.d Desember 2023 menggunakan Permentan No 19/Pementan/OT/080/4/2018 untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa nilai IKM sebesar 75,25% atau masuk dalam kategori B (baik). Unsur yang memiliki nilai paling rendah yaitu:



IKM kategori B (Baik)



WAKTU PELAYANAN (2,57)



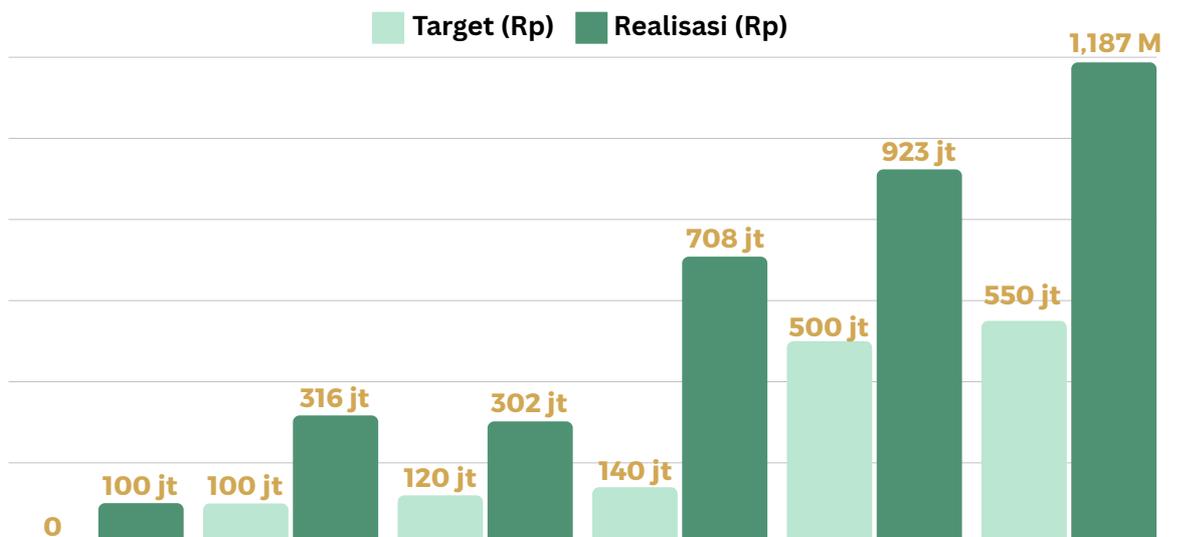
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN KELUHAN (2,57)



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LS Pro Alat dan Mesin Pertanian

Penerimaan PNBP adalah biaya sertifikasi yang ditagihkan kepada pemohon sertifikasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023. Penerimaan PNBP dari sertifikasi setiap tahunnya terjadi peningkatan. Tahun 2023, jumlah PNBP mencapai Rp. 1.187.380.270 dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 550.000.000.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LS Pro Alat dan Mesin Pertanian 2018 - 2023



-
-
- **Bab 06**

- **Direktorat**
- **Pupuk dan**
- **Pestisida**



Kinerja

Anggaran

Pagu anggaran kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 1.058.841.087.000 dengan realisasi sampai akhir Desember 2023 sebesar Rp. 1.041.146.196.615 (98,33%). Rincian pagu per output kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida TA 2023 yaitu sebagai berikut.

Realisasi Keuangan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Pupuk dan Pestisida TA 2023



REKAMBIAN/KO/LO/OUTPUT/SUB OUTPUT	PAGU		REALISASI	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
3983 Fasilitas Pupuk dan Pestisida	1.058.841.087.000	1.041.146.196.615		98,33
3983.A24 Kelembagaan	22.711.449.000	26.383.103.949		88,71
3983.A24.001 Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pupuk dan Pestisida	22.711.449.000	20.383.103.949		89,71
3983.BA3 Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.020.996.679.000	1.005.800.928.204		98,54
3983.BA3.001 Pupuk Menuju Pertanian Organik	245.995.285.000	244.050.781.952		98,81
Unit Pengolah Pupuk Organik (UPO)	222.000.000.000	225.800.000.000		98,82
Abit Pengolahan Pupuk Organik (Abit)	13.110.000.000	13.101.254.000		98,94
Belanja Operasional	10.882.280.000	9.348.887.952		85,59
3983.BA3.003 Saprodi Mendukung Peringatan Produksi Tanaman Pangan	775.000.399.000	769.762.734.252		98,28
Pupuk Organik Cair / Pupuk Hayati Cair	536.897.099.000	535.154.035.899		97,89
Silika	35.510.907.000	35.510.902.500		100,00
Dekomposer	18.486.030.000	18.486.002.600		100,00
Magnesium	39.095.800.000	39.037.739.000		98,97
Senyawa Hamat	30.300.000.000	30.284.004.000		99,95
Herbisida	40.272.000.000	40.006.927.000		99,40
Pestisida Alami	54.478.000.000	54.405.168.000		99,98
Sisa Anggaran	0,000	-		-
Manajemen Pelaporan	8.271.780.000	8.580.012.293		88,97
3983.BA4 Pelayanan Publik kepada Masyarakat	15.311.750.000	14.940.566.452		98,91
3983.BA4.001 Penerimaan Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi	15.311.750.000	14.940.566.452		98,91

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut.

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida serta pengawasan pupuk dan pestisida
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida

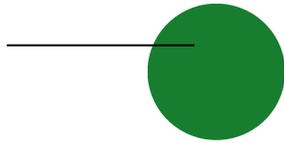


- Kegiatan penyediaan sarana produksi berupa **pupuk menuju pertanian organik** memiliki target sebanyak 1.534 unit dan terealisasi sebanyak 1.528 unit (99,61%). Kegiatan ini memiliki 2 (dua) jenis kegiatan yaitu:
 - **Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)** memiliki target sebanyak 1.111 unit dan terealisasi sebanyak 1.109 unit (99,82%).
 - **Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)** memiliki target sebanyak 423 unit dan terealisasi sebanyak 419 unit (99,05%).
- Kegiatan penyediaan **sarana produksi untuk peningkatan produksi tanaman pangan** memiliki target distribusi pupuk terhadap lahan seluas 2.712.408 ha dengan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 2.475.981 (91,28%). Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) jenis sarana produksi yaitu:
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 1.786.413 ha di 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Pupuk Silika** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 201.919 ha di 10 provinsi dan 18 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Dekomposer** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 67.376 ha di 6 provinsi dan 10 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Pupuk Magnesium (Mg)** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 67.022 ha di 6 provinsi dan 16 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Senyawa Humat** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 115.801 ha di 12 provinsi dan 21 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Herbisida** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 211.260 ha di 9 provinsi dan 25 kabupaten/kota.
 - Kegiatan penyaluran bantuan **Pestisida Alami** telah memberikan realisasi distribusi pupuk terhadap lahan seluas 26.190 ha di 8 provinsi dan 18 kabupaten/kota.
- Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi memiliki target sebanyak **11.246.965 orang** dengan realisasi sebanyak **12.396.247 orang (110,22%)**. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan (TP) di 33 satuan kerja provinsi lingkup pertanian yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Papua, Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kep. Riau, dan Kalimantan Utara.



- 
- Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 26.234.294.058.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.689.631.739.038 (97,92%). Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki target awal sejumlah 7.856.951 ton. Namun dalam perkembangannya, harga produksi pupuk mengalami kenaikan sehingga terdapat target penyesuaian berdasarkan alokasi anggaran yaitu sejumlah 6.050.056 ton. Kegiatan ini pada tahun 2023 dapat terealisasi sejumlah 6.120.169 ton (101,15%) dengan rincian jenis pupuk sebagai berikut.
 - Kegiatan penyaluran Pupuk Urea memiliki target awal sejumlah 4.642.703 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 3.701.928 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 3.655.133 ton (98,73%).
 - Kegiatan penyaluran Pupuk NPK memiliki target awal sejumlah 3.100.215 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 2.304.388 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 2.429.128 ton (105,41%).
 - Kegiatan penyaluran Pupuk NPK Formula Khusus memiliki target awal sejumlah 114.033 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 43.740 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 35.907 ton (82,09%).
 - Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi yang berbasis data eAlokasi menjadi perhatian para auditor seperti Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK. Dengan demikian, apabila tidak dilakukan upaya perbaikan tata kelolanya maka tujuan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran sulit dilakukan. Dalam upaya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, maka terus dilakukan pengembangan untuk beberapa sistem baik dalam perencanaan seperti eRDKK dan eAlokasi maupun penyaluran seperti T-Pubers, iPubers, REKAN, eVerval.
 - Proses pelayanan **pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah** selama tahun 2023 telah menerbitkan **484 nomor pendaftaran** dalam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - Proses pelayanan **pendaftaran pupuk anorganik** sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan telah diterbitkan **857 nomor pendaftaran** dalam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - Selain SK nomor pendaftaran, telah diterbitkan juga **surat izin pesanan formula khusus pupuk anorganik** sebanyak **703 surat izin** dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - Pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan monitoring serta evaluasi penyaluran pupuk dan pestisida dengan hasil pengambilan serta **analisa sampel pupuk** sebanyak **78 sampel (111,42%)** serta pengawasan pestisida dengan pengambilan dan **analisa sampel pestisida** sebanyak **76 sampel (108,51%)**.
 - Kegiatan **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** Tahun 2023 dilaksanakan melalui penyusunan kurikulum diklat PPNS Tahun 2023 dan melakukan pelatihan PPNS di Diklat Reskrimsus, Mega Mendung, Jawa Barat dengan peserta sebanyak **30 orang** PPNS yang berasal dari petugas pusat dan daerah.





Unit Pengolah Pupuk Organik UPPO

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Melalui fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara *in situ*.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut.

1. Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik
2. Tersedianya pupuk organik insitu produksi UPPO
3. Berkembangnya penggunaan pupuk organik dan berkurangnya penggunaan pupuk kimia
4. Meningkatkan kesuburan lahan karena penambahan pemakaian pupuk organik ke lahan dan berkurangnya pemakaian pupuk kimia
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan pendapatan petani serta pemberdayaan kelompok.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dialokasikan sebesar Rp. 222.200.000.000 untuk 1.111 unit di 27 provinsi dan dengan anggaran per unit nya sebesar Rp. 200.000.000. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 sebanyak 1.109 unit (99,82%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 221.800.000.000 (99,82%).

Realisasi Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran



Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)



Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong penggunaan pupuk organik di tingkat petani.

Diharapkan melalui kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), kelompok tani/gabungan kelompok tani akan mampu memproduksi pupuk organik secara insitu untuk keperluan lahan pertaniannya.

Jawa Barat



Kelompok Tani El Ittihad Reformika,
Desa Tanjungsari, Kec. Sukaresik,
Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat

Jawa Timur



Kelompok Tani Makmur Kelud, Desa
Pandantoyo, Kec. Ngancar,
Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur

Aceh



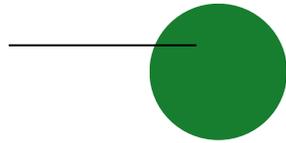
Kelompok Tani Jaya Makmur, Kab. Aceh
Utara, Prov. Nanggroe Aceh Darussalam

Sumatera Utara



Kelompok Ternak Pejuang, Kab.
Pematang Siantar, Prov. Sumatera Utara





Alat Pengolah Pupuk Organik

APPO

Kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) memiliki tujuan yaitu memproduksi pupuk organik secara insitu dengan memberikan kelengkapan peralatan untuk memproses pupuk organik insitu berupa alat pengolah pupuk organik (APPO). Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan pendapatan petani.

Kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) memiliki perbedaan dengan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yaitu sebagai berikut.

Perbedaan kegiatan UPPO dan APPO

Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
<p>Dana yang telah ditransfer ke kelompok penerima akan dibelanjakan sesuai RUK yang telah disusun dengan 5 (lima) komponen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Rumah Kompos beserta bak fermentasi• Pembangunan Kandang Komunal• Ternak Sapi/Kerbau• Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)• Kendaraan Roda 3	<p>Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) berupa alat untuk memproses pupuk organik insitu untuk kelompok-kelompok tani yang berkonsentrasi melakukan pengolahan limbah hasil pertanian untuk dijadikan pupuk organik insitu.</p>

Syarat lokasi penerima bantuan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) diarahkan pada daerah yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos terutama produk tanaman organik, kotoran ternak/hewan dan sampah organik pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat terutama pada kawasan pengembangan Desa Organik. Kegiatan UPPO dan APPO memiliki perbedaan sehingga kelompok tani penerima Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) harus berbeda dari kelompok tani penerima kegiatan UPPO.



Bantuan pemerintah berupa kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2023 tentang kebijakan pupuk organik yaitu mengurangi ketergantungan pemakaian pupuk kimia dengan memaksimalkan penggunaan pupuk organik. Melalui kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) diharapkan ketersediaan pupuk organik untuk budidaya organik dapat terjamin. Kelompok tani penerima bantuan diharapkan dapat terus melaksanakan produksi pupuk organik insitu. Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman.

Kegiatan penyediaan alat pengolah pupuk organik (APPO) termasuk pada kategori bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan dengan mekanisme transfer barang ke kelompok tani penerima bantuan. Spesifikasi bantuan alat pengolah pupuk organik (APPO) yaitu sebagai berikut.

- Kapasitas minimal memenuhi klasifikasi sedang (500 - 1.000 kg/jam)
- Bahan pisau berupa baja
- Motor penggerak memiliki daya minimum 8,5 HP yang sesuai dengan kapasitas APPO
- Motor penggerak mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI)
- APPO dilengkapi dengan hasil uji yang masih berlaku dari institusi berwenang.

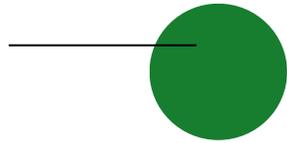
Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dialokasikan sebesar Rp. 222.200.000.000 untuk 423 unit di 17 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 sebanyak 419 unit (99,05%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.107.454.000 (99,96%).

Realisasi Pembangunan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**





Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)



Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong penggunaan pupuk organik di tingkat petani.

Diharapkan melalui kegiatan pengembangan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), kelompok tani/gabungan kelompok tani akan mampu memproduksi pupuk organik secara insitu untuk keperluan lahan pertaniannya.

Kalimantan Barat



Kelompok Tani Milenial, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat

NTT



Kelompok Tani Watojong, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur

Maluku Utara



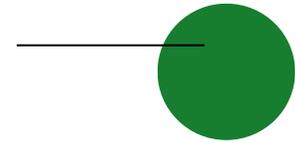
UPKK Maju Bersama, Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara

Jawa Tengah



Kelompok Tani Argomulyo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah





Pupuk Organik

Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Padat/Pupuk Hayati Padat/Pembenah Tanah

Pengembangan pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan kualitas tanah yang pada umumnya tergolong rendah dimana permasalahan tanah yang miskin hara dan bahan organik, kemasaman tanah tinggi, dan sifat fisik tanah yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Pupuk organik dan hayati baik padat maupun cair berfungsi untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

Aplikasi pupuk organik berpengaruh terhadap perubahan sifat kimia tanah dan produksi tanaman. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pupuk organik dapat memperbaiki kesuburan tanah. Jenis komoditas pangan yang akan diberikan bantuan saprodi ini bukan hanya padi saja tetapi termasuk tanaman sorgum, ubi kayu, dan jagung.

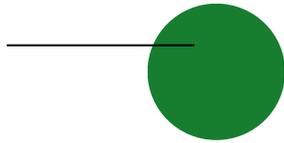
Pada tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan pengadaan saprodi mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dengan bantuan pupuk organik berupa Pupuk Organik Cair (POC), Pupuk Hayati Cair (PHC), Pupuk Hayati Padat (PHP), Pupuk Organik Padat (POP) dan Pembenh Tanah Organik Cair (PTOC). Melalui bantuan pupuk organik tersebut didapatkan peningkatan produktivitas semula **4,67 ton/ha** dari rata-rata produktivitas lokasi bantuan menjadi **5,97 ton/ha** atau terdapat peningkatan sebesar **1,3 ton/ha** yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Evaluasi Bantuan Pupuk Organik Tahun 2021 - 2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Prov	Kab	Luas Lahan	Jenis Bantuan					Produktivitas (ton/ha)		
					POC (lt)	PHC (lt)	PHP (kg)	POP (kg)	PTOC (lt)	Sebelum	Sesudah	Peningkatan
2021	268.223.850.000	22	121	825.364	408186	3.377.066	842190					
2022	223.708.536.000	25	135	741.931	411156	2.798.361	1.419.930	69.645	4,67	5,97	1,3	
Total	491.933.386.000			1.667.295	819.342	6.175.427	842.190	1.419.930	69.645			

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus dibarengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas perlu untuk ditopang oleh penyediaan sarana produksi pupuk organik untuk menjaga keberlanjutan pertanian Indonesia.





Sebagian besar tanah sawah di Indonesia telah jenuh pupuk kimia (kadar P dan K sedang sampai tinggi) dan rendahnya pengembalian bahan organik tanah menyebabkan populasi mikroba fungsional tersebut menurun. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk membantu peningkatan kesuburan tanah, keragaman dan populasi mikroorganisme fungsional tanah tersebut dengan memberikan pupuk organik padat atau cair.

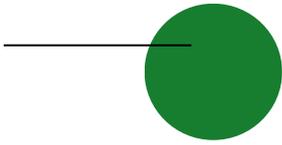
Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.

Masing-masing jenis pupuk organik padat dan cair memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan pupuk organik cair adalah mudah dibuat, tidak bulky, mudah penyimpanan dan transportasinya serta aplikasinya. Kelemahannya adalah kadar hara makro dan mikro kecil, maka diperlukan kecermatan pada waktu dan takaran aplikasi.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Padat/Pupuk Hayati Padat/Pembenah Tanah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 536.497.069.000 di 26 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan dampak seluas 1.786.413 ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 525.154.435.869 (97,89%).

Realisasi Kegiatan Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Padat/Pupuk Hayati Padat/Pembenah Tanah TA 2023





Pupuk Silika (SiO_2)

Mendukung Produksi Tanaman Pangan

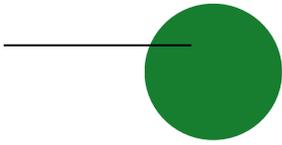
Pupuk Silika merupakan pupuk mikro yang berperan aktif membantu pertumbuhan pada masa vegetatif. Pupuk silika sangat bermanfaat bagi tanaman padi. Salah satu manfaat silika adalah memperkuat dinding sel tanaman sehingga ulat dan hama penghisap akan mengalami kerusakan mulut ketika mencoba memakan tanaman yang sudah diberikan silika. Aplikasi di masa vegetatif dan generatif untuk mencegah serangan hama sehingga menghemat biaya pestisida. Selain memperkuat batang tanaman padi sehingga tahan rebah, pupuk silika juga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen padi. Pupuk silika merupakan pupuk yang mudah larut dan mengandung minimal 25% SiO_2 .

Metode pelaksanaan bantuan ini yaitu Direktorat Pupuk dan Pestisida melalui pengiriman barang berupa pupuk mikro silika kepada kelompok tani/gapoktan/penerima bantuan berdasarkan CPCL yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pupuk Silika (SiO_2) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 56.619.927.000 di 10 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan dampak seluas 201.919 ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.619.925.500 (100%).

Realisasi Kegiatan Pupuk Silika TA 2023





Dekomposer

Mendukung Produksi Tanaman Pangan

Dekomposer berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah. Pupuk hayati perombak bahan organik terdiri atas bentuk padat dan cair. Menurut fungsinya dekomposer adalah pendekomposisi bahan organik. Kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah yang optimal dibutuhkan untuk mengembalikan produktivitas lahan kembali seperti semula dengan memberikan dekomposer dan pupuk hayati dimana keduanya berperan sebagai pembangkit kehidupan tanah, penyubur tanah dan penyedia nutrisi tanaman.

Dekomposer dibutuhkan untuk semua jenis tanaman di lokasi daerah intensifikasi. Fungsi dekomposer adalah pendekomposisi bahan organik (dekomposer), sehingga fungsi ini juga terdapat pada pupuk hayati disamping untuk meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan tanah.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Dekomposer mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.486.080.000 di 5 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan dampak seluas 67.376 ha dengan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp. 19.485.922.600 (99,99%).

Realisasi Kegiatan Dekomposer TA 2023



Data lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**



Pupuk Magnesium (Mg)

Mendukung Produksi Tanaman Pangan

Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar. Unsur hara makro ini terdiri dari unsur hara makro bebas yang ketersediaannya sumbernya tak terbatas di alam dan unsur hara makro terbatas yang ketersediaannya sumbernya terbatas dan sering dibutuhkan penambahan melalui pupuk. Unsur hara yang termasuk dalam golongan unsur hara makro adalah Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Sulfur (S).

Unsur hara makro Magnesium (Mg) adalah unsur inti dari klorofil yang amat berperan penting dalam fotosintesis. Gejala kekurangan Mg ditandai dengan warna hijau yang tidak merata, terlihat lebih jelas pada daun yang tua karena Mg sebagai unsur yang disalurkan ke bagian yang lebih memerlukannya. Selain zat hijau daun (klorofil), Magnesium (Mg) juga memiliki peran dalam pembentukan karbohidrat, lemak dan senyawa minyak untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Peran lainnya yang dimiliki Magnesium (Mg) adalah sebagai unsur transportasi Fosfat di tanaman. Tanaman yang kekurangan unsur hara makro akan menunjukkan gejala defisiensi dan pertumbuhan tanaman tidak normal sehingga menyebabkan penurunan hasil produksi.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pupuk Magnesium (Mg) dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.135.602.000 di 6 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan dampak seluas 67.022 ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.127.739.000 (99,97%).

Realisasi Kegiatan Pupuk Magnesium TA 2023



Asam Humat

Mendukung Produksi Tanaman Pangan

Asam humat adalah salah satu dari tiga bahan penyusun zat humat yang merupakan komponen pembentuk humus. Humus itu sendiri adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi yang terbentuk dari pelapukan bahan organik, seperti daun dan batang pohon. Asam humat diperoleh melalui proses ekstraksi humus (humifikasi). Oleh karena strukturnya terdiri dari campuran senyawa organik, maka asam humat memiliki kemampuan untuk menstimulasi dan mengaktifkan proses biologi dan fisiologi pada organisme hidup di dalam tanah. Hal ini menyebabkan asam humat bersifat lebih sebagai *soil conditioner* (pembenah tanah).

Asam humat dapat memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah sehingga, pengaplikasian asam humat dapat memperbaiki kondisi tanah yang sudah terdegradasi dan meminimalisir kemungkinan kehilangan nutrisi dari pupuk organik akibat pencucian atau penguapan. Selain itu, asam humat juga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi pemupukan karena dapat mengikat dan mengatur pelepasan hara sesuai kebutuhan tanaman. Asam humat dibutuhkan untuk semua jenis tanaman, terutama di lahan yang tanahnya masam yang berguna untuk meningkatkan pH tanah dengan ketentuan dosis 5 liter/ha.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Asam Humat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.300.000.000 di 12 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan dampak seluas 115.801 ha dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 30.284.004.000 (99,95%).

Realisasi Kegiatan Asam Humat TA 2023



Herbisida

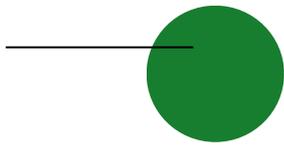
Mendukung Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan

Dalam rangka menunjang program Kementerian Pertanian untuk pengamanan produksi pertanian maka diperlukan sarana produksi yang dapat mendukung program tersebut salah satunya yaitu herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma yang mengganggu tanaman budidaya. Berdasarkan mekanisme kerjanya, herbisida dapat dibedakan menjadi herbisida kontak dan herbisida sistemik. Herbisida kontak bekerja dengan cara mengganggu proses fotosintesis sehingga gulma yang terkena herbisida kontak akan langsung mati. Sementara itu, herbisida sistemik bekerja dengan cara mengganggu enzim yang berperan dalam pembentukan asam amino dan menyebar ke seluruh jaringan sehingga gulma akan mati sampai ke akar-akarnya. Herbisida diaplikasikan pada gulma pra tumbuh dan purna tumbuh. Bantuan saprodi herbisida bertujuan untuk membantu petani pada saat persiapan lahan pertanian.

Bantuan ini bersifat stimulan kepada gapoktan/poktan dengan lokasi yang telah diverifikasi. Dosis yang diberikan disesuaikan dengan harga herbisida dan ketersediaan anggaran. Apabila rekomendasi dosis dari merek herbisida yang digunakan sebagai bantuan belum terpenuhi, maka penerima bantuan dihimbau untuk memenuhi secara swadaya. Kisaran dosis untuk herbisida yaitu 3-4 liter/ha.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Herbisida telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.272.000.000 di 9 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan dampak seluas 211.260 ha dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 40.035.527.000 (99,41%).





Pestisida Alami

Mendukung Pengamanan Produksi Tanaman Pangan

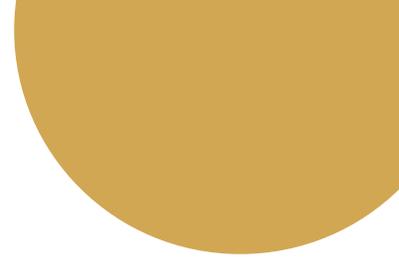
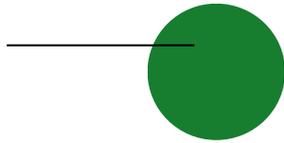
Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan gulma, hama dan penyakit tanaman masih sangat besar. PHT atau Pengendalian Hama Terpadu adalah sebuah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup.

Informasi Kerugian Kehilangan Produksi Akibat OPT

Berdasarkan data dari Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOT) Jatisari, prakiraan serangan OPT utama pada tanaman padi di Indonesia pada musim kemarau (MT Apr 2022 - Sep 2022) yaitu sebagai berikut.

NO	OPT	RAMALAN SERANGAN OPT MT 2022 (HA)	KEJADIAN SERANGAN OPT 2022 (HA)	RASIO KEJADIAN SERANGAN OPT THD RAMALAN (%)
1	PBP	63.661	35.543,22	55.80
2	WBC	22.189	12.825,49	57.80
3	Tikus	61.964	28.787,62	46.50
4	Tungro	3.999	14.356,91	359.00
5	Blas	21.870	12.431,87	56.80
6	BLB	28.408	18.641,37	65.60
Total		202.091	122.586,50	60.70



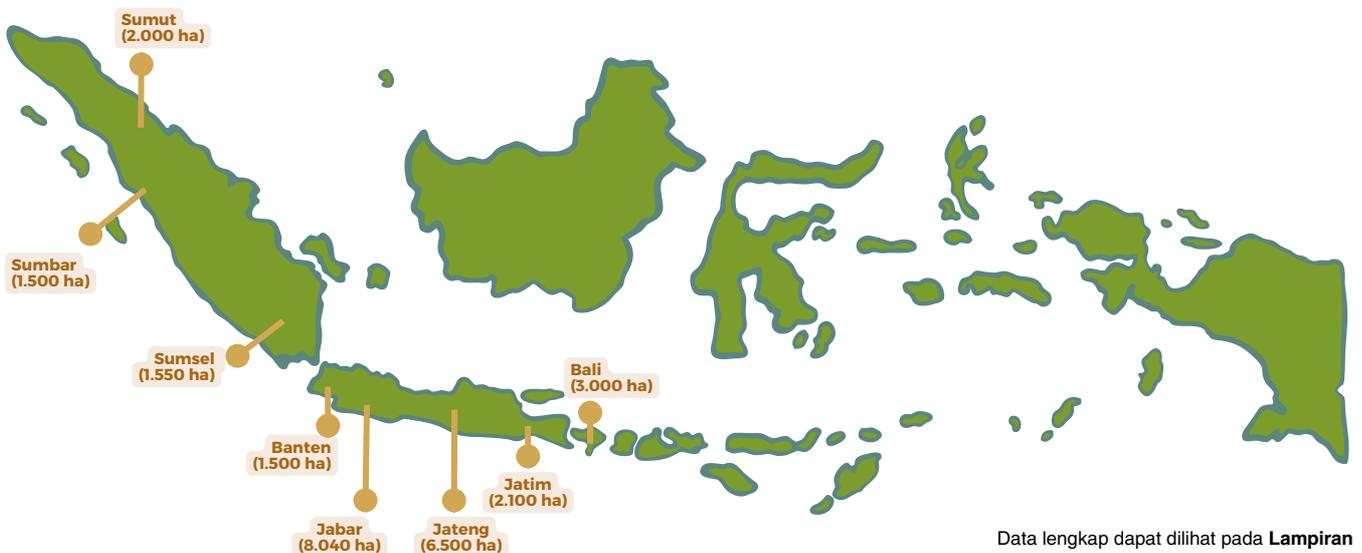


Berdasarkan hasil evaluasi yang disajikan pada tabel tersebut, diketahui bahwa kejadian luas serangan OPT Utama Padi pada MT 2022 (April-September) secara nasional adalah seluas 122.586,5 ha atau sebesar 60,7% dari luas prakiraannya yaitu 202.091 ha. Kejadian serangan hama PBP adalah 35.543,22 ha, kejadian serangan hama WBC seluas 12.825,49 ha, kejadian serangan hama tikus 28.787,62 ha, kejadian serangan tungro 14.356,91, kejadian serangan blas 12.431,87 ha dan kejadian serangan BLB adalah 18.641,37 ha. Kejadian serangan OPT padi yang melebihi angka ramalan (di atas 100%) adalah serangan tungro. Dengan adanya data ramalan tersebut, kejadian serangan OPT pada tanaman padi pada tahun 2023 dapat ditekan salah satunya pengendalian OPT dengan ramah lingkungan (pengendalian hayati) diantaranya pengendalian pestisida alami.

Pestisida sebagai salah satu teknik pengendalian yang diaplikasikan apabila telah mencapai batas ambang ekonomi. Penggunaan pestisida alami dinilai aman terhadap pengguna dan lingkungan karena terbuat dari bahan-bahan alami. Selain itu juga, pestisida alami minim residu pada komoditas yang diaplikasikan. Pestisida alami juga dapat mencegah serangga memakan tanaman, menghambat reproduksi serangga, mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga, dan mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri.

Pada tahun anggaran 2023 kegiatan Pestisida Alami telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.418.000.000 di 8 provinsi. Realisasi kegiatan sampai dengan akhir 2023 memberikan dampak seluas 26.190 ha dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 54.405.168.000 (99,98%).

Realisasi Kegiatan Pestisida Alami TA 2023



Kebijakan Tatakelola Pupuk Bersubsidi

Dana subsidi pupuk tahun 2023 sesuai dengan DIPA BUN Subsidi Pupuk TA 2023 Tanggal 03 Januari 2023 sebesar Rp. 25.276.635.119.000, kemudian direvisi dengan DIPA Tanggal 13 Desember 2023 menjadi sebesar Rp. 41.645.132.425.000 kemudian direvisi dengan DIPA Revisi ke 02 tanggal 22 Desember 2023 menjadi sebesar Rp. 42.602.791.364.000.

Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 26.234.294.058.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.689.631.739.038 (97,92%). Kegiatan Pupuk Bersubsidi memiliki target awal sejumlah 7.856.951 ton. Namun dalam perkembangannya, harga produksi pupuk mengalami kenaikan sehingga terdapat target penyesuaian berdasarkan alokasi anggaran yaitu sejumlah 6.050.056 ton. Kegiatan ini pada tahun 2023 dapat terealisasikan sejumlah 6.120.169 ton (101,15%) dengan rincian jenis pupuk sebagai berikut.

- Kegiatan penyaluran Pupuk Urea memiliki target awal sejumlah 4.642.703 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 3.701.928 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 3.655.133 ton (98,73%).
- Kegiatan penyaluran Pupuk NPK memiliki target awal sejumlah 3.100.215 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 2.304.388 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 2.429.128 ton (105,41%).
- Kegiatan penyaluran Pupuk NPK Formula Khusus memiliki target awal sejumlah 114.033 ton dan target penyesuaian anggaran sejumlah 43.740 ton. Kegiatan ini memiliki realisasi sejumlah 35.907 ton (82,09%).

Realisasi Keuangan Pupuk Bersubsidi TA 2023

Uraian	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urea	11.670.389.795.000	11.543.520.032.814	98,91
NPK	14.351.997.693.000	13.946.265.377.725	97,17
NPK Formula Khusus	211.906.570.000	200.086.328.499	94,42
Jumlah Subsidi Pupuk TA 2023	26.234.294.058.000	25.689.631.739.038	97,92
Kurang Bayar Subsidi Pupuk TA 2022	16.368.497.306.000	16.367.818.320.584	99,99
Jumlah	42.602.791.364.000	42.057.450.059.622	98,72

Penyaluran Pupuk Bersubsidi per Jenis Pupuk Tahun 2023

Uraian	Alokasi Awal (Ton)	Alokasi Penyesuaian Anggaran (Ton)	Realisasi (Ton)	%
Urea	4.642.703	3.701.928	3.655.133	98,73
NPK	3.100.215	2.304.388	2.429.128	105,41
NPK Formula Khusus	114.033	43.740	35.907	82,09
Jumlah	7.856.951	6.050.056	6.120.169	101,15



Pengembangan Sistem Pupuk Bersubsidi

Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi yang berbasis data eAlokasi menjadi perhatian para auditor seperti Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK. Dengan demikian, apabila tidak dilakukan upaya perbaikan tata kelolanya maka tujuan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran sulit dilakukan. Dalam upaya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, maka terus dilakukan pengembangan untuk beberapa sistem baik dalam perencanaan seperti eRDKK dan eAlokasi maupun penyaluran seperti T-Pubers, iPubers, REKAN, eVerval.



e-RDKK



e-Alokasi



T-Pubers



I-Pubers



Rekan



e-Verval

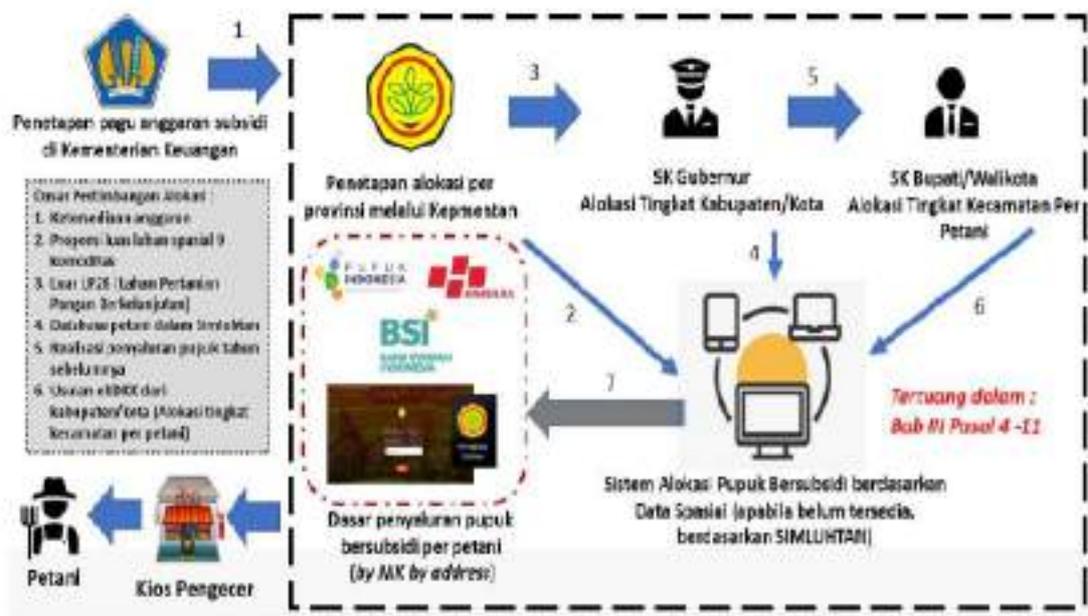
Sistem eRDKK dan eAlokasi

Berdasarkan rekomendasi dari Ombudsman dan Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri RI bahwa penghimpunan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui sistem eRDKK masih perlu dilakukan sehingga untuk tahun 2024 mekanisme pengusulan pupuk bersubsidi tetap *bottom up* yang diawali dengan penginputan data usulan kebutuhan pupuk bersubsidi oleh Tim Admin Kecamatan melalui sistem eRDKK yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang sampai pengesahan Kepala Dinas. Adapun kriteria petani dan jenis pupuk yang diusulkan masih mengacu pada Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Petani harus terdaftar dalam Simluhtan yang terintegrasi dengan Dukcapil. Sosialisasi terkait penginputan eRDKK dilakukan secara online pada Tanggal 3 November 2023 dan offline pada Tanggal 8 s/d 10 November 2023 di Hotel Swissbelcouth Bogor, Jawa Barat. Batas waktu penginputan eRDKK dilakukan pada Tanggal 3 November s/d 5 Desember 2023 dan diperpanjang sampai dengan Tanggal 15 Desember 2023. Tatacara penginputan eRDKK tahun 2024 hampir sama dengan penginputan eRDKK tahun 2023.



Setelah Kepmentan Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 terbit, untuk mekanisme alokasi dilakukan secara top down yang dihitung secara proporsional dan disesuaikan dengan alokasi Nasional dimana data alokasi tersebut berada dalam sistem eAlokasi. Setiap provinsi akan menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Gubernur dan kabupaten/kota akan menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Bupati/Walikota.

Mekanisme Penetapan Alokasi melalui sistem e-Alokasi



Integrasi Kartu Tani dengan T-Pubers

Integrasi data antara kartu tani dengan T-Pubers merupakan salah satu rekomendasi BPK RI. Pada awal tahun 2023 integrasi data kartu tani dengan T-Pubers sudah dilakukan. Integrasi yang dilakukan adalah integrasi terhadap transaksi, kartu tani digunakan hanya untuk petani/NIK yang sudah pernah melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani/Kartu Tani Digital pada tahun 2022 (data bersumber dari Bank), dimana NIK dimaksud akan di blokir dan tidak dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP. Bagi petani yang belum pernah melakukan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dapat melakukan transaksi penebusan menggunakan KTP. Sedangkan untuk integrasi stok akan dilakukan pada tahun 2024.



Sistem T-Pubers, iPubers, REKAN dan eVerval

Untuk tahun 2023, sistem penyaluran seperti T-Pubers, REKAN dan eVerval tidak mengalami pengembangan, hanya ada penambahan sistem untuk metode penebusan dengan menggunakan iPubers yang diberlakukan piloting untuk 3 (tiga) provinsi, yaitu : Provinsi Riau, Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan mulai pada bulan Juni 2023 dan piloting diperluas menjadi 6 (enam) provinsi dengan tambahan Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mulai pada bulan September 2023. Untuk tahun 2024, rencananya penebusan dengan KTP hanya menggunakan 1 (satu) sistem yaitu iPubers.

Tata Cara Login Aplikasi i-Pubers



Pemindaian KTP Petani pada Aplikasi i-Pubers



Proses Penginputan Transaksi dan Pengunggahan Dokumentasi Bukti Transaksi

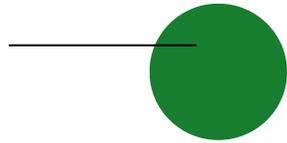


Cara Mengecek Stok Pupuk Bersubsidi di Aplikasi iPubers



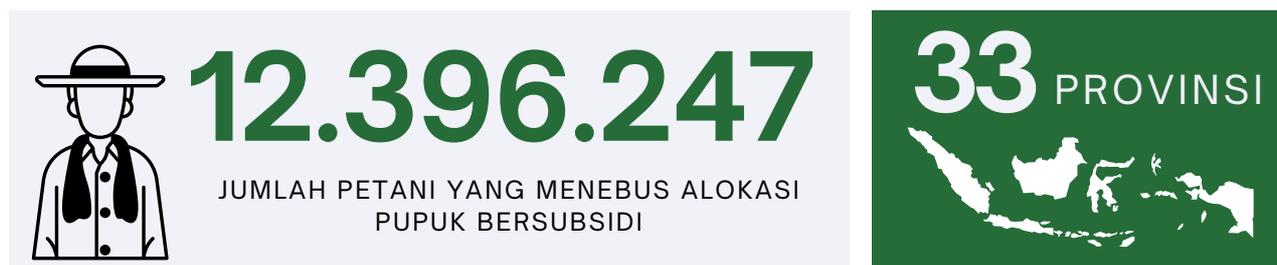
Tata Cara Mengecek Alokasi Petani yang Ada di Dalam Kios





Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi

Kegiatan Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi merupakan fasilitasi dalam rangka pengelolaan pupuk bersubsidi di daerah mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan yaitu Penetapan penerima pupuk bersubsidi diperlukan setiap tahun, karena alokasi pupuk bersubsidi tergantung ketersediaan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian keuangan. Setelah pagu ditetapkan Kementerian Pertanian menetapkan alokasi per provinsi melalui Kepmentan, selanjutnya Gubernur menetapkan alokasi per Kabupaten/Kota, selanjutnya lagi Bupati/Walikota menetapkan SK Alokasi per per kecamatan dan per petani. Berdasarkan data e-Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2023 jumlah petani yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sejumlah 15.067.191 orang, yang tersebar di 5.931 kecamatan di 480 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi dengan realisasi sebagai berikut.

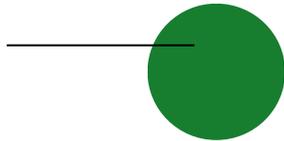


Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut peraturan tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor:

- Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai.
- Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan/atau
- Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, kakao.

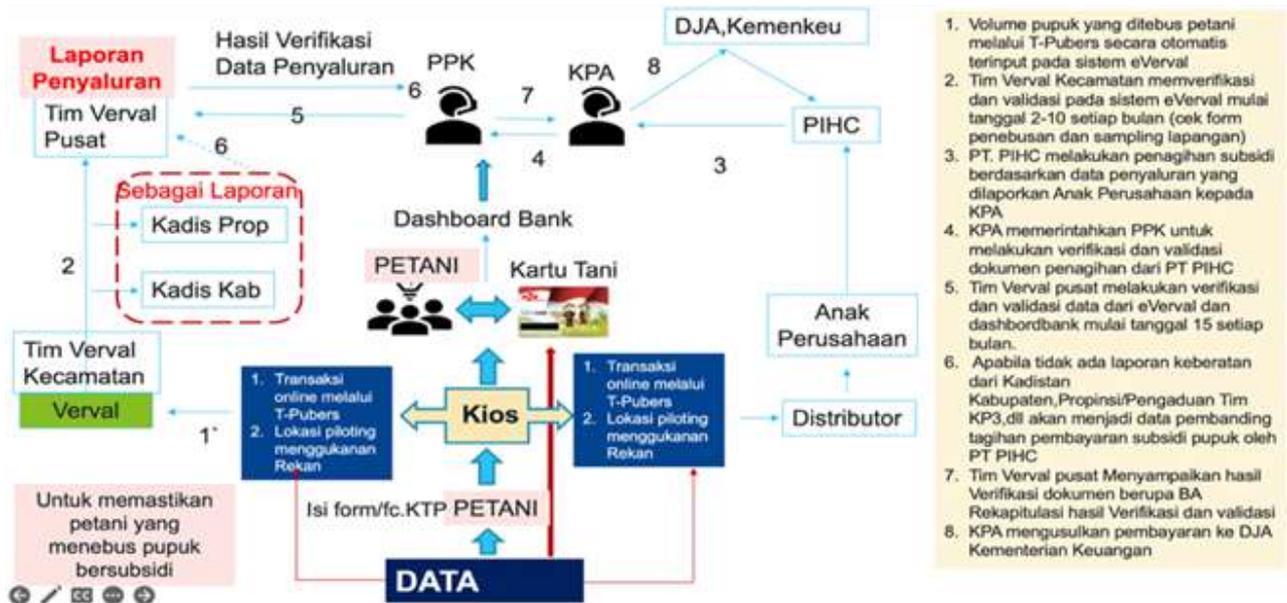
Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektare.





Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat. Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara singkat sebagaimana gambar di bawah ini.

Verifikasi, Validasi, Penyaluran dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi



Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi perlu dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi ke tingkat petani dapat terpantau. Adapun wilayah sampling verifikasi lapangan sebagai berikut.

Wilayah Sampling Verifikasi Lapangan Tahun 2023



Data lengkap dapat dilihat pada Lampiran



Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah



Permohonan Pendaftaran Pupuk dan Pembenah Tanah

Proses pelayanan pendaftaran **pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah** selama tahun 2023 telah menerbitkan 484 nomor pendaftaran dalam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara *online* dengan rincian sebagai berikut.

442	SK Pengalihan Nomor Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah	18	SK Perubahan Nomor Kemasan
6	SK Pengalihan Nomor Pendaftaran	4	SK Perubahan Warna
14	SK Perubahan Nama Dagang		

Proses pelayanan pendaftaran **pupuk anorganik** sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan telah diterbitkan 857 nomor pendaftaran dalam Surat Keputusan (SK) Persetujuan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara *online* dengan rincian sebagai berikut.

647	SK Pendaftaran Nomor Pupuk Organik	41	SK Perubahan Nomor Kemasan
47	SK Pengalihan Nomor Pendaftaran	40	SK Perubahan Produsen
43	SK Perubahan Nama Dagang	12	SK Perubahan Warna

Selain SK nomor pendaftaran, telah diterbitkan juga surat izin pesanan formula khusus pupuk anorganik sebanyak 703 surat izin dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

703





Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pembenh Tanah

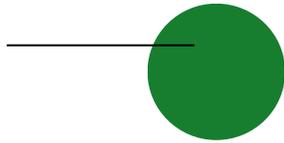
Kegiatan ini dilaksanakan ke lembaga uji yang bertujuan memantau proses pengujian mutu maupun efektivitas yang sedang berlangsung serta kesiapan lembaga uji tersebut untuk menerima pengujian. Sebagian besar lembaga uji yang dikunjungi telah melaksanakan pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2017 untuk pupuk anorganik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 untuk pupuk organik, pupuk hayati dan pembenh tanah. Lembaga uji yang dikunjungi adalah lembaga uji yang tertera di Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/OT.050/5/2018, Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 dan Nomor 262/KPTS/SR.310/M/4/2019. Lembaga uji tersebut diantaranya adalah BPTP NTB, BPTP DIY, Sucofindo Kalimantan Tengah, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Padjajaran.



Pertemuan Tim Teknis Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pembenh Tanah

Kegiatan pertemuan tim teknis pelayanan pendaftaran pupuk dan pembenh tanah rutin dilakukan dengan agenda utama penyusunan draft revisi kepmentan Nomor 209/Kpts/SR.320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Anorganik. Dalam rangka mendukung penyusunan draft tersebut juga dilakukan pertemuan Forum Group Discussion (FGD) sebanyak 2 kali membahas tentang dinamika pupuk nano dan tentang penyusunan persyaratan teknis minimal untuk pendafatran pupuk nano. Pertemuan FGD dilakukan dengan mengundang praktisi pupuk nano dari IPB, UGM dan BRIN dengan tujuan mendapatkan masukan terhadap draft revisi kepmentan tentang persyaratan teknis minimal pupuk dan pembenh tanah untuk pupuk nano. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta dan Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Setelah FGD dan tim teknis melakukan pertemuan rutin kembali untuk memfinalkan draft kepmentan yang baru kemudian dilaksanakan sosialisasi kepada Asosiasi Produsen Pupuk dan Pembenh Tanah yaitu Cropcare dan Croplife di Hotel Alana Sentul Bogor.





Fasilitasi Pendaftaran Pestisida

Pendaftaran pestisida merupakan salah satu bagian dari pengelolaan pestisida yang bertujuan untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida melalui proses evaluasi atau kajian ilmiah yang didasarkan pada efektivitas dan keamanan lingkungan. Karena sifat pestisida yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, pestisida harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Untuk itu, pendaftaran pestisida merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan pestisida.

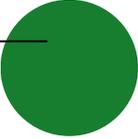
Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien dan transparan, guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan kepada pelaku usaha, maka sejak bulan November tahun 2014 proses pendaftaran pestisida dilakukan secara online melalui <http://perizinan.pertanian.go.id>.



perizinan.pertanian.go.id

Kegiatan pendaftaran pestisida untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi penyerahan dokumen persyaratan administrasi, teknis dan lainnya, pemeriksaan, penilaian dan evaluasi dokumen oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida dan evaluasi pendaftaran oleh Komisi Pestisida melalui rapat pleno sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan nomor pendaftaran dan izin pestisida.





Tim Teknis Pestisida

Dalam menetapkan kebijakan pestisida, Menteri Pertanian dibantu oleh Komisi Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 309/Kpts/OT.050/4/2018 tentang Komisi Pestisida. Peraturan tersebut menetapkan pula Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida yang anggotanya terdiri dari perguruan tinggi IPB, ITB, UI, UGM, LIPI dan Litbang Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pertanian.



Rapat Tim Teknis

Pada tahap awal evaluasi dokumen pendaftaran pestisida dilakukan oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida melalui rapat Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida. Tugas Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida yaitu menyiapkan bahan evaluasi data teknis/informasi dalam rangka pendaftaran serta melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan pendaftaran pestisida dan pestisida yang telah terdaftar/telah mendapat izin Menteri Pertanian. Selain itu, Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Ketua Komisi Pestisida. Ketua Komisi Pestisida dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Menteri Pertanian.

Rapat Evaluasi Tim Teknis dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Evaluasi Tim Teknis Pestisida TA 2023

No.	Keterangan	Periode I (31 Januari 2023)	Periode II (16 Mei 2023)	Periode III (12 Agustus 2023)	Periode IV (14 November 2023)
1.	Pestisida yang dievaluasi pada rapat pleno sebelumnya	12	26	36	
2.	Tetap baru	119	113	125	143
3.	Tetap ulang	340	219	197	274
4.	Bahan Teknis	90	84	81	
5.	Ekspor	17	13	7	
6.	Pendaftaran perluasan penggunaan	10	11	16	13



Komisi Pestisida

Hasil dari evaluasi rapat Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida direkomendasikan untuk dievaluasi kembali pada Rapat Pleno Komisi Pestisida. Pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pestisida telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2023, yaitu:



Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode I

Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode I Tanggal 15 Februari 2023 di Ruang Rapat Ditjen PSP Gd. D Lantai 8.

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode I TA 2023

No.	Keterangan	Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida		
		Diterima	Ditunda	Ditolak
1.	Tetap baru	115	5	2
2.	Tetap ulang	351	3	-
Jumlah Izin Tetap		466	8	2
3.	Bahan Teknis baru	48	15	-
4.	Bahan Teknis ulang	26	1	-
Jumlah Izin Tetap Bahan Teknis		74	16	-
5.	Ekspor baru	2	-	-
6.	Ekspor ulang	15	-	-
Jumlah Izin Tetap Ekspor		17	-	-
7.	Pendaftaran perluasan penggunaan	0	1	-
8.	Izin Percobaan Bahan Aktif Baru	-	3	-

Rapat Pleno Komisi Pestisida memutuskan izin pemasukan Novacrid yang berbahan aktif agens hayati *M. Acridum* oleh FAO yang bekerjasama dengan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan untuk mengendalikan hama belalang kembara *Locusta migratoria* harus dilengkapi dengan kejelasan molekuler dari *M. Acridum*, reaksi alergi, keamanan hewan air, polinator (serangga penyerbuk), dosis Novacrid. Menggunakan rancangan 3 dosis perlakuan Novacrid, fipronil (pestisida sintetik) dan kontrol, pengaruh terhadap belalang bertanduk panjang serta serangga lain.



Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode II

Rapat Pleno Komisi Pestisida periode II Tanggal 7 Juni 2023, di ruang rapat Ditjen PSP Gedung D lantai 8.

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode II TA 2023

No.	Keterangan	Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida		
		Diterima	Ditunda	Ditolak
1.	Tetap baru	109	13	1
2.	Tetap ulang	209	10	-
Jumlah Izin Tetap		418	23	1
3.	Bahan Teknis baru	43	10	1
4.	Bahan Teknis ulang	18	12	-
Jumlah Izin Tetap Bahan Teknis		61	22	1
5.	Ekspor baru	2	-	-
6.	Ekspor ulang	11	-	-
Jumlah Izin Tetap Ekspor		13	-	-
7.	Pendaftaran perluasan penggunaan	9	2	-
8.	Ijin Percobaan Bahan Aktif Baru	1	-	3

Arahan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pestisida yaitu sebagai berikut.

- Perlu diperhatikan importasi bahan aktif pestisida yang berasal dari agens hayati. Bahan aktif yang masuk untuk penelitian agar didiskusikan dengan KLHK dan Badan Karantina Pertanian.
- Perlu optimalisasi tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat maupun Propinsi dan Kab/Kota sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian izin tetap.
- Ekspor produk pertanian masih terkendala dengan ditemukannya residu pestisida melebihi ambang batas maksimal residu (BMR) pada komoditas yang diekspor. Direktorat Jenderal Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) harus meningkatkan pengamanan produk pertanian dari residu pestisida.
- Pelaku usaha diharapkan dapat mengambil bagian dan ikut mengevaluasi produknya agar residu pestisida tidak melebihi ambang batas toleransi. Selain itu juga mengawasi agar penggunaan pestisida oleh petani tidak over dosis/sesuai aturan.
- Penggunaan pestisida perlu kehati hatian dan sesuai dengan prinsip PHT.



Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode III

Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode III pada Tanggal 30 Agustus 2023, di Ruang Rapat Ditjen PSP Gd. D Lantai 8.

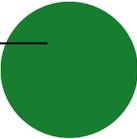
Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode III TA 2023

No.	Keterangan	Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida		
		Diterima	Ditunda	Ditolak
1.	Tetap baru	125	9	-
2.	Tetap ulang	186	1	-
Jumlah Izin Tetap		321	10	-
3.	Bahan Teknis baru	3	1	-
4.	Bahan Teknis ulang	9	3	2
Jumlah Izin Tetap Bahan Teknis		12	4	2
5.	Ekspor baru	-	-	-
6.	Ekspor ulang	7	-	-
Jumlah Izin Tetap Ekspor		7	-	-
7.	Pendaftaran perluasan penggunaan	16	1	-
8.	Ijin Percobaan Bahan Aktif Baru	-	-	2

Pembahasan Rapat Pleno ini yaitu sebagai berikut.

- Informasi dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, bahwa pestisida merk ANVIL 50 SC dari Syngenta Indonesia dengan bahan aktif heksakonazol (hexaconazole): 50 g/l telah dikembangkan bukan hanya untuk komoditas cabai, tetapi juga untuk karet untuk penyakit gugur daun karet.
- Penolakan ekspor komoditas perkebunan karena tercemar pestisida antara lain komoditas kopi yang ditolak Jepang dan kakao yang ditolak USA. Maka telah dibentuk Tim gabungan antara Badan Karantina Pertanian dan Ditjen Perkebunan. Terkait dengan residu pestisida, bahwa masing masing negara mempunyai kriteria tingkat residu yang berbeda, misal antara negara Jepang dan USA. GAP negara Jepang lebih ketat dibanding USA dalam hal residu.
- Metil Bromida yang beredar lebih banyak daripada yang diijinkan oleh Kementerian Pertanian.
- Terkait bahan aktif Etilen Oksida perlu dilakukan pengawasan oleh Badan Karantina Pertanian terkait fumigasi menggunakan EtO. Badan Karantina Pertanian dapat memblokir bila diketahui produk pertanian difumigasi dengan EtO, karena EtO dilarang digunakan di Indonesia.





Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV

Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV Tanggal 1 Desember 2023 di Ruang Rapat Ditjen PSP Gd. D Lantai 8.

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV TA 2023

No.	Keterangan	Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida		
		Diterima	Ditunda	Ditolak
1.	Tetap baru	140	8	1
2.	Tetap ulang	240	4	4
Jumlah Izin Tetap		380	12	5
3.	Bahan Teknis baru	19	14	4
4.	Bahan Teknis ulang	32	10	8
Jumlah Izin Tetap Bahan Teknis		51	24	12
5.	Ekspor baru	-	-	-
6.	Ekspor ulang	10	-	-
Jumlah Izin Tetap Ekspor		10	-	-
7.	Pendaftaran perluasan penggunaan	12	1	-
8.	Ijin Percobaan Bahan Aktif Baru	2	3	1



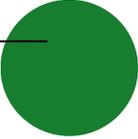
Rapat Tim Teknis Evaluasi Izin Percobaan

Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV Tanggal 1 Desember 2023 di Ruang Rapat Ditjen PSP Gd. D Lantai 8.

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida Periode IV TA 2023

No.	Keterangan	Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pestisida		
		Diterima	Ditunda	Ditolak
1.	Tetap baru	140	8	1
2.	Tetap ulang	240	4	4
Jumlah Izin Tetap		380	12	5
3.	Bahan Teknis baru	19	14	4
4.	Bahan Teknis ulang	32	10	8
Jumlah Izin Tetap Bahan Teknis		51	24	12
5.	Ekspor baru	-	-	-
6.	Ekspor ulang	10	-	-
Jumlah Izin Tetap Ekspor		10	-	-
7.	Pendaftaran perluasan penggunaan	12	1	-
8.	Ijin Percobaan Bahan Aktif Baru	2	3	1





Tim Teknis

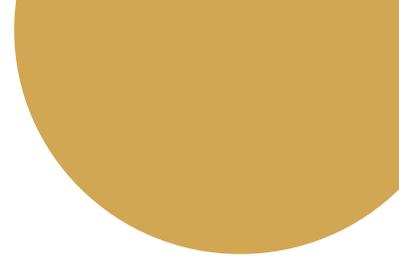
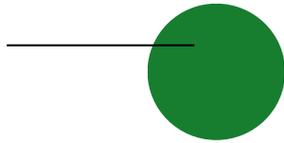
Evaluasi Izin Percobaan



Rapat Tim Teknis Evaluasi Izin Percobaan

- Rapat izin percobaan pestisida periode Januari dilaksanakan pada Tanggal 21-25 Januari 2023 di Hotel Avenzel, Bekasi. Pendaftaran izin percobaan pestisida yang sudah dievaluasi sebelumnya 31 merek dan pendaftaran izin percobaan pestisida baru 111 merek.
- Rapat izin percobaan periode Februari dan Maret 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Maret 2023 di Hotel The 101 Bogor. Pendaftaran izin percobaan pestisida yang sudah dievaluasi sebelumnya 85 merek dan pendaftaran izin percobaan pestisida baru 82 merek.
- Rapat izin percobaan periode April dilaksanakan pada Tanggal 9-10 Mei 2023 di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul. Total produk yang dievaluasi sebanyak 138 merek yang terdiri dari produk yang dievaluasi terdiri dari pendaftaran izin percobaan pestisida yang sudah dievaluasi sebelumnya sebanyak 48 merek dan pendaftaran izin percobaan pestisida baru sebanyak 90 merek.
- Rapat izin percobaan periode Juni dilaksanakan pada Tanggal 26-28 Mei 2023 di The Margo Hotel, Depok. Total produk yang dievaluasi sebanyak 118 permohonan terdiri dari 47 merek permohonan yang telah dievaluasi pada periode berikutnya dan 71 merek produk permohonan izin percobaan baru.
- Rapat izin percobaan periode Juli 2023 dilaksanakan pada Tanggal 1-2 Agustus 2023 di Hotel Swiss-Belinn, Bogor.
- Rapat izin percobaan periode Agustus 2023 dilaksanakan pada Tanggal 12-13 September 2023 di Hotel Avenzel, Bogor.
- Rapat izin percobaan periode September 2023 dilaksanakan pada Tanggal 12-13 oktober 2023 di Royal Padjajaran, Bogor. Bahan rapat terdiri dari 25 merek yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya dan 73 merek izin percobaan baru, sehingga total ada 98 merek.
- Rapat izin percobaan periode Oktober 2023 dilaksanakan pada Tanggal 20-21 November 2023 di Hotel Avenzel, Bekasi. Bahan rapat terdiri dari 31 (merek yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya dan 111 merek izin percobaan baru.
- Rapat izin percobaan periode November 2023 dilaksanakan pada Tanggal 13-14 Desember 2023 di Hotel Grand Savero, Bogor.





Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan *monitoring* serta evaluasi penyaluran pupuk dan pestisida, pengambilan sampel pupuk dan pestisida, pengujian sampel di laboratorium uji mutu pupuk dan pestisida, pengawasan pupuk dan pestisida beredar di tingkat produsen/distributor/kios dan koordinasi dengan instansi terkait.



78

pengambilan serta analisa sampel pupuk sebanyak 78 sampel



76

pengawasan pestisida dengan pengambilan dan analisa sampel pestisida sebanyak 76 sampel (108,51%)



80,50%

Realisasi keuangan Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebesar Rp. 1.055.386.896 (80,50%) dari anggaran tersedia sebesar Rp. 1.311.040.000.

(111,42%)

Dalam rangka meminimalkan terjadinya penyimpangan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk baik subsidi maupun non subsidi, telah dibuat regulasi yang mengatur hal tersebut. Untuk pengawasan pupuk antara lain telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sedangkan untuk operasionalnya diatur/dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; Permentan Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah; sedangkan pupuk bersubsidi diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; MoU antara Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian dan Kementerian BUMN dengan Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan Permendag Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sedangkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022.





Pelaksanaan Pengawasan Pupuk

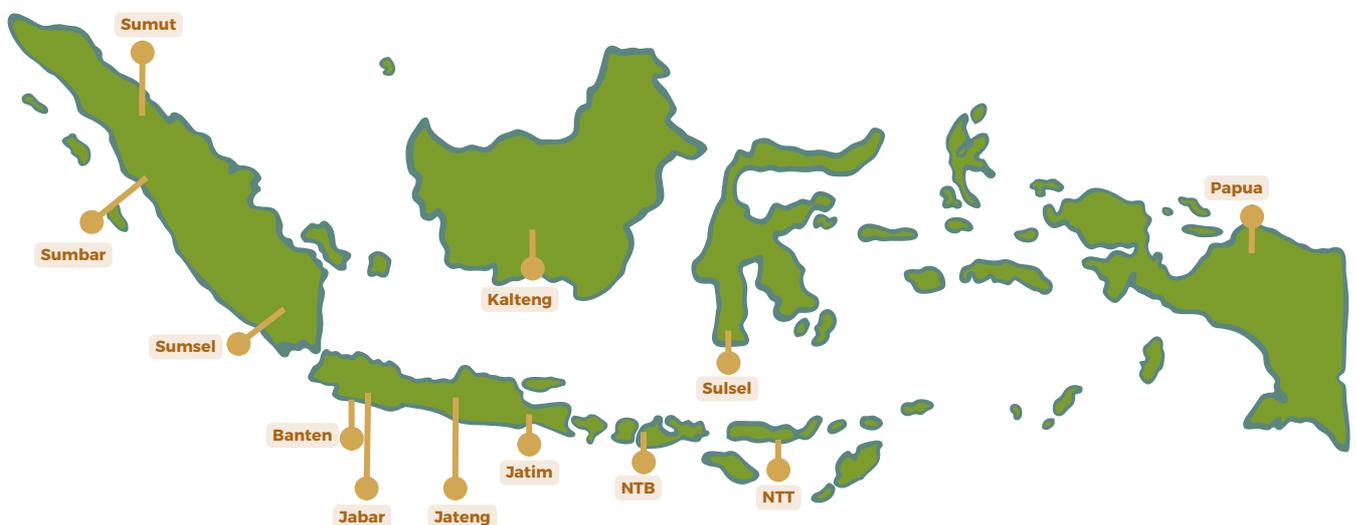
Pelaksanaan pengawasan pupuk pada tahun 2023 adalah pembinaan ke kios pupuk dan pestisida, pengambilan sampel pupuk beredar, pembinaan dan pengawasan ke produsen pupuk pesanan khusus, pemeriksaan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi baik yang diajukan oleh produsen maupun dokumen yang terdapat di kios pengecer serta melakukan sampling penerima pupuk subsidi di tingkat kelompok tani/petani. Untuk sampel fisik pupuk yang diambil dilakukan pengujian mutu di laboratorium/lembaga uji yang terakreditasi maupun yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.

Pengawasan Pupuk dilakukan dengan tahapan pengecekan sebagai berikut:

- Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian lokasi pabrik
- Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian produk
- Pemeriksaan kapasitas produksi
- Pemeriksaan stock fisik barang di gudang
- Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian jumlah produksi
- Laporan penyetoran pajak (faktur pajak) untuk formula khusus
- Pengambilan sampel pupuk untuk dilakukan uji mutu

Monitoring dan pengawasan pupuk dilakukan di propinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas), Sulawesi Selatan (Gowa), Jawa Barat (Sumedang, Cirebon), Sumatera Utara (Deli Serdang, Serdang Bedagai), Jawa Timur (Mojokerto, Ponorogo, kota Surabaya, Sidoarjo), Sumatera Barat (kota Padang, Agam, Padang Pariaman), Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah, Lombok Timur), Banten (Pandeglang), Papua (Sorong), Nusa Tenggara Timur (kota Kupang, kabupaten Kupang), Sumatera Utara (Tapanuli Utara), Sumatera Selatan (Ogan Komering Ilir) dan Jawa Tengah (Kab. Brebes)

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pupuk TA 2023





Pelaksanaan Pengawasan Pestisida

Pelaksanaan pengawasan pestisida pada tahun 2023 adalah pembinaan ke kios pupuk dan pestisida, pengambilan sampel pestisida beredar, pembinaan dan pengawasan ke produsen pestisida, pemeriksaan dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB)/*Bill of Lading* (BL) pada pemasukan barang impor melalui *post border* dan pemeriksaan laporan pemegang nomor pendaftaran terkait pelaksanaan pelatihan pestisida terbatas, serta pemeriksaan laporan produksi pestisida. Untuk sampel fisik pestisida yang diambil dilakukan pengujian mutu di laboratorium/lembaga uji yang terakreditasi maupun yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.

Pengawasan Pestisida dilakukan dengan tahapan pengecekan sebagai berikut:

- Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian lokasi pabrik
- Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian produk
- Pemeriksaan kapasitas produksi
- Pemeriksaan stok fisik barang di gudang
- Pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian jumlah produksi
- Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pestisida Terbatas
- Pemeriksaan Laporan Produksi Pestisida
- Pemeriksaan Data INSW terkait dengan Pengawasan Impor Pestisida *Post Border*
- Pengambilan sampel pestisida terdaftar untuk dilakukan uji mutu

Monitoring dan pengawasan pestisida dilakukan di propinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas), Sulawesi Selatan (Gowa), Jawa Barat (Sumedang, Cirebon), Sumatera Utara (Deli Serdang, Serdang Bedagai), Sumatera Barat (kota Padang, Agam, Padang Pariaman), Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah, Lombok Timur), Banten (Pandeglang), Papua (Sorong), Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang, Kabupaten Kupang).

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pestisida TA 2023



Hasil

Pengawasan Pupuk



Pengawasan secara Langsung terhadap Label Pupuk

Berdasarkan hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan pada beberapa wilayah tersebut, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Hasil Temuan Pengawasan secara Langsung terhadap Label Pupuk

No	Permasalahan atau Temuan di lapangan	Jumlah Temuan
1	Tidak memiliki nomor pendaftaran atau izin edar	27
2	Telah habis masa izin edar	56
3	Salah mencantumkan izin edar	3
4	Tidak mencantumkan kode produksi pada label/kemasan	57
5	Tidak mencantumkan masa edar pada label/kemasan	40
6	Tidak mencantumkan kode produksi dan masa edar pada kemasan	40



Pengawasan secara Tidak Langsung terhadap Label Pupuk

Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor, kios atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk, serta dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui layanan aduan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat, didapatkan beberapa hasil pengawasan/pengecekan pupuk sebagai berikut:

Hasil Temuan Pengawasan secara Tidak Langsung terhadap Label Pupuk

No	Permasalahan atau Temuan di lapangan	Jumlah Temuan
1	Tidak memiliki nomor pendaftaran atau izin edar	8
2	Telah habis masa izin edar	2
3	Salah mencantumkan izin	2



Pengawasan terhadap Mutu Pupuk

Dalam kegiatan pengawasan di tingkat peredaran, telah dilaksanakan pengambilan sampel pupuk sebanyak 78 sampel, dan dilakukan pengujian mutu di laboratorium Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Laboratorium BSIP. Berdasarkan hasil uji mutu pupuk terhadap 78 sampel pupuk tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut :

- Hasil uji mutu pupuk yang sesuai : 56 sampel
- Hasil uji mutu pupuk yang tidak sesuai : 22 sampel





Pengawasan Pupuk Formula Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik pada Pasal 41 : Pemegang nomor pendaftaran yang memproduksi pupuk formula khusus wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat disertai faktur pajak 6 (enam) bulan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal untuk dilakukan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan pengawasan pupuk formula khusus di beberapa perusahaan sebagai berikut :

1. PT. Kertopaten Kencana
2. CV. Mulyo Tani Makmur
3. PT. Multi Niaga Nusantara
4. PT. Agrofarm Nusa Raya
5. PT. Cipto Langgeng Joyo
6. PT. Laku Agung Bahagia Indonesia
7. PT. Multi Mas Chemindo
8. PT. Anugerah Pupuk Lestari
9. PT. Permata Agro Persada



Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk

Tindak Lanjut dari hasil pengawasan pupuk baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dilakukan pemberian surat teguran dari Direktur Pupuk dan Pestisida kepada perusahaan pemegang nomor pendaftaran pupuk yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut.

Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pupuk

No	Hal Surat	Jumlah
1	Surat teguran mengenai hasil uji mutu pupuk yang tidak sesuai	5
2	Surat teguran mengenai pupuk yang tidak memiliki izin edar dan telah habis izin edar	9
3	Surat mengenai tindak lanjut hasil audit dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap hasil pengawasan di Kab. Bima dan Dampu Provinsi NTB	3
Jumlah		17



Hasil

Pengawasan Pestisida



Pengawasan terhadap Label Pestisida

Berdasarkan hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan di beberapa wilayah tersebut, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Hasil Pengawasan terhadap Label Pestisida

No	Ketidaksesuaian label	Jumlah
1	Telah habis masa bulan dan tahun daluarsa	39 merek
2	Tidak mencantumkan bulan dan tahun daluarsa	13 merek
3	Tidak mencantumkan batch number	6 merek
4	Tidak mencantumkan tanggal produksi	4 merek
5	Telah habis masa ijin edar	3 merek
6	Tidak mencantumkan nomor pendaftaran	3 merek
7	Pestisida dilarang peredarannya	2 merek



Pengawasan terhadap Mutu Pestisida

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap mutu pestisida yang dilakukan terhadap 100 merek, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

- Hasil uji mutu pestisida yang sesuai : 96 sampel
- Hasil uji mutu pestisida yang tidak sesuai : 4 sampel

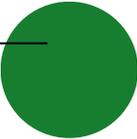


Pengawasan terhadap Pelatihan Pestisida Terbatas

Pengawasan pestisida terbatas pada tahun 2023 pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan penggunaan pestisida terbatas (dan penyampaian laporannya) yang menjadi kewajiban dari setiap pemegang nomor pendaftaran pestisida yang produknya termasuk dalam pestisida terbatas sesuai dengan lampiran pada Permentan 43 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida.

Berdasarkan olah data dari sistem aplikasi pelaporan *online* terdapat 24 pemegang nomor pendaftaran pestisida dengan produknya yang berbahan aktif terbatas parakuat diklorida yang tidak menyampaikan laporan atau tidak melakukan pelatihan penggunaan pestisida terbatas. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, maka sejauh ini semua perusahaan pemilik produk yang termasuk dalam kategori pestisida terbatas telah melakukan pelatihan pada wilayah-wilayah pemasarannya. Untuk laporan pelaksanaan pelatihan belum seluruhnya didapatkan, karena biasanya akan disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.





Pengawasan terhadap Impor Pestisida *Post Border*

Pengawasan impor pestisida *post border* pada tahun 2023 dilaksanakan di perusahaan sebagai berikut:

1. PT. Centa Brasindo Chemical Industry
2. PT. Da Ming Indonesia
3. PT. Rainbow Agrosiences
4. PT. Sari Kresna Kimia
5. PT. Royal Agro Indonesia
6. PT. Foragro Mitra Sejati
7. PT. Tiga Muara Emas Makmur
8. PT. Sime Darby Plantation Agri Bio
9. PT. UPL Indonesia
10. PT. Jawa Agrindo Internasional
11. PT. Multi Sarana Indotani
12. PT. Golden Step Indonesia
13. PT. Kemira Chemicals Indonesia
14. PT. Pertiwi Intertrade
15. PT. Maxxi Agri Indonesia



Pengawasan Laporan Produksi Pestisida

Pengawasan laporan produksi pestisida dilakukan melalui aplikasi simpl1.pertanian.go.id. Berdasarkan laporan yang disampaikan melalui aplikasi tersebut, selama tahun 2023 sejumlah 2.178 merek pestisida telah menyampaikan laporan produksi dengan total penyaluran 3.409.239.999 liter.

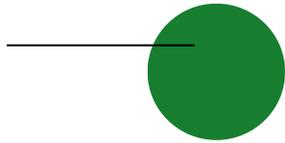


Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pestisida

Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pestisida

No	Hal Surat	Jumlah
1	Surat peringatan terkait hasil pengawasan label	18
2	Surat peringatan terkait hasil uji mutu	4
3	Surat peringatan terkait hasil pengawasan pestisida terbatas	24
4	Surat peringatan terkait hasil pengawasan impor pestisida post border	14
5	Surat ke E-Commerce terkait temuan penjualan pestisida tidak sesuai k	2
6	Surat ke Dinas Pertanian/KPPP Provinsi/Kabupaten/kota terkait temuan	3
Jumlah		65





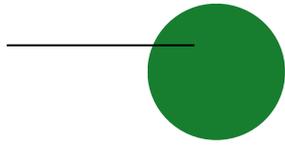
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)

Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun 2023 dilakukan dengan menyediakan anggaran Dekon dan TP di 15 (lima belas) provinsi dan kabupaten/kota, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada KPPP provinsi/kabupaten/kota, melakukan rapat koordinasi dengan KPPP daerah baik secara online ataupun offline. Anggaran KPPP pada Tahun 2023 dialokasikan di 15 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 6.516.268.000 dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 5.379.683.113 (82,56%).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS

Kegiatan PPNS Tahun 2023 dilaksanakan melalui penyusunan kurikulum diklat PPNS Tahun 2023 dan melakukan pelatihan PPNS di Diklat Reskrimsus, Mega Mendung, Jawa Barat. Pada tahun 2023 telah dilatih sebanyak 30 orang PPNS yang berasal dari Petugas pengawas Pusat dan daerah.





Sosialisasi Sistem Informasi Pestisida (SIMPES 2.0)

Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Pestisida (SIMPES 2.0) telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 di The Margo Hotel Depok. Tujuan dibangunnya aplikasi SIMPES 2.0 yang merupakan penyempurnaan dari SIMPES sebelumnya agar dapat memberikan informasi mengenai pestisida yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian berupa data lengkap dan update kepada stakeholder dari produsen sampai petani pengguna pestisida. Dengan aplikasi SIMPES 2.0 yang mudah diakses dapat membantu petani dan pelaku usaha mendapatkan data pestisida yang update sehingga dapat memberikan manfaat kepada petani, pengambil kebijakan dan para pelaku usaha.

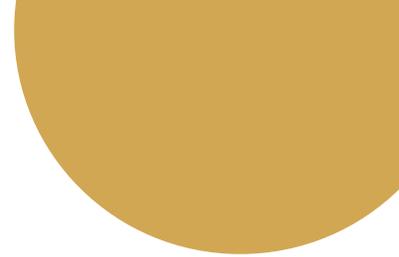
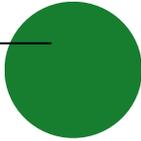
Data yang ditampilkan dalam Aplikasi SIMPES 2.0 adalah pestisida yang masih berlaku ijin edarnya dan diperbarui secara berkala. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIMPES 2.0 mencakup data mengenai kadar bahan aktif, dosis yang dianjurkan, cara aplikasi yang efektif, serta informasi mengenai komoditas dan sasaran OPT yang diizinkan untuk setiap produk pestisida yang beredar.

Sistem Informasi Pestisida (SIMPES) dapat digunakan sebagai antisipasi peredaran pestisida palsu yang beredar di lapangan. Selain itu, penggunaan database ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan pestisida yang tidak benar atau berlebihan, dengan akses lebih mudah tentang informasi pestisida, dapat membantu petani membuat keputusan yang lebih baik dalam penggunaan pestisida.



<https://pestisida.id/simpes2psp/>





SIMPES 2.0

Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Pestisida (SIMPES 2.0) telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 di The Margo Hotel Depok.



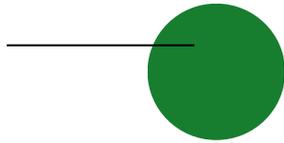
Bab 07

Direktorat Pembiayaan Pertanian



Direktorat Pembiayaan Pertanian berpartisipasi dalam acara Talkshow Bedah UMKM: Peluang Pasar dan Akses Pembiayaan untuk UMKM Hijau yang diselenggarakan oleh Usaha Kecil Mikro Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKMC FEB UI) pada Kamis (2/11).





Kinerja Anggaran

Kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian mempunyai fungsi untuk mengatasi beberapa isu strategis terkait dukungan aspek pembiayaan terhadap pembangunan pertanian yaitu sulitnya aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan, baik yang disebabkan oleh minimnya informasi tentang skim pembiayaan yang dapat diakses petani maupun yang disebabkan oleh penggolongan usaha pertanian sebagai usaha yang tidak *feasible* dan beresiko tinggi oleh lembaga pembiayaan.

Kegiatan utama Direktorat Pembiayaan Pertanian yaitu:

- Fasilitasi pembiayaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitasi Pembiayaan non program;
- Pemberdayaan dan penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian (Koptan);
- Pelaksanaan asuransi pertanian yang terdiri atas Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan Uji Coba Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Indeks Hasil panen Padi Berbasis Area (IHPPBA); dan
- Pemberdayaan Permodalan. Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam rangka mendukung program Kementerian Pertanian mencapai swasembada pangan menuju lumbung pangan nasional 2045.

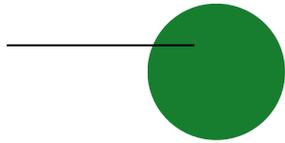
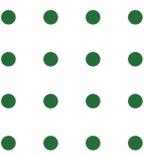
Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian tahun 2023 mendapatkan pagu sebesar Rp. 100.025.773.000 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 99.523.720.886 (99,50%).

Realisasi Keuangan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian TA. 2023



- Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** pada TA 2023 memiliki **target penyaluran** sebesar **100 triliun Rupiah** dengan capaian sebesar **Rp. 80.574.777.342.343 (80,57%)**. Kegiatan ini memiliki target pelaku usaha sebanyak **2.900 pelaku usaha** dan terealisasi sebesar **3.000 pelaku usaha (103,45%)**. Jumlah debitur pada tahun 2023 mencapai **1.641.580 orang** dari berbagai sektor pertanian yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (*Mixed Farming*) serta Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.
- Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan **Non Program** pada TA 2023 memiliki **target pelaku usaha** sebanyak **350 pelaku usaha** dan terealisasi sebesar **350 pelaku usaha (100%)**. Sumber fasilitasi pembiayaannya didapatkan melalui program **Lambung Pangan BAZNAS, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan PT. BPR NTB (Penyertaan Modal)**.
- Kegiatan Fasilitasi Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui permodalan dari *Private Sector* memiliki **target pelaku usaha** sebanyak **200 pelaku usaha** dan terealisasi sebanyak **200 pelaku usaha (100%)**. Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) BUMN yang menjadi sumber permodalan bagi 200 pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang pertanian yaitu **PT. Pertamina (Persero)**.
- Peningkatan jumlah **LKM-A dan Koperasi Pertanian** pada tahun 2023 kembali tumbuh dengan tingkat penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian sejumlah **110 unit LKM-A dan 33 unit Koperasi Pertanian**.
- Kegiatan **Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)** merupakan perlindungan kepada pelaku usaha tanaman padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen. Kegiatan AUTP pada TA 2023 memiliki **target mitigasi** seluas **305.555,56 ha** dan terealisasi seluas **305.558,12 ha (100%)**.
- Kegiatan **Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)** merupakan perlindungan kepada pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi kematian ternak. Kegiatan AUTS/K pada TA 2023 memiliki target mitigasi sebanyak **20.000 ekor** dan terealisasi sebanyak **20.000 ekor (100%)**.
- Kegiatan program **Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) berbasis Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (AUTP-IHPPBA)** bertujuan untuk terlindunginya petani dari kerugian jika panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas. Sasaran pelaksanaan uji coba yaitu di **Kabupaten Karawang (Jawa Barat) dan Kabupaten Kendal (Jawa Tengah)**.





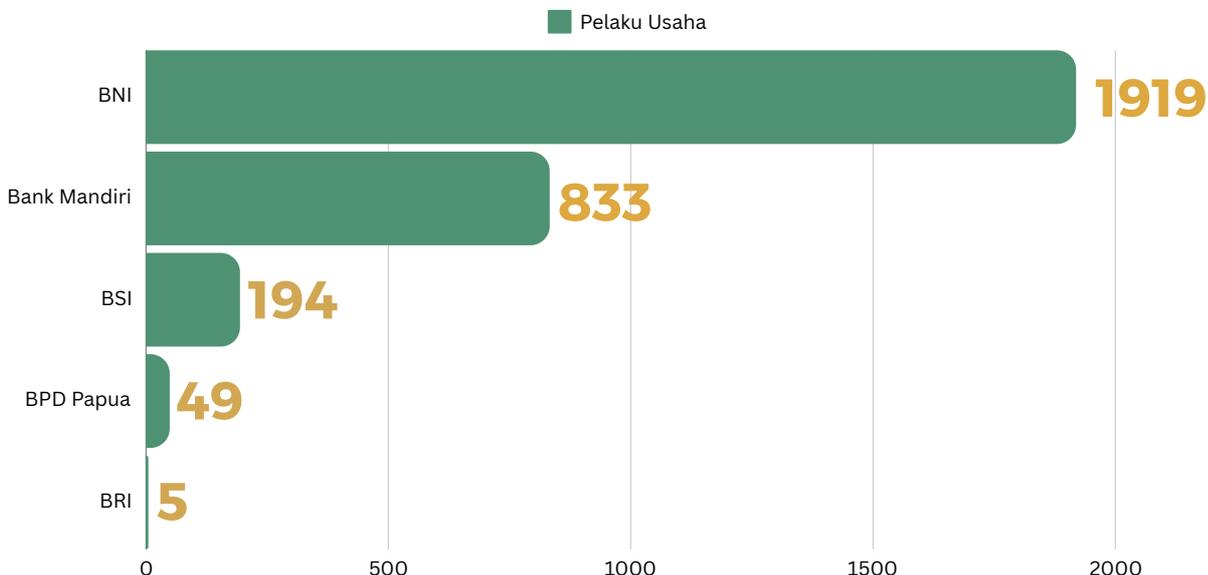
Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

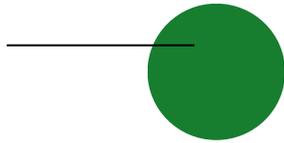
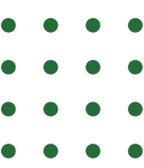
Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu skema pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada debitur (calon penerima) yang memiliki usaha produktif dan layak, termasuk sektor pertanian namun belum memiliki agunan tambahan yang mencukupi. Skema kredit ini disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang ditugaskan.

Target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) TA 2023 adalah **100 triliun Rupiah** dengan capaian sebesar **Rp. 80.574.777.342.343** atau **80,57%** dari target. Jumlah debitur pada tahun 2023 mencapai **1.641.580 orang** dari berbagai sektor pertanian yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (*Mixed Farming*) serta Jasa Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

Target jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program untuk tahun 2023 adalah sebanyak **2.900 pelaku usaha** dan terealisasi sebesar **3.000 pelaku usaha (103,45%)**. Capaian kinerja jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program (KUR) disebabkan adanya komitmen Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan dana KUR semaksimal mungkin untuk pembangunan sektor pertanian. Rekapitulasi jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program (KUR) sebagai berikut.

Realisasi Pelaku Usaha yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui KUR





Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui Fasilitas Pembiayaan

Target jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan non program (fasilitasi pembiayaan) untuk tahun 2023 adalah sebanyak 350 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 350 pelaku usaha (100,00%), kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Kerja Fasilitas Pembiayaan. Capaian indikator jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pembiayaan sinergi sebagai berikut.

Program Lumbung Pangan bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik pedesaan di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan. Program ini melibatkan pengelolaan pertanian dari hulu ke hilir dengan adanya 2 tempat penggilingan padi di Kabupaten Sukabumi dan Serang. Lumbung Pangan Sukabumi telah memperoleh sertifikat organik atas budidaya dan memperoleh sertifikat PSAT pada produk beras yang diproduksi. Selain itu, saat ini petani di Sukabumi telah memproduksi dan menjual beras organiknya dengan label Beras "Raos". Target Pengembangan Lumbung Pangan mengusung tema "TRADISIONAL - KONVENSIONAL - SEMI ORGANIK - ORGANIK".



Program Pembiayaan dengan Penyertaan Modal bersama PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB)

Program ini merupakan bentuk penyertaan modal dari pemerintah kepada Bank BPR NTB yang bekerjasama juga dengan UPLAND project milik Direktorat Irigasi Pertanian. Program ini berhasil memberikan suntikan modal kepada Bank di daerah sehingga dapat menyalurkan pembiayaan kepada petani. Saat ini sudah berjalan di beberapa lokasi dan di Kabupaten Sumbawa adalah salah satu tempat yang berhasil.

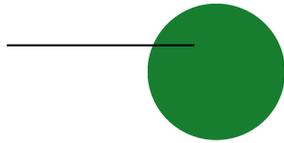
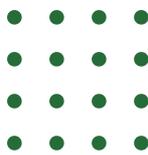


Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan. Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi permodalan baik melalui LKM-A yang merupakan linkage program ataupun secara langsung kepada petani/pelaku usaha. Manfaat yang diperoleh dari sinergi program UMi Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) Kementerian Keuangan melalui LKM-A ini antara lain:

1. LKMA mendapatkan penguatan permodalan melalui linkage program UMi, sehingga ada margin hasil yang disalurkan kepada petani anggotanya.
2. Petani anggotanya mendapatkan akses permodalan UMi melalui LKM-A.
3. Pengurus LKM-A mendapatkan pengetahuan pelatihan tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan dan Aplikasi Pelaporan secara Online.



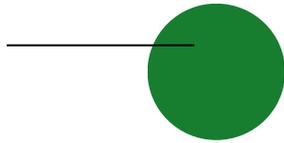
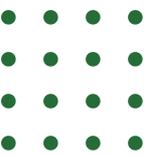


Adapun rekapitulasi jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui fasilitas pembiayaan terdapat pada tabel berikut.

Realisasi Pelaku Usaha yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui Fasilitas Pembiayaan

No.	Program	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Kredit (Rp)
1	Lumbung Pangan BAZNAS	Banten	Kab. Pandeglang	16	18.560.000
			Kab. Serang	42	553.470.000
		Jawa Barat	Kab. Garut	9	94.000.000
			Kab. Karawang	23	203.972.500
			Kab. Sukabumi	44	326.431.010
Papua	Kab. Asmat	37	185.000.000		
2	Pembiayaan Ultra Mikro (Umi)	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	1	10.000.000
			Kab. Kendal	25	178.500.000
			Kab. Magelang	24	61.000.000
			Kab. Temanggung	100	479.966.634
3	PT. BPR NTB (Penyertaan Modal)	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	29	955.000.000
TOTAL				350	3.065.900.144

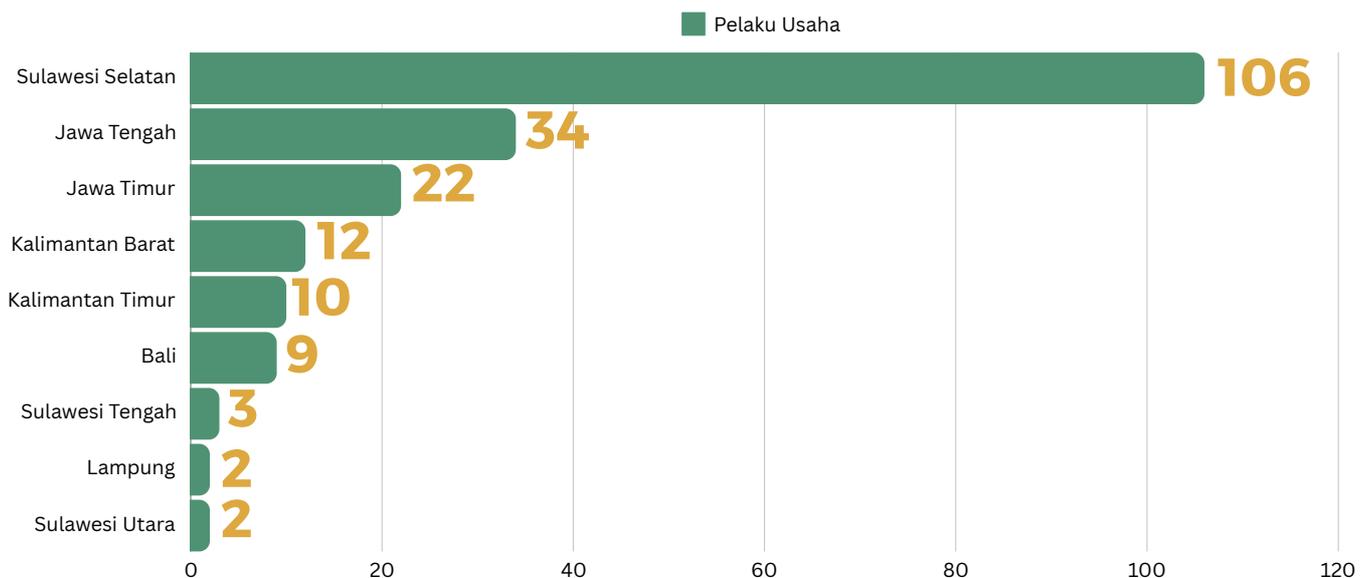


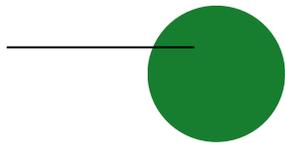
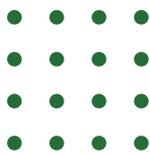


Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Permodalan dari *Private Sector*

Permodalan dari **Private Sector** merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memfasilitasi permodalan dan memberikan informasi bagi petani, peternak, kelompok tani/ternak, dan gabungan kelompok tani/ternak guna mempertemukan dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2023 target kinerja jumlah pelaku usaha pertanian yang mengajukan akses permodalan dari *private sector* adalah sebanyak **200 pelaku usaha** dan terealisasi sebanyak **200 pelaku usaha (100,00%)**. Hal ini menunjukkan upaya Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam menjembatani pelaku usaha sektor pertanian kepada sumber pembiayaan alternatif sudah berhasil. Pada tahun 2023 terdapat **1 (satu) BUMN** yang menjadi sumber permodalan bagi 200 pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang pertanian yaitu **PT. Pertamina (Persero)**. Adapun rincian capaian dari pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari *private sector* dijelaskan sebagai berikut.

Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Mendapatkan Akses Permodalan dari *Private Sector*





Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian

Peningkatan jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian pada tahun 2023 kembali tumbuh dikarenakan aktivitas kelembagaan pembiayaan yang semula diserahkan kepada pemerintah daerah kembali didukung oleh dana dekonsentrasi (18 Provinsi) sehingga aktivitas di daerah menjadi lebih intensif dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan. Aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan tahun 2023 meliputi:



Penyusunan Pedoman Pemberdayaan LKM-A dan Koptan

Pedoman pemberdayaan LKM-A dan Koptan ditujukan untuk menjadi acuan bagi daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LKM-A dan Koptan



Penyusunan Leaflet LKM-A dan Koptan

Leaflet LKM-A dan Koptan disusun agar dapat menjadi salah satu saluran media informasi tentang LKM-A dan Koptan



Bantuan Badan Hukum Koperasi Pertanian untuk LKM-A

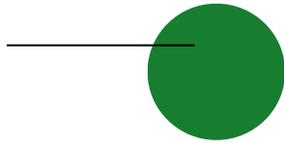
Bantuan ini diberikan maksimal Rp3.000.000,- kepada LKM-A yang lolos syarat dan ketentuan untuk diberikan bantuan pendirian badan hukum koperasi pertanian. Saat ini sudah disalurkan untuk 2 (dua) LKM-A yaitu Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kuningan.

Dari hasil koordinasi dan evaluasi dengan 18 Dinas Pertanian Provinsi diketahui bahwa per 22 Desember 2023, penumbuhan kelembagaan pembiayaan pertanian sejumlah 110 unit LKM-A dan 33 unit Koperasi Pertanian. Perkembangan jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

Perkembangan Jumlah LKM-A dan Koperasi Pertanian Tahun 2017 - 2023

No	Kegiatan	Jumlah						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)	6.887	7.040	7.183	7.524	7.703	7.790	7.900
2	Koperasi Pertanian	607	743	792	889	888	914	947



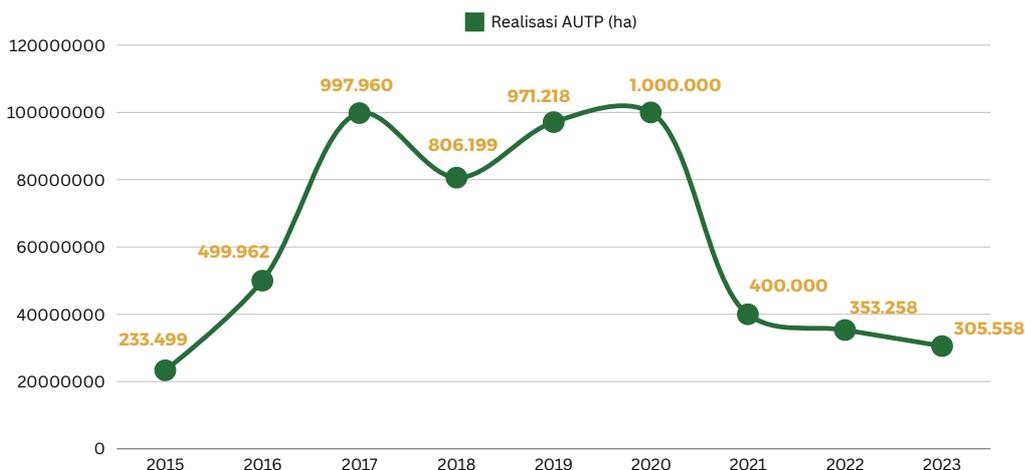


Terlindunginya Lahan Pertanian melalui

Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)

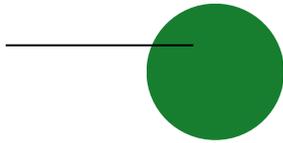
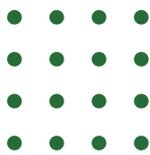
Asuransi usaha tanaman padi (AUTP) merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tanaman padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 hektar untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen. Kegiatan AUTP pada TA 2023 memiliki target mitigasi seluas **305.555,56 ha**. Secara umum, aktivitas AUTP berkontribusi dalam mendukung program swasembada pangan dengan melakukan mitigasi gagal panen dari usaha tani padi yang terealisasi seluas **305.558,12 ha (100%)**. Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan usaha pertanian maka dapat dilihat realisasi AUTP (ha) yaitu sebagai berikut.

Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2015 sampai dengan 2023



No	Tahun	Pagu (Rp)	Target (Ha)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (Ha)	%
1	2015	144.000.000.000	1.000.000	33.623.835.200	233.499,55	23,35
2	2016	72.000.000.000	500.000	71.994.564.000	499.962,25	99,99
3	2017	144.000.000.000	1.000.000	143.706.317.760	997.960,54	99,8
4	2018	144.000.000.000	1.000.000	116.092.748.160	806.199,64	80,62
5	2019	144.000.000.000	1.000.000	139.855.501.440	971.218,76	97,2
6	2020	144.000.000.000	1.000.000	144.000.198.720	1.000.001,38	100
7	2021	57.600.000.000	400.000	57.600.001.440	400.000,01	100
8	2022	55.077.811.200	382.484,30	50.869.224.000	353.258,50	92,36
9	2023	43.989.920.000	305.555,56	43.989.920.000	305.558,12	100
TOTAL		948.677.731.200	6.588.040	801.742.410.720	5.587.658	85,41



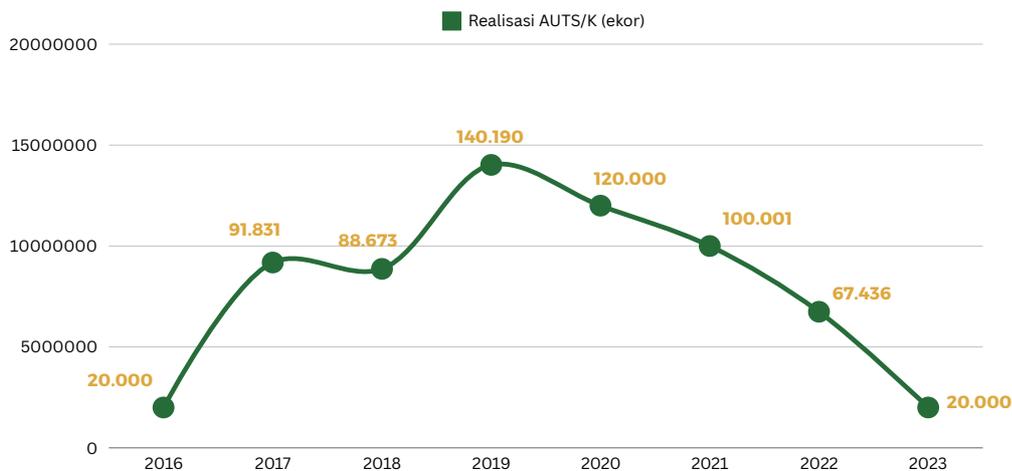


Terlindunginya Usaha Ternak melalui

Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

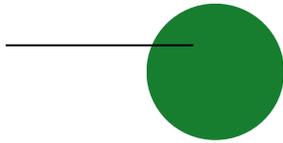
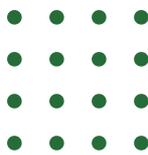
Asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi kematian ternak. Kegiatan AUTS/K pada TA 2023 memiliki target mitigasi sebanyak **20.000 ekor**. Secara umum, aktivitas AUTS/K berkontribusi dalam mendukung program swasembada daging melalui mitigasi kerugian peternak sapi/kerbau akibat mati dan atau kehilangan yang terealisasi sebanyak **20.000 ekor sapi/kerbau (100%)**. Untuk menunjukkan pencapaian kinerja perlindungan usaha ternak sapi/kerbau maka dapat dilihat realisasi AUTS/K yaitu sebagai berikut.

Realisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2015 sampai dengan 2023



No	Tahun	Pagu (Rp)	Target (Ekor)	Realisasi (Rp)	Realisasi Fisik (Ekor)	%
1	2016	3.200.000.000	20.000	3.200.000.000	20.000	100
2	2017	19.200.000.000	120.000	14.692.960.000	91.831	76,53
3	2018	19.200.000.000	120.000	14.187.580.000	88.673	73,89
4	2019	24.000.000.000	150.000	22.430.400.000	140.190	93,46
5	2020	19.200.000.000	120.000	19.200.000.000	120.000	100
6	2021	16.000.000.000	100.000	16.000.160.000	100.001	100
7	2022	14.754.800.000	92.280	10.789.760.000	67.436	73,08
8	2023	3.200.000.000	20.000	3.200.000.000	20.000	100
TOTAL		118.764.800.000	742.280	103.700.960.000	648.131	87,32





Uji Coba Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (IHPPBA)

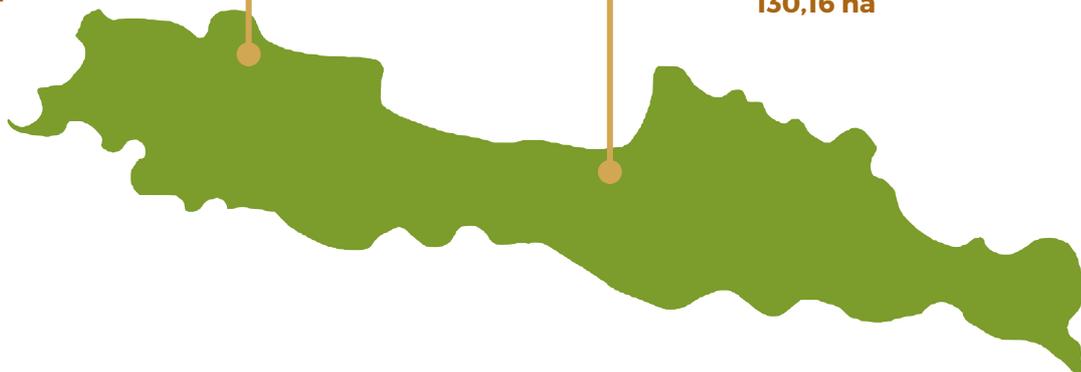
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pembiayaan Pertanian melaksanakan lanjutan program Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) berbasis *Yield Index*. Maksud penyelenggaraan uji coba AUTP-IHPPBA adalah untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada petani jika rata-rata luas panen yang dikonfirmasi dengan survei ubinan lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi.

Tujuan penyelenggaraan uji coba AUTP-IHPPBA adalah untuk memberikan kepastian petani dalam melakukan usaha tani apabila panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas. Sasaran penyelenggaraan uji coba AUTP-IHPPBA adalah terlindunginya petani dari kerugian jika panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas. Sasaran pelaksanaan uji coba AUTP-IHPPBA adalah terlindunginya petani di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pelaksanaan uji coba AUTP-IHPPBA di Kabupaten Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah digambarkan sebagai berikut.

Realisasi Uji Coba AUTP-IHPPBA TA 2023

Kab. Karawang
554,5 ha

Kab. Kendal
130,16 ha



Bab 08

Lampiran



Lampiran 1. Realisasi Fisik dan Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA 2023

No	KEGIATAN	PAJU		REALISASI				
		Unit	Rp	Unit	Rp	%		
1	1754R0K - Rehabilitasi Jaringan Irigasi	1.028	Unit	77.100.000.000	1.028	Unit	77.100.000.000	100,00%
	- R/II Tugas Perbaikan	12	Unit	900.000.000	12	Unit	900.000.000	100,00%
	- R/II Pusat	1.016	Unit	76.200.000.000	1.016	Unit	76.200.000.000	100,00%
2	1754R0K - Pengembangan Sumber Air (TP)	7	Unit	1.216.000.000	7	Unit	1.177.866.300	97,25%
	- Irigasi Perpipaan	7	Unit	1.086.800.000	7	Unit	1.067.752.800	98,25%
	- Irigasi Perpipaan	-	Unit	127.200.000	-	Unit	110.113.500	86,57%
3	1754R0K - Pengembangan Embung	503	Unit	50.860.000.000	503	Unit	50.571.805.039	99,43%
	- Embung Pertanian	3	Unit	360.000.000	3	Unit	360.000.000	100,00%
	- Embung Pertanian (GeoMembran) (Konstruksi)	400	Unit	20.000.000.000	400	Unit	20.000.000.000	100,00%
	- Embung Pertanian (GeoMembran) (Pengadaan)	1	Keg	22.000.000.000	1	Keg	21.826.515.800	99,21%
	- Rehab Embung Pertanian (Konstruksi)	100	Unit	2.000.000.000	100	Unit	2.000.000.000	100,00%
	- Rehab Embung Pertanian (Pengadaan)	1	Keg	3.500.000.000	1	Keg	3.442.834.800	98,37%
	- Pendampingan (operasional)	1	Keg	1.348.000.000	1	Keg	1.247.356.395	92,55%
	- Bimtek P3A	1	Keg	1.000.000.000	1	Keg	962.449.244	96,24%
	- Pendampingan P3A	1	Keg	852.000.000	1	Keg	852.050.000	97,65%
4	1754R0K - Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	459	unit	58.300.823.000	443	Unit	58.142.517.825	99,73%
	- Pelaksanaan Kegiatan (Konstruksi)	172	Unit	17.200.000.000	161	Unit	17.099.742.000	99,94%
	- Pendampingan (operasional)	1	Keg	3.254.720.000	1	Keg	3.262.668.791	99,94%
	- Koordinasi, sosialisasi dan Pengawasan Kegiatan Lingkup irigasi Pertanian	1	Keg	6.800.000.000	1	Keg	6.790.800.066	99,86%
	- Irigasi Perpipaan/Perpompaan	160	Unit	16.000.000.000	160	Unit	16.000.000.000	100,00%
	- Identifikasi pengembangan sumber air	1	Keg	200.000.000	1	Keg	199.321.757	99,66%
	- Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino	127	Unit	14.835.909.000	132	Unit	14.899.984.011	99,08%
	- Irigasi Air Tanah Dalam	30	Unit	4.500.000.000	30	Unit	4.365.000.000	97,00%
	- Irigasi Air Tanah dangkal	14	Unit	1.400.000.000	14	Unit	1.400.000.000	100,00%
	- Bangunan Konservasi	83	Unit	8.300.000.000	88	Unit	8.300.000.000	100,00%
	- Pendampingan	1	keg	635.903.000	1	Keg	634.984.011	99,86%
5	1754AEA - Koordinasi	1	Keg	18.447.870.000	1	Keg	18.113.430.668	98,19%
	- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian Pusat	1	Keg	16.982.170.000	1	Keg	16.678.578.577	98,21%
	- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian Daerah	1	Keg	1.465.700.000	1	Keg	1.430.351.111	97,59%
6	1754BDD - Dokumen Pinjaman Luar Negeri UPLAND	1	Keg	150.000.000.000	1	Keg	145.054.380.087	96,70%
	- UPLAND Pusat	1	Keg	87.138.720.000	1	Keg	84.447.001.242	97,23%
	- UPLAND Daerah	1	Keg	62.861.280.000	1	Keg	60.607.378.845	96,74%
7	1754PBR - Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian	3	Lokasi	1.069.920.000	3	Lokasi	1.068.920.000	99,91%
TOTAL				356.982.413.000			351.228.919.739	98,39%



Lampiran 2. Realisasi Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA 2023

No	Provinsi	Pagu		Realisasi			
		Unit	(%)	Unit	(%)	(Rp)	(%)
1	Aceh	68	5.100.000.000	68	100,00	5.100.000.000	100,00
2	Sumatera Utara	30	2.250.000.000	30	100,00	2.250.000.000	100,00
3	Sumatera Barat	14	1.050.000.000	14	100,00	1.050.000.000	100,00
4	Riau	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	14	1.050.000.000	14	100,00	1.050.000.000	100,00
6	Sumatera Selatan	35	2.625.000.000	35	100,00	2.625.000.000	100,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	63	4.725.000.000	63	100,00	4.725.000.000	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-
11	Dki Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	166	12.450.000.000	166	100,00	12.450.000.000	100,00
13	Jawa Tengah	105	7.875.000.000	105	100,00	7.875.000.000	100,00
14	DI Yogyakarta	10	750.000.000	10	100,00	750.000.000	100,00
15	Jawa Timur	107	8.025.000.000	107	100,00	8.025.000.000	100,00
16	Banten	32	2.400.000.000	32	100,00	2.400.000.000	100,00
17	Bali	26	1.950.000.000	26	100,00	1.950.000.000	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	59	4.425.000.000	59	100,00	4.425.000.000	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	36	2.700.000.000	36	100,00	2.700.000.000	100,00
20	Kalimantan Barat	34	2.550.000.000	34	100,00	2.550.000.000	100,00
21	Kalimantan Tengah	13	975.000.000	13	100,00	975.000.000	100,00
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	13	975.000.000	13	100,00	975.000.000	100,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Selatan	105	7.875.000.000	105	100,00	7.875.000.000	100,00
26	Sulawesi Tenggara	8	600.000.000	8	100,00	600.000.000	100,00
27	Gorontalo	5	375.000.000	5	100,00	375.000.000	100,00
28	Sulawesi Barat	33	2.475.000.000	33	100,00	2.475.000.000	100,00
29	Maluku	37	2.775.000.000	37	100,00	2.775.000.000	100,00
30	Maluku Utara	3	225.000.000	3	100,00	225.000.000	100,00
31	Papua	12	900.000.000	12	100,00	900.000.000	100,00
Total		1.028	77.100.000.000	1.028	100,00	77.100.000.000	2.394

Lampiran 3. Realisasi Survei Investigasi Desain (SID) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier TA 2023

Provinsi	PAGU		REALISASI			
	Unit	Rp	Unit	%	Rp	%
Sulawesi Tenggara	1.959 ha	349.920.000	1.959 ha	100,00	349.920.000	100,00
Gorontalo	1.510 ha	270.000.000	1.510 ha	100,00	269.000.000	99,63
Sulawesi Tengah	2.500 ha	450.000.000	2.500 ha	100,00	450.000.000	100,00
TOTAL	5.969 ha	1.069.920.000	5.969 ha	100,00	1.068.920.000	99,91



Lampiran 4. Rekapitulasi Identifikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air TA 2023

No	Nama P3A	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelas
1	P3A LESTARI I	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	SEWON	TIMBUN HARJO	LANJUT
2	P3A JATIRTO	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KULONPROGO	NANGGULAN	JATISARONO	LANJUT
3	P3A NGUDI GAWE KARAHARJIAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	PANDAK	TRHARJO	LANJUT
4	P3A SRIWARHI	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN	SAYENGAN	MARGOMULYO	LANJUT
5	P3A TRTOYOSO	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	PLERED	SENGCROYOSO	LANJUT
6	P3A LOJJARUM	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN	MINGGR	SENDANGARUM	LANJUT
7	P3A TRTO MANUNGGAL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	SEWON	TAMANAN	UTAMA
8	P3A KARANG TANI	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	PIYUNGAN	SRIMARTANI	UTAMA
9	P3A NGREJANING TANI	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	SEWON	BANGURHARJO	PEMULA
10	P3A DWI TIRTO MANUNGGAL	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	PIYUNGAN	SRIMULYO	PEMULA
11	P3A SEDIQ MAKMUR	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	NGOTO	SEWON	PEMULA
12	P3A BANGUN TRTO	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	KASIHAN	BANGUNJIMO	LANJUT
13	P3A LESTARI I	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	SEWON	TIMBUN HARJO	LANJUT
14	P3A TRTARATA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	BANGUNTAPAN	POTORONO	LANJUT
15	P3A TRTARATA 2	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	BANGUNTAPAN	POTORONO	PEMULA
16	P3A TRTO WIROTOMO M	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	BANGUNTAPAN	WROKANTEN	LANJUT
17	P3A KARYA SEMPLUR	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	PEMULA
18	P3A KARANG TALUN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	WOGIRI	WUKIRBARI	LANJUT
19	P3A BANYURAHAYU	JAWA BARAT	TASKMALAYA	RAJAPOLAH	TANJUNGPURA	LANJUT
20	P3A TRTA SUKAHURIP	JAWA BARAT	TASKMALAYA	RAJAPOLAH	SUKARAJA	LANJUT
21	P3A SIPATAHUNAN	JAWA BARAT	TASKMALAYA	CIGALONTONG	NAGGERANG	LANJUT
22	P3A MITRA BANGSA	JAWA BARAT	TASKMALAYA	CIGALONTONG	SIRNARAJA	LANJUT
23	P3A KARANGMUKTI	JAWA BARAT	TASKMALAYA	SALAWU	SALAWU	PEMULA
24	P3A WALATRA	JAWA BARAT	TASKMALAYA	SALAWU	SALAWU	LANJUT
25	P3A SUMBER LINTAS	JAWA BARAT	SLIBANG	TAMBAKDAHAN	WAMAJAYA	PEMULA
26	P3A PAMUJAHAN	JAWA BARAT	TASKMALAYA	PANCATENGAH	TONJONG	PEMULA
27	P3A SUMBER REJEKI	JAWA BARAT	TASKMALAYA	PANCATENGAH	CIBOGAE	PEMULA
28	P3A KARYAMULTI	JAWA BARAT	TASKMALAYA	CIBINWASIH	PANCATENGAH	PEMULA
29	P3A SANGUAYA	JAWA BARAT	TASKMALAYA	PANCATENGAH	PANGAWANGI	PEMULA
30	P3A KLETERAN	JAWA TENGAH	MAGELANG	GRABAG	KLETERAN	PEMULA
31	P3A TOPOTULOGO	JAWA TENGAH	MAGELANG	GRABAG	GRABAG	PEMULA
32	P3A NGUDI LUHUR	JAWA TENGAH	MAGELANG	GRABAG	KALILUTO	PEMULA
33	P3A SETIA BANGUN	LAMPUNG	TANGGAMUS	SEMANGKA	SUDIMOROBANGUN	LANJUT
34	P3A TIJ BARU	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	RHEE	RHEE LOKA	LANJUT
35	P3A PENYANGKA MANK	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	RHEE	RHEE	LANJUT
36	P3A TERUSAN	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	UTAN	SABEDE	LANJUT
37	P3A BATUONGGONG	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	UTAN	ORANG SAWA	LANJUT
38	P3A ALANG AJI	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	UTAN	ORANG SAWA	LANJUT
39	P3A AI SARAJA	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	UTAN	SABEDO	LANJUT
40	P3A MARISGAMA	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	UTAN	STOWE BARANG	LANJUT
41	P3A BUN MUNCAR	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	UTAN	PUKAT	LANJUT
42	P3A LENANG REA	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	EMPANG	GAMPIT	LANJUT
43	P3A AINGEMUNG	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	EMPANG	GAMPIT	LANJUT
44	BALONG NIAT	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	BOAL ATAS	EMPANG	LANJUT
45	BUN PAMANING	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	EMPANG	GAMPIT	LANJUT
46	P3A DARAS BITO	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	EMPANG	BOLA	LANJUT
47	P3A KALEMBANG RAYA	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	TELLUWANJAN	SALLUBATTANG	LANJUT
48	P3A KUNJU	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	TELLUWANJAN	MARDANGIN	LANJUT
49	P3A SELARAS	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	TELLUWANJAN	JAYA	LANJUT
50	P3A SIKAMASE	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	TELLUWANJAN	JAYA	LANJUT



Lampiran 5. Realisasi Pengembangan Irigasi Perpompaan TA 2023

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TARGET (Unit)				PAGU (Rp)					REALISASI			
		TP	H	SUN	NAK	TOTAL	KONTRIBUSI	PERSIAPAN	MONEY	TOTAL	LIMIT	(Rp)	%	
1	ACEH					0		17.200.000		17.200.000	0	16.672.000	96,93	
2	SUMATERA SELATAN					0		36.800.000		36.800.000	0	32.250.000	88,36	
3	BENGKULU					0		8.500.000		8.500.000	0	8.430.000	99,18	
4	BANGKA BELITUNG					0		35.000.000		35.000.000	0	31.615.000	90,33	
5	JAWA TIMUR					0		790.000		790.000	0	0	0,00	
6	NTB					0		26.000.000		26.000.000	0	25.800.000	99,23	
7	KALIMANTAN BARAT					4	4	352.000.000	54.800.000	16.000.000	422.800.000	4	404.644.800	99,71
	Kubu Raya					1	1	88.000.000	13.200.000	4.000.000	105.200.000	1	95.781.000	91,05
	Landak					1	1	88.000.000	13.200.000	4.000.000	105.200.000	1	95.847.000	91,11
	Sanggau					1	1	88.000.000	13.200.000	4.000.000	105.200.000	1	95.836.000	91,10
	Kota Singkawang					1	1	88.000.000	13.200.000	4.000.000	105.200.000	1	95.858.000	91,12
	Provinsi								2.000.000		2.000.000	0	2.000.000	100,00
8	KALIMANTAN SELATAN					0		30.000.000		30.000.000	0	29.545.000	98,48	
9	KALIMANTAN TIMUR					1	1	88.000.000	50.200.000		138.200.000	1	137.900.000	99,71
	Kutai Kartanegara					1	1	88.000.000			88.000.000	1	88.000.000	100,00
10	KALIMANTAN UTARA					0		14.890.000		14.890.000	0	5.000.000	33,67	
11	SULAWESI UTARA					0		21.000.000		21.000.000	0	21.000.000	100,00	
12	PAPUA BARAT	1	1			2	2	249.300.000	74.700.000	12.000.000	336.000.000	2	328.000.000	97,62
	Ijoja Ampot	1	1			2	2	249.300.000	74.700.000	12.000.000	336.000.000	2	249.300.000	74,20
	Total	1	2	0	4	7	689.300.000	369.500.000	28.000.000	1.088.800.000	7	1.038.756.800	95,38	

Realisasi Pengembangan Embung Pertanian Geomembran TA 2023

No	Provinsi	PAGU	REALISASI			
			KEUANGAN	%	FISIK	%
	NASIONAL	47.500.000.000	47.269.350.400	99,51%	500	100,00%
1	ACEH	2.435.000.000	2.416.656.685	99,25%	27	100,00%
2	BALI	1.050.000.000	930.126.318	88,58%	10	100,00%
3	BANTEN	2.100.000.000	1.969.667.200	93,79%	20	100,00%
4	D.I.Y	525.000.000	475.100.000	90,50%	5	100,00%
5	GORONTALO	645.000.000	800.953.578	124,18%	9	100,00%
6	JAWA BARAT	6.300.000.000	5.959.545.198	94,60%	60	100,00%
7	JAWA TENGAH	6.615.000.000	6.582.168.182	99,50%	63	100,00%
8	JAWA TIMUR	4.690.000.000	4.449.973.915	94,88%	48	100,00%
9	KALIMANTAN BARAT	1.215.000.000	1.244.968.557	102,47%	13	100,00%
10	KALIMANTAN SELATAN	315.000.000	314.325.787	99,79%	3	100,00%
11	LAMPUNG	3.160.000.000	3.166.227.285	100,20%	32	100,00%
12	NTB	3.780.000.000	3.543.018.200	93,73%	36	100,00%
13	SULAWESI BARAT	2.970.000.000	2.854.747.158	96,12%	34	100,00%
14	SULAWESI SELATAN	7.865.000.000	8.849.724.775	112,52%	103	100,00%
15	SULAWESI TENGGARA	420.000.000	422.527.947	100,60%	4	100,00%
16	SUMATERA SELATAN	475.000.000	568.898.615	119,77%	5	100,00%
17	SUMATERA UTARA	2.940.000.000	2.720.721.000	92,54%	28	100,00%



Lampiran 6. Realisasi Kegiatan Gerakan Nasional Penanganan Dampak El Nino TA 2023

KEGIATAN	PAGU		REALISASI			
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
	Unit	Rp	Unit	%	Unit	%
BANTEN	10	1.150.000.000	10	100,00	1.150.000.000	100,00
JAWA BARAT	28	2.800.000.000	28	100,00	2.665.000.000	95,18
JAWA TENGAH	18	1.950.000.000	18	100,00	1.950.000.000	100,00
JAWA TIMUR	16	1.800.000.000	16	100,00	1.800.000.000	100,00
KALIMANTAN SELATAN	3	450.000.000	3	100,00	450.000.000	100,00
LAMPUNG	14	1.250.000.000	14	100,00	1.250.000.000	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	8	900.000.000	8	100,00	900.000.000	100,00
SULAWESI SELATAN	29	3.200.000.000	29	100,00	3.200.000.000	100,00
SUMATERA SELATAN	3	400.000.000	3	100,00	400.000.000	100,00
SUMATERA UTARA	3	300.000.000	3	100,00	300.000.000	100,00
TOTAL	132	14.200.000.000	132	100,00	14.065.000.000	99,05

Lampiran 7. Realisasi Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim TA 2023

No	Provinsi	UNIT	PAGU	REALISASI			
				KEUANGAN	%	FISIK	%
	NASIONAL	311	33.189.742.000	32.789.742.000	100,00%	311	100,00%
1	ACEH	36	4.050.000.000	4.050.000.000	100,00%	36	100,00%
2	BALI	3	300.000.000	300.000.000	100,00%	3	100,00%
3	BANTEN	12	1.200.000.000	800.000.000	100,00%	12	100,00%
4	DIY	3	300.000.000	300.000.000	100,00%	3	100,00%
5	GORONTALO	2	200.000.000	200.000.000	100,00%	2	100,00%
6	JAMBI	10	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	10	100,00%
7	JAWA BARAT	44	5.255.992.000	5.255.992.000	100,00%	44	100,00%
8	JAWA TENGAH	18	1.910.000.000	1.910.000.000	100,00%	18	100,00%
9	JAWA TIMUR	30	3.150.000.000	3.150.000.000	100,00%	30	100,00%
10	KALIMANTAN BARAT	2	200.000.000	200.000.000	100,00%	2	100,00%
11	KALIMANTAN TENGAH	4	600.000.000	600.000.000	100,00%	4	100,00%
12	LAMPUNG	4	415.000.000	415.000.000	100,00%	4	100,00%
13	NUSA TENGGARA BARAT	7	720.000.000	720.000.000	100,00%	7	100,00%
14	NUSA TENGGARA TIMUR	9	900.000.000	900.000.000	100,00%	9	100,00%
15	PAPUA	3	318.750.000	318.750.000	100,00%	3	100,00%
16	SULAWESI BARAT	21	2.100.000.000	2.100.000.000	100,00%	21	100,00%
17	SULAWESI SELATAN	80	8.170.000.000	8.170.000.000	100,00%	80	100,00%
18	SULAWESI TENGAH	13	1.300.000.000	1.300.000.000	100,00%	13	100,00%
19	SULAWESI UTARA	2	200.000.000	200.000.000	100,00%	2	100,00%
20	SUMATERA BARAT	1	120.000.000	120.000.000	100,00%	1	100,00%
21	SUMATERA UTARA	7	780.000.000	780.000.000	100,00%	7	100,00%



Lampiran 8. Penggunaan Dana Tugas Pembantuan kegiatan UPLAND TA 2023

No.	Sub Komponen	Kegiatan	Kabupaten yang melaksanakan
1	1.2 Management produksi dan lahan	DemoPlot Penerapan Teknologi Pertanian	Garut, Lombok Timur, Malang, Magelang, Minahasa Selatan, Sumbawa, Sumenep
		Bantuan Transport Penyuluh Pertanian	Garut, Gorontalo, Lebak, Lotim, Malang, Purbalingga, Subang, Sumenep, Tasikmalaya
		Sertifikasi Padi Organik	Magelang
		Sekolah Lapangan	Gorontalo, Purbalingga
2	2.1 Pengembangan kelembagaan Petani	Pelatihan Penguatan Korporasi Petani	Banjarnegara, Purbalingga
		Pelatihan Pengelolaan Korporasi Petani	Gorontalo
2.3 Penguatan Hubungan dan Sistem Pemasaran	Studi Banding ke Pusat Bisnis Komoditas	Sumbawa	
3	3.1 Peningkatan Kapasitas Staf Pemerintah	Peningkatan Kapasitas Staff Pemerintah Kabupaten	Banjarnegara, Gorontalo, Magelang
		Peningkatan SOM, Refreshment Kegiatan Upland untuk Staf Pemerintah, DGO, VF	Purbalingga, Sumenep
4	4.1 Pendampingan Teknis VF	Honor Fasilitator dan Manager Fasilitator	Banjarnegara, Garut, Gorontalo, Lebak, Lotim, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep, Tasikmalaya
		Bantuan Transport FD & Manager FD	Banjarnegara, Garut, Lebak, Lotim, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep, Tasikmalaya
4.2 DPUU operational cost	untuk membiayai operasional PIU, antara lain untuk operasional kendaraan kantor, belanja jasa profesi (honor narasumber/pakar), belanja perjalanan dinas, belanja paket meeting, honor on granting officer, media publikasi, sosialisasi kesadaran nutrisi	Banjarnegara, Garut, Gorontalo, Lebak, Lotim, Magelang, Malang, Minahasa Selatan, Purbalingga, Subang, Sumbawa, Sumenep, Tasikmalaya	



Lampiran 9. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B TA 2023

No	Provinsi	Kabupaten	Ara Kegiatan	LS 2019 (Ha)	Realisasi Fisik					Realisasi Keuangan			
					SK Perup					KPB Total (Ha)	Page	Realisasi	%
					Dokumen	Nomor	LPB (Ha)	LOPB (Ha)	Status				
1	Aceh	TP Prov								450.000.000	448.970.580	100	
2	Aceh	Aceh Jaya	Pola 2	8.944	SK	188.342/281/2023	7.485	2.059	Terkai	9.534	245.000.000	241.504.891	99
3	Aceh	Aceh Tengah	Pola 2	7.481	SK	521/88/Disper-2023	4.902	1.239	Terkai	6.000	248.000.000	245.348.828	100
4	Aceh	Aceh Tenggara	Pola 2	9.300	SK	45/15/5/2023	9.102		Terkai	9.102	248.300.000	245.328.458	100
5	Aceh	Aceh Tenggara	Pola 2	8.700					Belum Terkai		245.000.000	245.463.191	100
6	Aceh	Nagan Raya	Pola 2	6.802	SK	530/14/3/484/Men/2023	6.430	418	Terkai	6.848	244.000.000	242.650.741	99
7	Aceh	Pada Jaya	Pola 2	8.818	SK	388 Tahun 2023	9.285	534	Terkai	9.800	242.900.000	241.683.269	99
8	Sumsel Utara	TP Prov								120.000.000	119.992.970	100	
9	Sumsel Utara	Lubuh Batu	Pola 1	15.244	SK	520/281/DPCRTA/2023	9.101	11.349	Terkai	21.348	400.000.000	394.727.769	99
10	Sumsel Utara	Tanjung Lela	Pola 1	20.536					Belum Terkai		400.000.000	395.642.980	100
11	Sumsel Utara	Talip	Pola 1	17.884	SK	724 Tahun 2023	16.391	3.794	Terkai		400.000.000	395.498.892	72
12	Sumsel Barat	TP Prov								120.000.000	71.498.900	60	
13	Sumsel Barat	Sekik	Pola 1	20.591	Perdup	51 Tahun 2023	19.343	891	Terkai	19.925	400.000.000	391.488.585	99
14	Jambi	TP Prov								375.000.000	374.879.619	100	
15	Jambi	Batang Hari	Pola 2	7.287	SK	448/2023	7.575	1.038	Terkai	8.613	222.500.000	221.897.391	100
16	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Pola 2	7.819	SK	638/Kes/Disper/TP/2023	8.316	644	Terkai	8.961	222.500.000	222.494.138	100
17	Jawa Barat	TP Prov								120.000.000	120.000.000	100	
18	Jawa Barat	Sumedang	Pola 1	31.167	SK	542 Tahun 2023	15.650	5.503	Terkai	21.153	400.000.000	395.204.290	100
19	Bali	TP Prov								220.000.000	214.911.612	99	
20	Bali	Bukang	Pola 2	8.881	SK	138.332/5484/M/2023	6.482		Terkai	6.482	250.000.000	250.584.791	92
21	Bali	Karangas	Pola 2	3.572	SK	441/2014/2023	2.285		Terkai	2.285	250.000.000	257.675.293	95
22	Nusa Tenggara Timur	TP Prov								320.000.000	319.991.690	100	
23	Nusa Tenggara Timur	Melo	Pola 2	4.901	SK	2301/2023	21.594	224	Terkai	21.817	250.000.000	249.870.000	100
24	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Pola 2	5.258	SK	284/KDP/14/2023	32.429	49	Terkai	32.479	250.000.000	249.550.000	100
25	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	Pola 2	8.421	SK	733/KDP/14/2023	15.507	94	Terkai	15.601	250.000.000	249.900.000	100
26	Kalimantan Barat	TP Prov								120.000.000	119.925.000	100	
27	Kalimantan Barat	Kotabang	Pola 1	32.525					Belum Terkai		400.000.000	389.793.896	92
28	Kalimantan Barat	Lendah	Pola 1	26.673	Perdup	63 Tahun 2023	23.968	58.907	Terkai	79.922	400.000.000	396.617.000	99
29	Kalimantan Barat	Sanggau	Pola 1	14.530	SK	458/DK/PT/8/2023	12.068	5.078	Terkai	15.784	400.000.000	383.163.580	96
30	Bukawa Selatan	TP Prov								120.000.000	118.746.611	99	
31	Bukawa Selatan	Luan	Pola 1	30.888	SK	632/18/2023	20.118	1.905	Terkai	22.023	400.000.000	398.967.890	100
32	Bukawa Selatan	Gepong	Pola 1	28.388	SK	557/18/2023	27.347	6.288	Terkai	33.635	400.000.000	377.918.738	94
33	Bukawa Selatan	Tana Tana	Pola 1	14.392	SK	485/18/2023	13.141	299	Terkai	13.440	400.000.000	397.728.600	99
34	Bukawa Selatan	Tanjung Ulu	Pola 1	16.347	SK	670/18/2023	14.191	458	Terkai	14.649	400.000.000	397.838.648	99
35	Bukawa Tengah	TP Prov								220.000.000	217.204.288	99	
36	Bukawa Tengah	Murawai	Pola 2	6.287	SK	188.445/Kes/3411/DK/PP/2023	4.835		Terkai	4.835	250.000.000	243.113.500	97
37	Bukawa Tengah	Pasa	Pola 2	15.854	SK	188.450/81/2023	15.301		Terkai	15.301	250.000.000	246.500.000	99
38	Bukawa Tenggara	TP Prov								120.000.000	120.000.000	100	
39	Bukawa Tenggara	Korawa	Pola 1	27.291	SK	1933 Tahun 2023	30.678	9807	Terkai	40.513	400.000.000	400.000.000	100
40	Gorontalo	TP Prov								220.000.000	219.892.000	100	
41	Gorontalo	Bonene	Pola 2	4.940	SK	020/08/2023	4.757	391	Terkai	5.112	250.700.000	250.750.000	100
42	Gorontalo	Gorontalo Utara	Pola 2	4.761	SK	9K/27/18/2023	4.214	1.344	Terkai	5.558	249.200.000	249.149.338	100
43	Gorontalo	Pohuwato	Pola 2	4.739	SK	380/18/18/2023	5.882	6371	Terkai	12.030	250.000.000	250.000.000	100
Total				438.282						12.148.008.904	11.824.805.791	97	



Lampiran 10. Alokasi Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Produktif Tahun 2023

No	Provinsi	Kabupaten	Luasan Revisi		Konstruksi	Pelaksanaan pengawasaan dan operasional kegiatan perluasan areal	TOTAL
			Ha	Km			
TOTAL			775	7,75	8.770.000.000	1.570.000.000	10.340.000.000
A Areal Lahan Kering			150	1,50	1.125.000.000	320.860.000	1.445.860.000
1 NTT			150	1,50	1.125.000.000	307.210.000	1.432.210.000
Operasional Propinsi:						130.230.000	130.230.000
1 Flores Timur			50	0,50	375.000.000	58.990.000	433.990.000
2 Sikka			50	0,50	375.000.000	58.970.000	433.970.000
3 Ende			50	0,50	375.000.000	59.020.000	434.020.000
NTB					-	13.650.000	13.650.000
Operasional Propinsi:							
1 Bima						13.650.000	13.650.000
B Areal Hortikultura			160	1,60	1.600.000.000	283.640.000	1.883.640.000
1 Sulawesi Tengah			160	1,60	1.600.000.000	283.640.000	1.883.640.000
Operasional Propinsi:						130.000.000	130.000.000
1 Banggai			80	0,80	800.000.000	76.820.000	876.820.000
2 Marowali Utara			80	0,80	800.000.000	76.820.000	876.820.000
C Areal Perkebunan			465	4,65	5.045.000.000	965.500.000	7.010.500.000
3 Sulawesi Selatan			285	3	3.705.000.000	524.400.000	4.229.400.000
Operasional Propinsi:						186.970.000	186.970.000
1 Sidrap			50	0,50	650.000.000	67.320.000	717.320.000
2 Luwu			100	1,00	1.300.000.000	106.820.000	1.406.820.000
3 Toraja Utara			85	0,85	1.005.000.000	95.970.000	1.200.970.000
4 Bantaeng			50	0,50	650.000.000	67.320.000	717.320.000
4 Kepulauan Babel			180 *	1,80	2.340.000.000	441.100.000	2.781.100.000
Operasional Propinsi:						163.620.000	163.620.000
1 Bangka Barat			45	0,45	585.000.000	79.970.000	664.970.000
2 Bangka Tengah				-		32.440.000	32.440.000
3 Bangka Selatan			90	0,90	1.170.000.000	99.700.000	1.269.700.000
4 Belitung			45	0,45	585.000.000	65.370.000	650.370.000



Lampiran 11. Surat Penyelesaian Ekstensifikasi Lahan Sawah TA. 2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
 Telp. (0536) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email : dtphp@kalteng.go.id

Palangka Raya, 29 Desember 2023

Kepada

Nomor : 135 /PSP-600/XII/2023
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penyelesaian Ekstensifikasi Lahan Sawah TA. 2021

Yth. **Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian RI**

di -
 Jakarta

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Nomer : 520/1010.1/XI/Distan 2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Laporan Akhir dari PelaksanaKorem 102 Panju Panjung Kegiatan Ekstensifikasi TA. 2021 dan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Nomer : 520/3374/Distan-PSP/XII/2023 perihal Laporan Akhir Kegiatan Ekstensifikasi Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa :

- Kegiatan Ekstensifikasi TA. 2021 di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah berakhir tanggal 20 Desember 2023.
- Realisasi Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi TA. 2021 sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TARGET	REALISASI		Kekurangan	Nilai Keuangan yang belum terbangun (Rp)
			Ribu	%		
1	Pembersihan Lahan/Land Clearing (Ha)	10.043,87	18.290,53	97,06	484,34	4.885.293.198,80
2	Pelaksanaan Lahan/land clearing (Ha)	10.043,87	18.290,53	97,06	484,34	-
3	Pembuatan Jalan Usaha Tani (m ²)	207.813,96	247.962,94	90,44	30.251,29	387.284.060,33
4	Pelaksanaan-Sekoran (m ²)	331.843,74	318.541,75	96,30	12.101,99	483.336.007,32
5	Pembuatan Terasak Bakau (m ²)	351.198,01	298.089,64	85,16	4.893,22	-
6	Pembuatan Dangkal (m ²)	273.148,08	251.449,47	92,06	21.698,59	784.126.887,89
7	Pemasangan Pipa PVC Ø 150 mm (m)	10.880,00	2.326,95	21,43	8.677,00	1.811.347.821,00
8	Pengolahan Tanah (Ha)	13.614,25	8.026,79	58,19	5.175,46	5.175.487.887,32
Total						13.946.818.119,65

- Terkait item pekerjaan Pemasangan Pipa PVC Ø 150 mm yang disampaikan PPK Kegiatan Ekstensifikasi TA. 2021, sudah terealisasi 100% akan tetapi eviden yang disampaikan ke KPA sampai tanggal 25 Desember 2023 belum lengkap.
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama-sama antara KPA, PPK, dan Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi TA. 2021 pada Tanggal 18 Desember 2023, Nilai kekurangan yang belum terbangun senilai **Rp13.946.818.119,65**.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
 Ir. H. SUMARTI, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690907 199403 2 005

Tersampaikan/diampuhkan Kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Tengah di - Palangka Raya sebagai laporan;
- Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI di - Jakarta.



Lampiran 12. Surat Penyelesaian Ekstensifikasi Lahan Sawah TA. 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Jalan Willem AS Nomor 5 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3227866 Faks. (0536) 3224200, email : dtphp@kalteng.go.id

Palangka Raya, 27 Desember 2023

K e p a d a

Nomor : 134 /PSP-600/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyelesaian Ekstensifikasi
Lahan Sawah TA. 2022

Yth. **Direktur Perlindungan dan
Penyediaan Lahan, Ditjen PSP,
Kementerian Pertanian RI**

di -
Jakarta

Meneruskan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
Nomer : 520/1010/XII/Distan.2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal
Laporan Akhir dari Pelaksana/Korem 102 Panju Panjung Kegiatan
Ekstensifikasi TA. 2022, bersama ini kami sampaikan telah dilaksanakan
Provisional Hand Over (PHO) Kegiatan Ekstensifikasi Lahan Sawah TA.
2022 seluas 1.175,6 Ha dan Benta Acara Serah Terima tertampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.



Terbaca: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah di - Palangka Raya sebagai laporan



Lampiran 13. Justifikasi Lahan Pertanian Pangan Produktif di Kawasan Food Estate

NOTULENSI RAPAT REVIEW SID KEGIATAN OPTIMASI LAHAN RAWA PADA KAWASAN FE KALTENG

**NOTULEN RAPAT
REVIEW SID KEGIATAN OPTIMASI LAHAN RAWA PADA LOKASI FOOD
ESTATE TAHUN ANGGARAN 2023 DI KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Rapat Review Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada Lokasi Food Estate Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas. Penasaran diwakili oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili secara offline oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas selaku Perwakilan RPRK Kegiatan, Perwakilan Kowin 1001Penuh Panjung selaku Perwakilan Kegiatan, dan Ketua Tim Survei Investigasi Desa (SID) LPPM Universitas Lambung Mangkurat Kegiatan Optimasi Lahan Rawa pada Lokasi Food Estate serta Koordinator Penyuluh dan Penyuluh Kecamatan Mulusi Pokok Kabupaten Kapuas yang diarahkan untuk memantau kegiatan Optimasi Lahan (daftar hadir terlampir).

Kesimpulan dan Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)) berdasarkan dokumen Survei Investigasi Desa (SID) yang telah diuraikan pada Tim Teknis yang dibantu oleh Tim Penyuluh Kabupaten.
2. Tim SID menyampaikan bahwa total luas lahan sawah kegiatan optik yang diperoleh adalah 1.664 ha yang terdiri dari 8 Desa/RT Copokman sebagai berikut:

No.	Desa	Nama Copokman
1.	Taluk Palangot	Sinar Tani
2.	Darawa	Sinar Yungwi
3.	Sir Takah Nih	Sepat
4.	Cakalang	Yung Darawa
5.	Arjo Palimbang	Copok Manung
6.	Mawar Mawar	Ingat Mawar
7.	Hangdaung	Selak Mawar
8.	Rungu Mawar	Mawar Mawar

SURAT DARI DINAS PERTANIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PERTANIAN DAN KEYAHASAN PANGAN**
Jl. Sekeloa No. 11 Sekeloa Kabupaten Humbang Hasundutan 11111
telp. 0838-24010000/0838-24010001
e-mail: hah@humbang.go.id/whd@humbang.go.id

Surat
No. 1
Tgl. 10/08/2023
Lokasi, tanggal, 2023

Kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah

Yth. Bapak Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah

Sehubungan dengan adanya kegiatan kegiatan kegiatan, lahan kering di lokasi Food Estate Kabupaten Humbang Hasundutan yang berstatus Tim Survei Investigasi Desa (SID) Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023. Mendapat surat dari provinsi, untuk ditinjau secara langsung terhadap Tim Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melakukan kegiatan optimasi lahan sawah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 di lokasi Food Estate tahun anggaran 2023 untuk melaksanakan kegiatan optimasi lahan sawah di lokasi tersebut. Untuk itu, kami sampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat melakukan kegiatan optimasi lahan sawah di lokasi tersebut. Untuk itu, kami sampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat melakukan kegiatan optimasi lahan sawah di lokasi tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan permohonan dan permohonan kami sampaikan kembali.

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEYAHASAN PANGAN,
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

RI SETIYO ANGGARA, MS
PENYULUH UTAMA NEGARA
081-50094123456789



Lampiran 14. Justifikasi Lahan Pertanian Pangan Produktif (Nusa Tenggara Timur)

KELOMPOK TANI RII ANAK
DESA HEWA ,KECAMATAN WULANGGITANG

SURAT PERNYATAAN TIDAK SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Nomor : *09/Poktan - RA / XI / 2023*

Pada hari ini Sabtu tanggal, Tiga Pulu, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Produktif pada Areal Lahan Kering pada Poktan Rii Ana, Desa Hewa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur terdapat adanya kekurangan pekerjaan fisik berupa

1. Pekerjaan Pembabatan semak hanya dikerjakan seluas 12 Ha dari Total 16 Ha yang direncanakan sebagai, mana tertuang dalam RAB dan RUKK
2. Pekerjaan Penebangan Pohon hanya dikerjakan seluas 12 Ha dari total 16 Ha yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam RAB dan RUKK
3. Pekerjaan Pengumpulan Ranting, Perencanaan dan pembersihan akhir (lahan siap tanam) hanya dikerjakan seluas 12 Ha dari total 16 Ha sebagaimana tertuang dalam RAB dan RUKK

Bahwa terhadap sisa luasan lahan kegiatan Peral (4 Ha) yang tidak dapat kami petani Kelompok Rii Ana dikerjakan dengan alasan sebagai berikut:

1. Petani atas nama Magdalena Keron Liwu (0,5 Ha), dengan luasan lahan tidak dikerjakan dengan alasan petani tersebut memiliki kebun pada beberapa tempat dan tidak memiliki tenaga kerja yang memadai sehingga yang bersangkutan tidak lakukan pengerjaan pembukaan lahan pada area yang telah ditentukan sebagai area kegiatan Peral
2. Petani atas nama Fransiska Lehan (0,5) tidak melakukan pekerjaan pembukaan lahan di area Peral karena yang bersangkutan berkonsentrasi pada pengerjaan sawah
3. Petani atas nama Yosep B. Boruk (1 Ha) tidak melakukan pengerjaan pembukaan lahan pada era Peral, karena lahan yang di ISD sebagai lahan Peral merupakan lahan perkebunan dimana terdapat tanaman perkebunan seperti Menteng, Kelapa dan Kakao

 Dipindai dengan CamScanner



4. Heribertus Lukas Boro (0,5 Ha), tidak melakukan pengerjaan pembukaan lahan pada era Peral karena yang bersangkutan telah berangkat (Merantau) ke Luar Negeri dan tidak memberikan lahannya untuk digarap oleh petani lain
 5. Dominikus D Uran (1Ha), tidak melakukan pembukaan lahan pada era Peral karena lahan tersebut belum ada pembagian dalam keluarga
 6. Paulus D Wolor (0,5Ha) menyatakan tidak sanggup kerja karena usia lanjut (Lansia) dan tidak ada anggota keluarga yang membantu untuk mengerjakan.
- Maka sehubungan dengan keterangan pada poin 1 sampai 8 yang berakibat tidak selesainya luasan pengerjaan dari 16 Ha yang direncanakan dan dikerjakan oleh Kelompok hanya mencapai 12 Ha maka sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan dari sisa luasan yang tidak dikerjakan sebanyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari total pagu Rp.120.000.000 (seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) Kelompok Rii Anak wajib untuk melakukan penyetoran kembali ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pengelolaan keuangan negara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan sebenar benarnya dengan penuh tanggungjawab

Hewa, 30 Desember 2023
Kelompok Rii Anak



GABRIEL DOLER



KELOMPOK TANI RII ANAK
DESA HEWA ,KECAMATAN WULANGGITANG

SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN KEUANGAN KE KAS NEGARA

Nomor : *OB/Pelitan - PA/XII/2023*

Pada hari ini... *Sabtu*... tanggal *30*... bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan atas pelaksanaan pekerjaan Pengembangan lahan Pertanian Produktif pada Areal lahan Kering oleh Tim teknis pada area lahan kelompok Tani Rii Ana di Desa Hewa, Kecamatan Wulanggitang terdapat adanya kekuarangan pekerjaan berupa:

1. Pekerjaan pembabatan semak dari total luasan yang direncanakan seluas 16 Ha, hanya dikerjakan seluas 12 Ha (seluas 4 Ha tidak dikerjakan)
2. Pekerjaan Penebangan pohon dari total luasan yang direncanakan seluas 16 Ha, hanya dikerjakan seluas 12 Ha (seluas 4 Ha tidak dikerjakan)
3. Pekerjaan pengumpulan ranting, perencakan dan pembersihan akhir (lahan siap tanam) dari total luasan yang direncanakan seluas 16 Ha, hanya dikerjakan seluas 12 Ha (seluas 4 Ha tidak dikerjakan)

Bahwa kekurangan volume pekerjaan (Pembabatan semak, penembangan pohon, pengumpulan ranting, pemcakan, dan pembersihan akhir/lahan siap tanam) tersebut disesuaikan dengan RUKK kelompok Tani dengan total nilai uang sebanyak Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), oleh kelompok Tani Rii anak menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan/menyetor kembali ke kas negara. Dan apabila kami tidak mengembalikan uang ke kas negara sebagaimana kami nyatakan dalam surat pernyataan ini maka kami siap menghadapi konsekuensi hukum sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab

Hewa, *30* Desember 2023
Ketua Kelompok Rii Anak

GABRIEL DOLER



 Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 15. Justifikasi Lahan Pertanian Pangan Produktif (Sulawesi Selatan)

KELOMPOK TANI "SIPAKALABBIRI" DESA LABBO KEC. TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

SURAT PERNYATAAN KETIDAKSANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF PADA AREAL PERKEBUNAN TAHUN 2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ILA.TAHIR
Jabatan : Ketua Kelompok Tani SIPAKALABBIRI
Alamat : Desa Labbo, Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng
Jumlah Anggota : 15 Orang
Luas Alokasi Kegiatan : 17 Ha

Bertindak atas nama Kelompok Tani Sipakalabbiri

Dengan ini menyatakan, KETIDAKSANGGUPAN melaksanakan/menyelesaikan seluruh pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian Produktif pada Areal Perkebunan di wilayah kelompok tani kami sesuai dengan Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ketidaksanggupan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labbo, 14 Desember 2023

Ketua Kelompok Tani
Sipakalabbiri



Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal PSP di Jakarta
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng di Bantaeng

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner





DINAS PERTANIAN

Jl. A. Mannappiang No. Tlp. (0413) 21471 – Fax (0413) 21373
Bantaeng Kode Pos 92412

Bantaeng, 14 Desember 2023

Nomor : 500.6.1/1587/DISTAN/2023
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Ketidaksanggupan
Penyelesaian Kegiatan**

Yth. Kepala
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura Dan Perkebunan
Propinsi Sulawesi Selatan
Di -
Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya surat pernyataan Ketidaksanggupan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal perkebunan di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kelompok tani :

Nama Kelompok Tani : SIPAKALABBIRI
Nama Ketua kelompok : H.A. Tahir
Alamat : Desa Labbo, Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng
Luas lahan : 17 Ha
Jumlah anggota : 15 Orang

TIDAK SANGGUP menyelesaikan kegiatan pengembangan lahan pertanian produktif pada areal perkebunan yang telah cair 70% sesuai Surat Pernyataan Ketidaksanggupan yang telah ditanda tangani (Terlampir).


BAKHTIAR, SP, MM
NIP. 19660910 199103 1 012



Lampiran 16. SID Optimasi Lahan Rawa untuk TA 2024

No	Provinsi / Kabupaten	Vol (ha)	Total Alokasi (Rp)	Total Realisasi	
				Rp	%
SID OPLA RAWA		1.150	308.500.000	274.602.885	89,01
1	Sumatera Utara	1.050	280.500.000	274.602.885	97,90
	Langkat	200	53.000.000	52.484.850	99,03
	Nias Selatan	200	53.000.000	52.506.000	99,07
	Labuhan Batu	200	53.000.000	51.775.650	97,69
	Batubara	100	28.000.000	27.769.650	99,18
	Nias Utara	150	40.500.000	40.251.600	99,39
	Asahan	200	53.000.000	49.615,35	93,99
2	Kalimantan Barat	100	28.000.000	0	0
	Ketapang	100	28.000.000	0	0

Lampiran 17. SID Optimasi Lahan Rawa untuk TA 2025

No	Provinsi / Kabupaten	Vol (ha)	Total (Rp)	Total Realisasi	
				Rp	%
SID OPLA RAWA		1.300	375.000.000	339.807.600	90,62
I	Bangka Belitung	200	54.000.000	53.453.000	98,99
	Bangka Barat	100	27.000.000	26.726.500	98,99
	Beltung Timur	100	27.000.000	26.726.500	98,99
II	Sumatera Utara	600	162.000.000	156.878.750	96,84
	Mandailing Natal	100	27.000.000	26.580.900	98,45
	Tapanuli Tengah	100	27.000.000	26.769.650	99,15
	Tapanuli Selatan	100	27.000.000	24.769.650	91,74
	Labuhan Batu	100	27.000.000	27.000.000	100,00
	Labuhan Batu Utara	100	27.000.000	24.758.550	91,70
	Serdang Berdagai	100	27.000.000	27.000.000	100,00
III	Kalimantan Tengah	200	60.000.000	57.575.850	95,96
	PROVINSI		8.000.000	7.920.000	99,00
	Barito Selatan	200	52.000.000	49.655.850	95,49
IV	Papua Selatan	200	64.000.000	37.000.000	57,81
	PROVINSI		10.000.000	10.000.000	100,00
	Merauke	100	27.000.000	27.000.000	100,00
	Mappi	100	27.000.000	0	-
V	Kalimantan Barat	100	27.000.000	34.900.000	99,71
	PROVINSI		8.000.000	8.000.000	100,00
	Sintang	100	27.000.000	26.900.000	99,63



Lampiran 18. SID Optimasi Lahan Kering untuk TA 2024

No	Provinsi / Kabupaten	Vol (ha)	Total Alokasi (Rp)	Total Realisasi	
				Rp	%
	SID OPLA KERING	3.480	488.431.000	483.709.600	94,94
I	Jawa Timur	600	90.000.000	87.878.500	97,64
	Provinsi		12.000.000	12.000.000	100,00
	Sumenep	100	13.000.000	12.351.750	95,01
	Tuban	100	13.000.000	12.700.000	97,69
	Madiun	100	13.000.000	12.351.750	95,01
	Jember	100	13.000.000	13.000.000	100,00
	Tulungagung	100	13.000.000	12.600.000	96,46
	Blitar	100	13.000.000	12.675.000	97,50
II	Sulawesi Barat	300	45.000.000	32.368.000	70,37
	Provinsi		7.000.000	6.368.000	90,97
	Mamuju	100	13.000.000	-	-
	Palewali Mandar	100	13.000.000	13.000.000	100,00
	Majene	100	13.000.000	13.000.000	100,00
III	Sulawesi Utara	100	32.000.000	31.680.000	99,00
	Provinsi		17.000.000	16.680.000	98,12
	Minahasa	100	15.000.000	15.000.000	100,00
IV	Nusa Tenggara Timur	400	52.000.000	51.890.000	99,79
	Manggarai	100	13.000.000	12.890.000	99,15
	Manggarai Barat	100	13.000.000	13.000.000	100,00
	Ngada	100	13.000.000	13.000.000	100,00
	Sumba Tengah	100	13.000.000	13.000.000	100,00
VI	Jawa Barat	100	20.000.000	20.000.000	100,00
	Provinsi		7.000.000	7.000.000	100,00
	Bogor	100	13.000.000	13.000.000	100,00
VII	Sulawesi Selatan	400	56.431.000	56.400.000	99,94
	Provinsi		10.431.000	10.400.000	99,70
	Bone	200	23.000.000	23.000.000	100,00
	Barru	200	23.000.000	23.000.000	100,00
VIII	Sumatera Utara	1.580	192.000.000	183.493.100	95,57
	PROVINSI		10.000.000	10.000.000	100,00
	Tapaneli Utara	200	23.000.000	22.752.450	98,92
	Simalungun	200	23.000.000	22.350.400	97,18
	Nias Barat	230	26.000.000	22.804.650	87,71
	Samosir	200	23.000.000	19.514.900	84,85
	Padang Lawas Utara	200	23.000.000	23.000.000	100,00
	Toba	150	18.000.000	18.000.000	100,00
	Serdang Berdagai	200	23.000.000	23.000.000	100,00
	Padang Lawas	200	23.000.000	22.070.400	95,96



Lampiran 19. SID Optimasi Lahan Kering untuk TA 2025

No	Provinsi / Kabupaten	Vol (ha)	Total (Rp)	Total Realisasi	
				Rp	%
SID OPLA KERING		3.250	453.998.000	443.576.850	97,70
I	Bangka Belitung	400	60.890.000	60.890.000	100,00
	Provinsi		8.000.000	8.000.000	100,00
	Beltung Timur	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Bangka Selatan	100	16.890.000	16.890.000	100,00
	Bangka	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Bangka Barat	100	12.000.000	12.000.000	100,00
II	Papua Barat Daya	500	69.000.000	67.000.000	97,10
	Provinsi		7.000.000	7.000.000	100,00
	Sorong	200	22.000.000	22.000.000	100,00
	Sorong Selatan	200	22.000.000	20.000.000	90,91
	Raja Ampat	100	18.000.000	18.000.000	100,00
III	Papua Selatan	200	29.000.000	29.000.000	100,00
	Provinsi		7.000.000	7.000.000	100,00
	Merauke	200	22.000.000	22.000.000	100,00
IV	Gorontalo	400	66.000.000	66.000.000	100,00
	Provinsi		8.000.000	8.000.000	100,00
	Pahuwato	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Gorontalo Utara	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Bodelemo	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Bone Bolango	100	12.000.000	12.000.000	100,00
V	Sulawesi Utara	250	27.000.000	27.000.000	100,00
	Minahasa	100	10.000.000	10.000.000	100,00
	Tomohon	50	7.000.000	7.000.000	100,00
	Bolaang Mongondow	100	10.000.000	10.000.000	100,00
VI	Sumatera Utara	800	98.000.000	89.712.450	93,45
	Langkat	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Karo	100	12.000.000	10.000.000	83,33
	Pakpak Bharat	100	12.000.000	10.000.000	83,33
	Deli Serdang	100	12.000.000	11.712.450	97,60
	Simalungun	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Padang Lawas	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Padang Lawas Utara	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Samosir	100	12.000.000	10.000.000	83,33
VII	NTT	600	104.108.000	101.974.400	97,95
	Provinsi		32.158.000	32.124.400	99,90
	Belu	100	11.950.000	11.950.000	100,00
	Sumba Timur	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Sikka	100	12.000.000	11.950.000	99,58
	Sumba Barat Daya	100	12.000.000	11.950.000	99,58
	Kupang	100	12.000.000	10.000.000	83,33
	Ende	100	12.000.000	12.000.000	100,00
VIII	Jawa Barat	100	12.000.000	12.000.000	100,00
	Purwakarta	100	12.000.000	12.000.000	100,00



Lampiran 20. Realisasi Pembangunan Jalan Usaha Tani TA 2023

Provinsi	Pagu (unit)	Pagu (Rp)	Realisasi (unit)	Realisasi (Rp)
ACEH	44	4.400.000.000	44	4.400.000.000
BAI	13	1.300.000.000	13	1.300.000.000
BANTEN	8	800.000.000	8	800.000.000
JAMBI	14	1.400.000.000	14	1.400.000.000
JAWA BARAT	180	18.000.000.000	180	18.000.000.000
JAWA TENGAH	109	10.900.000.000	109	10.900.000.000
JAWA TIMUR	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000
KAUMANTAN BARAT	32	3.200.000.000	32	3.200.000.000
KAUMANTAN SELATAN	9	900.000.000	9	900.000.000
KAUMANTAN TENGAH	13	1.300.000.000	13	1.300.000.000
KAUMANTAN TIMUR	11	1.100.000.000	11	1.100.000.000
LAMPUNG	43	4.300.000.000	43	4.300.000.000
MALUKU	19	1.900.000.000	19	1.900.000.000
MALUKU UTARA	13	1.300.000.000	13	1.300.000.000
Nusa Tenggara Barat	34	3.400.000.000	34	3.400.000.000
NUSA TENGGARA TIMUR	32	3.200.000.000	32	3.200.000.000
PAPUA	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000
PAPUA TENGAH	3	300.000.000	3	300.000.000
RIAU	5	500.000.000	5	500.000.000
SULAWESI BARAT	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000
SULAWESI SELATAN	10	11.000.000.000	10	11.000.000.000
SULAWESI TENGGARA	33	3.300.000.000	33	3.300.000.000
SUMATERA BARAT	22	2.200.000.000	22	2.200.000.000
SUMATERA SELATAN	28	2.800.000.000	28	2.800.000.000
SUMATERA UTARA	31	3.100.000.000	31	3.100.000.000
Total	928	92.800.000.000	928	92.800.000.000

Lampiran 21. Realisasi Kegiatan Lahan Konservasi dan Rehabilitasi TA 2023

Jenis	Provinsi	Pagu (unit)	Pagu (Rp)	Realisasi (unit)	Realisasi (Rp)
SMART FARM & KORPORASI PERTANIAN	ACEH	1	3.583.000.000	1	3.583.000.000
	BAI	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000
	BANTEN	3	4.656.000.000	3	4.656.000.000
	JAMBI	4	5.530.000.000	4	5.561.000.000
	JAWA BARAT	3	8.784.000.000	3	8.184.000.000
	JAWA TIMUR	5	16.301.000.000	5	15.521.000.000
	NUSA TENGGARA BARAT	3	3.450.000.000	3	3.450.000.000
	SULAWESI SELATAN	2	4.213.000.000	2	4.213.000.000
	SMART GREENHOUSE	ACEH	2	1.000.000.000	2
DKI JAKARTA		2	1.000.000.000	2	1.000.000.000
JAMBI		2	1.000.000.000	2	300.000.000
JAWA BARAT		3	1.500.000.000	2	1.500.000.000
JAWA TIMUR		2	1.000.000.000	2	1.000.000.000
SULAWESI SELATAN		3	4.000.000.000	3	4.000.000.000
SUMATERA UTARA	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	
TOTAL		47	81.587.000.000	46	69.438.000.000



Lampiran 22. Realisasi Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2023

No	Provinsi	Alokasi		Realisasi			
		Fisik	Anggaran	Fisik	%	Anggaran	%
1	ACEH	82	16.400.000.000	82	100,00	16.400.000.000	100,00
2	BALI	18	3.600.000.000	18	100,00	3.600.000.000	100,00
3	BANTEN	20	4.000.000.000	20	100,00	4.000.000.000	100,00
4	DIY	1	200.000.000	1	100,00	200.000.000	100,00
5	GORONTALO	2	400.000.000	2	100,00	400.000.000	100,00
6	JAMBI	15	3.000.000.000	15	100,00	3.000.000.000	100,00
7	JAWA BARAT	159	31.800.000.000	159	100,00	31.800.000.000	100,00
8	JAWA TENGAH	123	24.600.000.000	122	99,19	24.540.000.000	99,76
9	JAWA TIMUR	134	26.800.000.000	134	100,00	26.800.000.000	100,00
10	KALIMANTAN BARAT	40	8.000.000.000	40	100,00	8.000.000.000	100,00
11	KALIMANTAN SELATAN	1	200.000.000	1	100,00	200.000.000	100,00
12	KALIMANTAN TENGAH	19	3.800.000.000	19	100,00	3.800.000.000	100,00
13	KALIMANTAN TIMUR	20	4.000.000.000	20	100,00	4.000.000.000	100,00
14	LAMPUNG	73	14.600.000.000	73	100,00	14.600.000.000	100,00
15	MALUKU	34	6.800.000.000	34	100,00	6.800.000.000	100,00
16	MALUKU UTARA	20	4.000.000.000	20	100,00	4.000.000.000	100,00
17	NUSA TENGGARA BARAT	54	10.800.000.000	54	100,00	10.800.000.000	100,00
18	NUSA TENGGARA TIMUR	57	11.400.000.000	57	100,00	11.400.000.000	100,00
19	PAPUA	20	4.000.000.000	20	100,00	4.000.000.000	100,00
20	RIAU	3	600.000.000	3	100,00	600.000.000	100,00
21	SULAWESI BARAT	21	4.200.000.000	21	100,00	4.200.000.000	100,00
22	SULAWESI SELATAN	82	16.400.000.000	81	98,78	16.340.000.000	99,63
23	SULAWESI TENGAH	1	200.000.000	1	100,00	200.000.000	100,00
24	SULAWESI TENGGARA	1	200.000.000	1	100,00	200.000.000	100,00
25	SUMATERA BARAT	22	4.400.000.000	22	100,00	4.400.000.000	100,00
26	SUMATERA SELATAN	44	8.800.000.000	44	100,00	8.800.000.000	100,00
27	SUMATERA UTARA	45	9.000.000.000	45	100,00	9.000.000.000	100,00
Total		1.111	222.200.000.000,00	1.109	99,82	222.080.000.000,00	99,95



Lampiran 23. Realisasi Pembangunan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) TA 2023

No	Provinsi	Realisasi	
		Fisik	Anggaran
1	DI YOGYAKARTA	10	283.820.000
2	JAWA BARAT	73	2.144.875.000
3	JAWA TENGAH	19	547.860.000
4	JAWA TIMUR	74	2.141.535.000
5	KALIMANTAN BARAT	30	1.010.280.000
6	KALIMANTAN TENGAH	14	466.750.000
7	KALIMANTAN TIMUR	13	439.750.000
8	LAMPUNG	41	1.220.310.000
9	MALUKU	4	144.950.000
10	MALUKU UTARA	10	358.200.000
11	NUSA TENGGARA TIMUR	50	1.849.402.000
12	PAPUA SELATAN	18	705.600.000
13	SULAWESI SELATAN	15	466.630.000
14	SULAWESI TENGAH	3	98.910.000
15	SULAWESI TENGGARA	6	204.824.000
16	SUMATERA SELATAN	27	830.568.000
17	SUMATERA UTARA	12	391.590.000
Total		419	11.107.454.000

Lampiran 24. Realisasi Pupuk Silika TA 2023

No	Provinsi	Kab/Kota	Realisasi
			Fisik
1	BANTEN	PANDEGLANG	10.500
2	GORONTALO	BOALEMO	2.252
3		GORONTALO UTARA	13.500
4	JAWA BARAT	KARAWANG 29.805	16.000
5		PANGANDARAN	2.500
6	JAWA TIMUR	BLITAR	7.658
7	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	29.520
8		LOMBOK TIMUR	30.000
9	SULAWESI BARAT	MAJENE	1.676
10		POLEWALI MANDAR	13.502
11	SULAWESI SELATAN	INDUKANG	0.585
12		JENEPONTO	12.000
13		TAKALAR	5.398
14		TANA TORAJA	3.217
15		TORAJA UTARA	1.952
16	SULAWESI TENGAH	PARISI MOUTONG	26.203
17	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONDONDOW UTARA	12.700
18	SUMATERA UTARA	SAMOSIR	3.836
Total			201.919



Lampiran 25. Realisasi Dekomposer TA 2023

No	Provinsi	Kab/Kota	Realisasi Fisik
1	ACEH	ACEH TENGGARA	42.500
2	BENGKULU	BENGKULU SELATAN	29.465
3		KAUR	19.610
4	JAWA TIMUR	BLITAR	38.290
5		JOMBANG	55.000
6	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	22.200
7	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	17.175
8		BOLAANG MONGONDOW UTARA	71.140
9		MINAHASA TENGGARA	25.000
10		MINAHASA UTARA	16.500
Total			336.880

Lampiran 26. Realisasi Pupuk Magnesium TA 2023

No	Provinsi	Kab/Kota	Realisasi Fisik
1	ACEH	ACEH JAYA	4296
2		ACEH SINGKIL	425
3		ACEH UTARA	15000
4		BENER MERIAH	762
5	JAWA TENGAH	PEMALANG	3400
6	KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR	3739
7		KOTAWARINGIN TIMUR	4278
8		PULANG PISAU	3983
9	KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN	5392
10	MALUKU	AMBON	22
11		BURU	1500
12		MALUKU TENGAH	3330
13		SERAM BAGIAN TIMUR	150
14	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	20745
Total			67.022



Lampiran 27. Realisasi Kegiatan Herbisida TA 2023

No	Provinsi	Kab/Kota	Realisasi Fisik
1	ACEH	ACEH BESAR	20.710
2		ACEH SELATAN	6.940
3	BENGKULU	REJANG LEBONG	5.550
4		SELUMA	5.500
5	JAWA TENGAH	KENDAL	13.877
6		KLATEN	21.030
7	JAWA TIMUR	BONDOWOSO	9.000
8		SAMPANG	3.850
9	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA	2.000
10		KETAPANG	5.456
11		KUBU RAYA	5.000
12		LANDAK	3.200
13		MEMPAWAH	6.608
14		SAMBAS	5.250
15	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	11.000
16	SULAWESI SELATAN	GOWA	4.000
17	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	5.793
18		BUOL	2.851
19		DONGGALA	14.186
20		MOROWALI	4.476
21		MOROWALI UTARA	6.419
22		PARIGI MOUNTONG	21.416
23		POSO	13.249
24		SIGI	3.659
25	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA	10.240
Total			211.260



Lampiran 28. Realisasi Kegiatan Pestisida Alami TA 2023

No	Provinsi	Kab/Kota	Realisasi Fisik
1	BALI	BULELENG	1.500
2		TABANAN	1.500
3	BANTEN	SERANG	1.500
4	JAWA BARAT	BANDUNG	2.000
5		BANDUNG BARAT	2.000
6		CIAMIS	1.000
7		CIANJUR	1.540
8		KUNINGAN	1.500
9	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	1.500
10		BOYOLALI	1.500
11		KARANGANYAR	1.500
12		PEMALANG	2.000
13	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	1.000
14		NGAWI	1.100
15	SUMATERA BARAT	SOLOK	1.500
16	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	1.550
17	SUMATERA UTARA	DELI SERDANG	1.000
18		SERDANG BEDAGAI	1.000
Total			26.190

Lampiran 29. Wilayah Sampling Verifikasi Lapangan Tahun 2023

No Periode	Provinsi	Kabupaten
I	Aceh	Aceh Besar, Aceh Jaya
	Jawa Barat	Tasikmalaya, Garut
	Jawa Timur	Bangkalan, Sidoarjo
	Sulawesi Selatan	Sidrap, Soppeng
2	Bengkulu	Bengkulu Selatan, Seluma
	DIY	Bantul, Kulonpraga
	Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Kutai Keratanegara
3	Jambi	Merangin, Batanghari
	Kalimantan Selatan	Tapin, Barito Kuala
	NTT	Manggarai, Manggarai Barat
	Sulawesi Utara	Minahasa, Minahasa Selatan
4	Banten	Serang, Pandeglang
	Jawa Tengah	Brebes, Tegal
	Sulawesi Tengah	Tejo Una-Una, Banggai
5	Bangka Belitung	Bangk, Bangka Barat
	Kalimantan Utara	Kota Tarakan, Bulungan
	Garontala	Garontala, Kota Garontala
	Maluku Utara	Kota Ternate, Halmahera Timur



Lampiran 30. Realisasi Pelaku Usaha yang Mendapatkan Akses Pembiayaan melalui KUR

No.	Bank Pelaksana	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah Kredit (Rp)		
1	BNI	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	99	17.918.660.000		
		Sumatera Barat	Kab. Solok	52	5.232.000.000		
			Kab. Agam	72	12.935.000.000		
		Riau	Kab. Pelalawan	100	16.879.000.000		
		Jambi	Kab. Kerinci	36	8.600.000.000		
			Kab. Batanghari	97	24.119.443.482		
		Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	86	6.154.000.000		
		Lampung	Kab. Lampung Timur	99	11.950.400.000		
		Banten	Kab. Serang	59	7.104.726.000		
			Kab. Cirebon	80	3.095.000.000		
		Jawa Barat	Kab. Sumedang	126	18.882.880.000		
			Kab. Majalengka	82	3.629.556.250		
			Kab. Karawang	41	5.385.892.900		
			Kab. Subang	34	4.036.898.200		
		Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	35	6.272.000.000		
		Jawa Timur	Kab. Ngawi	76	4.587.221.950		
			Kab. Lamongan	97	1.598.107.750		
		D.I. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	100	17.973.000.000		
		Bali	Kab. Bangli	100	19.354.500.000		
		Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	47	4.070.000.000		
		Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	100	5.076.200.000		
		Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	99	10.809.000.000		
		Kalimantan Timur	Kab. Berau	100	19.595.000.000		
		Gerontala	Kab. Gorontalo	100	3.374.750.000		
		2	Bank Mandiri	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	76	9.370.000.000
				Jawa Barat	Kab. Indramayu	71	2.611.321.000
Kab. Banjarnegara	76				4.375.000.000		
Jawa Tengah	Kab. Wonosobo			49	2.661.500.000		
	Kab. Pasuruan			100	4.858.450.000		
Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur			100	5.148.000.000		
Kalimantan Barat	Kab. Mempawah			100	7.365.000.000		
Sulawesi Tengah	Kab. Sigi			100	8.338.800.000		
Sulawesi Selatan	Kab. Maros			100	9.070.000.000		
Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat			31	1.715.000.000		
	Kab. Halmahera Utara			24	1.500.000.000		
Papua	Kab. Keerom			4	740.000.000		
	Aceh			Kab. Aceh Selatan	94	8.237.000.000	
Kab. Aceh Utara		100	5.430.100.004				
3	BSI						
4	BPD Papua	Papua	Kab. Keerom	49	4.641.000.000		
5	BRI	Papua	Kab. Keerom	5	150.000.000		
TOTAL				3.000	314.844.407.536		



Lampiran 31. Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) TA 2023

No	Sektor	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Debitur (orang)
1	Tanaman Pangan	28.000.000.000.000	18.901.015.815.435	67,50	484.498
2	Hortikultura	15.000.000.000.000	7.829.176.176.055	52,19	186.598
3	Perkebunan	33.000.000.000.000	32.174.492.584.291	97,50	474.202
4	Peternakan	24.000.000.000.000	14.594.234.292.953	60,81	314.022
5	Kombinasi Pertanian/Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)	0,00	6.163.925.276.609	0,00	164.407
6	Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	0,00	911.933.197.000	0,00	17.855
TOTAL		100.000.000.000.000	80.574.777.342.343	80,57	1.641.580

Lampiran 32. Realisasi Keuangan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TA. 2023

No	Jenis Pengadaan	Satuan	PAGU		Realisasi Kontrak			Realisasi Keuangan		
			Volume	Rp	Unit	%	Rp	%	Rp	%
1	Traktor Roda 4	Unit	1.076	379.988.400.000	1.076	100,00	379.955.483.142	99,99	379.955.483.142	99,99
2	Traktor Roda 2	Unit	5.504	168.895.744.000	5.504	100,00	168.876.132.700	99,87	168.876.131.700	99,87
3	Pompa Air	Unit	2.753	57.964.415.000	2.753	100,00	57.809.792.000	99,73	57.809.792.000	99,73
4	Pompa Air (Gernas)	Unit	135	3.240.000.000	135	100,00	2.742.345.100	84,64	2.742.345.100	84,64
5	Hand Sprayer	Unit	10.266	10.081.478.000	10.266	100,00	10.089.412.850	99,98	10.089.412.850	99,98
6	Cultivator	Unit	2.775	43.914.375.000	2.775	100,00	43.782.078.000	99,70	43.782.078.000	99,70
7	Kendaraan Roda 3	Unit	572	20.861.698.000	572	100,00	20.857.769.500	99,98	20.857.769.500	99,98
Selisih			-	278.000	-	-	-	-	-	-
Jumlah		Unit	23.081	684.857.388.000	23.081	100,00	683.913.013.292	99,85	683.913.012.292	99,85



Lampiran 33. Rekapitulasi Penyelesaian BASTB Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian melalui Aplikasi BAST Online Tahun 2023

NO	PROVINSI	ALOKASI		INPUT BAST ONLINE		UPLOAD		PILIH NO		PENETAPAN CPCL DINAS	
		UNIT	NILAI RP	UNIT	%	NILAI RP	%	DOKUMEN	FOTO PENYERAHAN		RANGKA DAN MESIN
1	ACEH	1202	61164.879.925	894	74,38%	55.404.988.126	90,58%	76,82%	76,13%	64,27%	64,88%
2	BALI	231	3.953.031.500	231	100,00%	3.953.031.500	100,00%	100,00%	100,00%	99,31%	97,84%
3	BANTEN	626	17.299.142.245	486	72,84%	13.630.879.096	78,83%	91,7%	92,11%	73,09%	69,01%
4	BENGKULU	7	130.890.000	7	100,00%	130.890.000	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%	100,00%
5	DI YODYAKARTA	52	562.065.400	37	71,15%	449.253.400	79,93%	48,48%	33,33%	45,45%	9,62%
6	GORONTALO	349	19.954.381.100	284	81,38%	16.276.935.500	81,57%	77,23%	96,43%	32,74%	90,83%
7	JAMBI	134	3.867.583.360	132	98,51%	3.813.677.360	98,61%	90,63%	80,2%	46,88%	70,90%
8	JAWA BARAT	3.481	64.736.616.120	2.332	67,38%	50.016.207.930	78,81%	85,00%	80,05%	56,65%	31,48%
9	JAWA TENGAH	2043	46.740.356.500	1621	79,34%	37.647.107.600	80,55%	75,72%	84,38%	42,02%	63,39%
10	JAWA TIMUR	2.476	56.599.045.294	1.634	61,95%	41.630.839.494	73,38%	70,30%	71,01%	56,66%	23,64%
11	KALIMANTAN BARAT	938	21.746.401.795	626	66,74%	10.204.786.130	54,00%	85,89%	81,43%	48,26%	61,82%
12	KALIMANTAN SELATAN	4	103.528.000	4	100,00%	103.528.000	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
13	KALIMANTAN TENGAH	289	7.230.567.308	264	91,35%	6.701.307.308	92,57%	100,00%	100,00%	75,14%	98,17%
14	KALIMANTAN TIMUR	297	6.566.201.294	101	34,01%	5.197.668.994	79,16%	69,07%	51,55%	68,68%	47,86%
15	KEPULAUAN RIAU	3	1.251.000.000	3	100,00%	1.251.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	LAMPUNG	1.506	38.328.841.500	1.472	97,74%	37.175.361.940	96,99%	97,48%	98,74%	84,74%	53,12%
17	MALUKU	698	24.910.709.300	373	53,44%	18.667.378.762	63,86%	84,89%	93,20%	81,29%	35,73%
18	MALUKU UTARA	280	9.028.518.500	272	97,14%	8.896.356.500	98,20%	89,47%	98,84%	98,94%	80,00%
19	MUSA TENGGARA BARAT	704	19.874.843.861	548	77,84%	7.131.777.252	35,88%	100,00%	100,00%	05,00%	21,8%
20	MUSA TENGGARA TIMUR	900	23.976.887.687	653	72,56%	18.871.703.947	78,71%	92,57%	89,52%	77,33%	55,56%
21	PAPUA	105	3.309.733.500	59	56,20%	2.285.949.000	68,46%	100,00%	100,00%	87,50%	47,30%
22	PAPUA SELATAN	283	8.467.234.000	268	94,70%	8.273.329.000	98,23%	90,63%	86,25%	74,38%	88,69%
23	PAPUA TENGAH	320	1.830.287.500	320	100,00%	1.830.287.500	100,00%	52,72%	92,05%	70,86%	46,83%
24	RIAU	15	1.070.528.000	15	100,00%	1.070.528.000	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%	100,00%
25	SULAWESI BARAT	364	14.126.380.115	224	61,54%	13.660.582.115	96,70%	93,78%	87,08%	90,91%	55,49%
26	SULAWESI SELATAN	3.595	127.020.328.726	2.485	69,12%	84.335.479.856	66,40%	86,02%	90,56%	81,66%	21,36%
27	SULAWESI TENGAH	114	10.532.926.092	63	55,26%	9.282.035.192	88,13%	100,00%	95,08%	62,30%	64,04%
28	SULAWESI TENGGARA	498	28.110.712.200	484	97,19%	28.024.361.200	98,69%	87,58%	97,34%	78,90%	60,04%
29	SULAWESI UTARA	13	417.651.100	13	100,00%	417.651.100	100,00%	23,08%	23,08%	0,00%	100,00%
30	SUMATERA BARAT	311	8.376.665.176	230	73,95%	5.165.462.276	61,60%	96,48%	92,16%	93,72%	73,31%
31	SUMATERA SELATAN	668	21.804.800.500	616	92,07%	20.710.494.500	94,57%	90,71%	95,35%	72,13%	76,00%
32	SUMATERA UTARA	671	31.209.613.008	588	87,63%	26.523.307.027	81,76%	88,44%	81,0%	71,43%	74,07%
Grand Total		23.081	483.815.453.194	17.038	73,8%	544.731.191.593	76,6%	87,67%	86,52%	65,16%	66,09%



Lampiran 34. Rekapitulasi Laporan Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2022 per Provinsi

No.	Provinsi	Alokasi 2022	Unit Terlapor	%
1	Jawa Barat	2.427	310	12,77
2	Jawa Tengah	2.607	452	17,34
3	DI. Yogyakarta	17	3	17,65
4	Jawa Timur	2.537	721	28,42
5	Aceh	823	8	0,97
6	Sumatera Utara	866	119	13,74
7	Sumatera Barat	241	66	27,39
8	Riau	8	2	25,00
9	Jambi	7	-	-
10	Sumatera Selatan	466	100	21,46
11	Lampung	1.096	358	32,66
12	Kalimantan Barat	563	76	13,50
13	Kalimantan Tengah	242	81	33,47
14	Kalimantan Selatan	2	-	-
15	Kalimantan Timur	191	49	25,65
16	Sulawesi Utara	38	-	-
17	Sulawesi Tengah	293	71	24,23
18	Sulawesi Selatan	3.452	207	6,00
19	Sulawesi Tenggara	396	6	1,52
20	Maluku	453	17	3,75
21	Bali	271	57	21,03
22	Nusa Tenggara Barat	981	14	1,43
23	Nusa Tenggara Timur	1.638	983	60,01
24	Papua	433	4	0,92
25	Maluku Utara	297	31	10,44
26	Banten	367	48	13,08
27	Kep. Bangka Belitung	55	-	-
28	Gorontalo	360	6	1,67
29	Kep. Riau	2	-	-
30	Papua Barat	33	-	-
31	Sulawesi Barat	272	65	23,90
32	Kalimantan Utara	14	14	100,00
Jumlah		21.448	3.868	18,03



Lampiran 35. Rekapitulasi Laporan Pemanfaatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2023

No	Alsintan	Alokasi Tahun 2022	Unit Terlapor				Luas (Ha)
			Sudah Digunakan	Belum Digunakan	Jumlah	%	
1	Alat Tanam Jagung	1.754	1.009	32	1.041	59,35	280
2	Cultivator	2.240	318	44	362	16,16	2.876
3	Hand Sprayer	8.006	830	129	959	11,98	3.062
4	Pompa Air	3.718	338	129	467	12,56	4.004
5	Traktor Roda 2	5.000	719	55	774	15,48	8.901
6	Traktor Roda 4	730	232	33	265	36,30	8.640
Jumlah		21.448	3.446	422	3.868	18,03	27.782

Lampiran 36. Realisasi Penerimaan PNB Pro Alsintan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2018	-	100.741.600	-
2019	100.000.000	316.910.000	317%
2020	120.000.000	302.258.000	252%
2021	140.000.000	708.379.500	506%
2022	500.000.000	923.614.000	185%
2023	550.000.000	1.187.380.270	216%

Lampiran 37. SPPT SNI yang telah diterbitkan tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Permohonan Sertifikasi	SPPT SNI Yang Telah Terbit
2019	-	19
2020	-	14
2021	-	55
2022	-	91
2023	158	88



Lampiran 35. Realisasi Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TA 2023

Provinsi	Cultivator	Handsprayer	Kendaraan Roda 3	Pompa Air	Pompa Air (Gernas)	Traktor Roda 2	Traktor Roda 4
ACEH	108	510	27	134		305	118
BALI	23	125	7	4		69	3
BANTEN	65	244	12	84	13	183	25
BENGKULU	1			3		3	
D.I. YOGYAKARTA	4	25		10		13	
GORONTALO	87	122				99	41
JAMBI	21	55	7	13		33	5
JAWA BARAT	580	1563	83	423	29	707	76
JAWA TENGAH	195	944	54	273	28	484	65
JAWA TIMUR	279	1253	68	227	22	540	87
KALIMANTAN BARAT	94	425	47	89		258	22
KALIMANTAN SELATAN					4		
KALIMANTAN TENGAH	31	140	8	29		73	8
KALIMANTAN TIMUR	33	150	10	15		38	11
KEPULAUAN RIAU							3
LAMPUNG	166	735	40	159	7	342	57
MALUKU	127	264	19	59		150	36
MALUKU UTARA	41	150	10	35		34	10
NUSA TENGGARA BARAT	60	295	20	98	4	199	28
NUSA TENGGARA TIMUR	98	450	30	107		179	36
PAPUA	18	55		24		25	3
PAPUA SELATAN	23	145	10	31		64	10
PAPUA TENGAH	50	250		20			
RIAU	4	3				6	2
SULAWESI BARAT	31	142	9	71		87	24
SULAWESI SELATAN	394	1411	49	641	16	862	222
SULAWESI TENGAH	6	17		11		59	21
SULAWESI TENGGARA	50	95		25		281	47
SULAWESI UTARA	5	5				2	1
SUMATERA BARAT	32	138	10	40		78	13
SUMATERA SELATAN	60	300	20	71	8	161	38
SUMATERA UTARA	89	255	32	57	4	170	64
Total	2775	10266	572	2753	135	5504	1076



Lampiran 36. Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau TA 2023

Provinsi	AUTP (ha)	AUTS/K (ekor)
BALI	16.161,03	366
BANTEN	3.383,47	71
BENGKULU	500,00	
DI YOGYAKARTA	837,05	61
GORONTALO	500,00	185
JAMBI	3.523,45	243
JAWA BARAT	83.720,03	751
JAWA TENGAH	39.506,71	431
JAWA TIMUR	53.701,58	1.173
KALIMANTAN BARAT	139,56	
KALIMANTAN SELATAN	6.652,75	297
KALIMANTAN TENGAH	27.351,50	247
KALIMANTAN TIMUR		97
KEP. BANGKA BELITUNG		263
KEP. RIAU		47
LAMPUNG	29.342,87	1.149
MALUKU UTARA	493,00	
NUSA TENGGARA BARAT	11.024,92	169
NUSA TENGGARA TIMUR	38,25	
RIAU	154,88	220
SULAWESI SELATAN	15.486,71	11.563
SULAWESI TENGAH	1.067,60	325
SULAWESI TENGGARA	560,60	197
SULAWESI UTARA	137,00	
SUMATRA BARAT	4.399,78	1.963
SUMATRA SELATAN	4.207,43	182
SUMATRA UTARA	2.667,95	
Total	305.558,12	20.000



